

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



ASEAN
INDONESIA
2023

bangga
melayani
bangsa

AUDITED
31 DESEMBER 2023

LAPORAN KEUANGAN

PUSDIKLAT APU PPT



EMAIL

pusdiklat-apuppt@ppatk.go.id



TELEPHONE

(021) 8750136



WEBSITE

<https://ifii.ppatk.go.id>

Audited

LAPORAN KEUANGAN

untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023



PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

Jl. Raya Tapos Nomor 82, Cimpaeun, Tapos, Depok, Jawa Barat, 16459

Telepon: +6221-8750136, +6221-8750138

Email: pusdiklat-apuppt@ppatk.go.id,

Website : <https://ifii.ppatk.go.id>

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pusdiklat Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

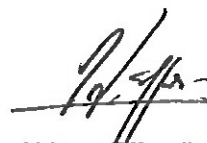
Penyusunan Laporan Keuangan Pusdiklat Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pusdiklat Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Depok, 6 Mei 2024

Kepala

Pusat Pendidikan dan Pelatihan APUPPT, 


Akhyar Effendi

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Gambar.....	v
Daftar Lampiran	vi
Pernyataan Tanggung Jawab	vii
Pernyataan Telah Direviu	vii
Ringkasan Laporan Keuangan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	4
II. Neraca.....	5
III. Laporan Operasional.....	6
IV. Laporan Perubahan Ekuitas.....	7
V. Catatan atas Laporan Keuangan.....	8
A. Penjelasan Umum	8
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	20
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	32
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	48
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	60
F. Pengungkapan Penting Lainnya	65

Daftar Tabel

Tabel 1	: Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022	1
Tabel 2	: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022	1
Tabel 3	: Ringkasan Neraca per 31 Desember 2023 dan 2022	2
Tabel 4	: Ringkasan Laporan Operasional untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022	3
Tabel 5	: Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022	3
Tabel 6	: Penggolongan Kualitas Piutang	16
Tabel 7	: Penggolongan Masa Manfaat Kelompok Aset Tetap	18
Tabel 8	: Penggolongan Masa Manfaat Kelompok Aset Tak Berwujud	19
Tabel 9	: Perubahan DIPA Pusdiklat APU PPT Tahun 2023	20
Tabel 10	: DIPA Pusdiklat APUPPT Berdasarkan Program Tahun 2023	20
Tabel 11	: Rincian Perbandingan Realisasi Pendapatan untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022	21
Tabel 12	: Rincian Realisasi Pendapatan untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023	21
Tabel 13	: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja (Neto) untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2023	22
Tabel 14	: Perbandingan Realisasi Belanja (Neto) untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022	23
Tabel 15	: Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022	24
Tabel 16	: Perbandingan Realisasi Belanja Barang untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022	26
Tabel 17	: Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun 2023 dan 2022	30
Tabel 18	: Rincian Pembelian Peralatan dan Mesin Tahun 2023	31
Tabel 19	: Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2023 dan 2022	32
Tabel 20	: Rincian Belanja Dibayar Dimuka (<i>Prepaid</i>) per 31 Desember 2023	32
Tabel 21	: Rincian Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2023	33
Tabel 22	: Rincian Nilai Persediaan Neraca per 31 Desember 2023	34
Tabel 23	: Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022	35
Tabel 24	: Rincian Mutasi Tanah per 31 Desember 2023	35
Tabel 25	: Rincian Aset Tanah per 31 Desember 2023	36
Tabel 26	: Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin Tahun 2023	37
Tabel 27	: Rincian Pembelian Peralatan dan Mesin Tahun 2023	38
Tabel 28	: Rincian Transfer Masuk Peralatan dan Mesin Tahun 2023	39
Tabel 29	: Rincian Mutasi Nilai Gedung dan Bangunan Tahun 2023	39
Tabel 30	: Rincian Aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023	40
Tabel 31	: Rincian Mutasi Nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2023	41
Tabel 32	: Rincian Mutasi Nilai Aset Tetap Lainnya Tahun 2023	41

Tabel 33	: Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2023	42
Tabel 34	: Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023	43
Tabel 35	: Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022	43
Tabel 36	: Rincian Mutasi Nilai Aset Tak Berwujud Tahun 2023	44
Tabel 37	: Rincian Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2023	44
Tabel 38	: Rincian Mutasi Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan Tahun 2023	45
Tabel 39	: Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2023	46
Tabel 40	: Perbandingan Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 dan Desember 2022	46
Tabel 41	: Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023	46
Tabel 42	: Rincian Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2023	47
Tabel 43	: Rincian Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya per 31 Desember 2023	47
Tabel 44	: Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023	48
Tabel 45	: Perbandingan Rincian Beban Operasional untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022	49
Tabel 46	: Perbandingan Rincian Beban Pegawai untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022	49
Tabel 47	: Perbandingan Rincian Beban Persediaan untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022	52
Tabel 48	: Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022	52
Tabel 49	: Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022	55
Tabel 50	: Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022	56
Tabel 51	: Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022	57
Tabel 52	: Rincian Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023	58
Tabel 53	: Rincian Beban Pelepasan Aset Non Lancar untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023	59
Tabel 54	: Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023	59
Tabel 55	: Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023	61
Tabel 56	: Rincian Transaksi Antar Entitas untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022	61
Tabel 57	: Rincian Diterima dari Entitas Lain untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2023	64
Tabel 58	: Rincian Capaian <i>Output</i> per Fungsi APBN Pelayanan Umum (01) Tahun 2023	65
Tabel 59	: Rincian PN VII - Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik Tahun 2023	65
Tabel 60	: Rincian Target dan Realisasi Pelatihan bagi Apgakum Tahun 2023	66

Daftar Gambar

Gambar 1 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja (Neto) untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2023	22
--	----

Daftar Lampiran

1. Neraca Percobaan Tingkat Satuan Kerja per 31 Desember 2023	A
2. Laporan Realisasi Anggaran Tingkat Satuan Kerja Menurut Akun untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023	B
3. Daftar Rekening Pemerintah untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023	C
4. Hasil Rekonsiliasi SAKTI – SPAN Periode sampai dengan Periode Desember 2023	D



**PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANTI PENCUCIAN UANG
DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME**

Jl. Tapos Raya No. 82, Cimpaeun, Tapos, Depok, Jawa Barat 16459, Telepon +6221-8750132, 8750133
Email : pusdiklat-apuppt@ppatk.go.id, Website : <https://pusdiklat-apuppt.ppatk.go.id>

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Satuan Kerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk Periode yang Berakhir tanggal 31 Desember 2023 (*Audited*) sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Depok, 6 Mei 2024

Kepala
Pusat Pendidikan dan Pelatihan APUPPT, *Y.*


Akhyar Effendi



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN INSPEKTORAT

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Telp, +6221-3850455, Faks, +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Satker Pusat Pendidikan dan Pelatihan APUPPT untuk tahun anggaran 2023 berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan SAP. Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan lain yang terkait.

Jakarta, 15 Februari 2024

Plh. Inspektur



Nelson D.P. Manalu
198002102005011010



Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
This document is signed using digital certificate by Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



INDONESIA
OFFICIAL 40TH ANNUAL MEETING
START OCTOBER 2023

01



**RINGKASAN
LAPORAN KEUANGAN**
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023

PUSDIKLAT ANTI PENCUCIAN UANG
DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME
DEPOK, JAWA BARAT

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Satuan Kerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Pusdiklat APU PPT) untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 ini telah disusun dan dijelaskan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan - LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023. Pusdiklat APU PPT memiliki Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp446.720.880 dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0. Realisasi Belanja Pusdiklat APU PPT untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp28.950.582.797 atau mencapai 99,67% dari alokasi anggaran sebesar Rp29.047.337.000. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 sebagaimana dijelaskan pada Tabel 1.

Tabel 1
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran
untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2023			31 Desember 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan	-	446.720.880	-	241.713.193
Belanja	29.047.337.000	28.950.582.797	99,67	24.492.921.781
Pembiayaan	-	-	-	-

Pagu dan realisasi anggaran belanja Pusdiklat APU PPT untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 menurut jenis belanja dijelaskan pada Tabel 2.

Tabel 2
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja
untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023
(dalam Rupiah)

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi (Neto)	Realisasi %
Pegawai	13.337.121.000	13.290.096.059	99,65
Barang	12.846.642.000	12.803.884.345	99,67
Modal	2.863.574.000	2.856.602.393	99,76
Jumlah	29.047.337.000	28.950.582.797	99,67

2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023. Nilai Aset Pusdiklat APU PPT per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp129.872.804.971 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp674.245.974, Aset Tetap (neto) sebesar Rp129.008.873.637, dan Aset Lainnya sebesar Rp189.685.360.

Nilai Kewajiban Pusdiklat APU PPT seluruhnya tersaji sebesar Rp380.754.316 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek. Nilai Ekuitas Pusdiklat APU PPT dijelaskan sebesar Rp129.492.050.655. Ringkasan Neraca per 31 Desember 2023 dan 2022 dijelaskan pada Tabel 3.

Tabel 3
Ringkasan Neraca
per 31 Desember 2023 dan 2022
(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)	
			Nilai	%
Aset				
Aset Lancar	674.245.974	570.534.771	103.711.203	18,18
Aset Tetap	129.008.873.637	130.084.463.537	(1.075.589.900)	(0,83)
Aset Lainnya	189.685.360	502.112.584	(312.427.224)	(62,22)
Jumlah Aset	129.872.804.971	131.157.110.892	(1.284.305.921)	(0,98)
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	380.754.316	160.609.890	220.144.426	137,07
Jumlah Kewajiban	380.754.316	160.609.890	220.144.426	137,07
Ekuitas				
Ekuitas	129.492.050.655	130.996.501.002	(1.504.450.347)	(1,15)
Jumlah Ekuitas	129.492.050.655	130.996.501.002	(1.504.450.347)	(1,15)
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	129.872.804.971	131.157.110.892	(1.284.305.921)	(0,98)

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO Pusdiklat APU PPT untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp360.858.465, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional sebesar Rp29.596.075.546 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp29.235.217.081.

Terdapat Defisit dari Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp818.745.601 dan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp42.650.417 sehingga Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp776.095.184. Defisit-LO untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp30.011.312.265 dijelaskan pada Tabel 4.

Tabel 4
Laporan Operasional
untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)	
			Nilai	%
Kegiatan Operasional				
Pendapatan Operasional	360.858.465	161.213.194	199.645.271	123,84
Beban Operasional	29.596.075.546	27.746.580.621	1.849.494.925	6,67
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional	(29.235.217.081)	(27.585.367.427)	(1.649.849.654)	5,98
Kegiatan Non Operasional				
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	(818.745.601)	40.369.999	(859.115.600)	(2.128,10)
Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya	42.650.417	210.133.813	(167.483.396)	(79,70)
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	(776.095.184)	250.503.812	(1.026.598.996)	(409,81)
Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	(30.011.312.265)	(27.334.863.615)	(2.676.448.650)	9,79
Surplus/Defisit LO	(30.011.312.265)	(27.334.863.615)	(2.676.448.650)	9,79

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 adalah sebesar Rp130.996.501.002 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp30.011.312.265. Terdapat transaksi Koreksi yang Menambah Ekuitas sebesar Rp3.000.001 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp28.503.861.917 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp129.492.050.655. Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 dijelaskan pada Tabel 5.

Tabel 5
Laporan Perubahan Ekuitas
untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)	
			Nilai	%
Ekuitas Awal	130.996.501.002	100.483.260.004	30.513.240.998	30,37
Surplus/Defisit LO	(30.011.312.265)	(27.334.863.615)	(2.676.448.650)	9,79
Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	3.000.001	43.360.446	(40.360.445)	(93,08)
Transaksi Antar Entitas	28.503.861.917	57.804.744.167	(29.300.882.250)	(50,69)
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	(1.504.450.347)	30.513.240.998	(32.017.691.345)	(104,93)
Ekuitas Akhir	129.492.050.655	130.996.501.002	(1.504.450.347)	(1,15)

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terperinci atau analisis atas nilai suatu pos yang dijelaskan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

02



LAPORAN KEUANGAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023

PUSDIKLAT ANTI PENCUCIAN UANG
DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME
DEPOK, JAWA BARAT

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PUSDIKLAT APU PPT LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2023		%	31 Desember 2022
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN NEGARA	B.1				
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	446.720.880	-	241.713.193
JUMLAH PENDAPATAN		-	446.720.880	-	241.713.193
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.2.1	13.337.121.000	13.290.096.059	99,65	12.243.625.195
Belanja Barang	B.2.2	12.846.642.000	12.803.884.345	99,67	11.196.611.337
Belanja Modal	B.2.3	2.863.574.000	2.856.602.393	99,76	1.052.685.249
JUMLAH BELANJA		29.047.337.000	28.950.582.797	99,67	24.492.921.781

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN/LEMBAGA : PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN 078

ESELON I : PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN 01

SATUAN KERJA : PUSDIKLAT ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME 417654

Tgl Data : 06/05/24 6:26 AM

Tgl Cetak : 06/05/24 8:23 AM

Halaman : 1

lap_irra_face_satker_new



URAIAN	2023				2022			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
	2	4	5	6	7	8	9	10
1								
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	446,720,880	446,720,880	0	0	241,713,193	241,713,193	0
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	446,720,880	446,720,880	0	0	241,713,193	241,713,193	0
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	0	446,720,880	446,720,880	0	0	241,713,193	241,713,193	0
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	29,047,337,000	28,950,582,797	(96,754,203)	100	25,210,523,000	24,492,921,781	(717,601,219)	97
1. Belanja Pegawai	13,337,121,000	13,290,096,059	(47,024,941)	100	12,341,000,000	12,243,625,195	(97,374,805)	99
2. Belanja Barang	12,846,642,000	12,803,884,345	(42,757,655)	100	11,791,858,000	11,196,611,337	(595,246,663)	95
3. Belanja Modal	2,863,574,000	2,856,602,393	(6,971,607)	100	1,077,665,000	1,052,685,249	(24,979,751)	98
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN 078

ESELON I : PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN 01

SATUAN KERJA : PUSDIKLAT ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME 417654

Tgl Data : 06/05/24 6:26 AM
Tgl Cetak : 06/05/24 8:23 AM
Halaman : 2
lap_jra_face_satker_new

URAIAN	2023				2022			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
	2	4	5	6	7	8	9	10
1								
a. Dana Perimbangan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Transfer Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Insentif Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Dana Keistimewaan DIY	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	29,047,337,000	28,950,582,797	(96,754,203)	100	25,210,523,000	24,492,921,781	(717,601,219)	97
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

Bogor, 6 Mei 2024
Penanggung Jawab UAKPA
Kepala Pusdiklat APUPPT

AKHYAR EFFENDI
196802231993031001

II. NERACA

PUSDIKLAT APU PPT NERACA PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (dalam Rupiah)

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022
ASET			
Aset Lancar	C.1		
Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)	C.1.1	3.969.107	1.959.200
Piutang Bukan Pajak	C.1.2	28.765.713	170.092.253
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Persediaan	C.1.2	(28.765.713)	(170.092.253)
	C.1.3	670.276.867	568.575.571
Jumlah Aset Lancar		674.245.974	570.534.771
Aset Tetap	C.2		
Tanah	C.2.1	41.534.373.342	40.765.908.040
Peralatan dan Mesin	C.2.2	37.509.748.093	36.351.304.678
Gedung dan Bangunan	C.2.3	99.251.678.085	98.952.090.367
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2.4	235.602.000	235.602.000
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	79.329.600	79.329.600
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.6	99.017.550	99.017.550
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.7	(49.700.875.033)	(46.398.788.698)
Jumlah Aset Tetap		129.008.873.637	130.084.463.537
Aset Lainnya	C.3		
Aset Tak Berwujud	C.3.1	94.420.730	94.420.730
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.3.2	189.685.360	-
Aset Lain-Lain	C.3.3	27.472.500	608.389.040
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3.4	(121.893.230)	(200.697.186)
Jumlah Aset Lainnya		189.685.360	502.112.584
JUMLAH ASET		129.872.804.971	131.157.110.892
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	C.4		
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.4.1	380.754.316	160.609.890
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		380.754.316	160.609.890
JUMLAH KEWAJIBAN		380.754.316	160.609.890
EKUITAS			
Ekuitas	C.5		
JUMLAH EKUITAS		129.492.050.655	130.996.501.002
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		129.872.804.971	131.157.110.892

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (078) PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
UNIT ORGANISASI : (01) PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT
SATUAN KERJA : (417654) PUSDIKLAT ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

Tgl Data : 06/05/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 06/05/24 8:23 AM
Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	3,969,107	1,959,200	2,009,907	102.59
Piutang Bukan Pajak	28,765,713	170,092,253	(141,326,540)	(83.09)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(28,765,713)	(170,092,253)	141,326,540	(83.09)
Persediaan	670,276,867	568,575,571	101,701,296	17.89
JUMLAH ASET LANCAR	674,245,974	570,534,771	103,711,203	18.18
ASET TETAP				
Tanah	41,534,373,342	40,765,908,040	768,465,302	1.89
Peralatan dan Mesin	37,509,748,093	36,351,304,678	1,158,443,415	3.19
Gedung dan Bangunan	99,251,678,085	98,952,090,367	299,587,718	0.30
Jalan, Irigasi dan Jaringan	235,602,000	235,602,000	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	79,329,600	79,329,600	0	0.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	99,017,550	99,017,550	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(49,700,875,033)	(46,398,788,698)	(3,302,086,335)	7.12
JUMLAH ASET TETAP	129,008,873,637	130,084,463,537	(1,075,589,900)	(0.83)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	94,420,730	94,420,730	0	0.00
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	189,685,360	0	189,685,360	0.00
Aset Lain-lain	27,472,500	608,389,040	(580,916,540)	(95.48)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(121,893,230)	(200,697,186)	78,803,956	(39.27)
JUMLAH ASET LAINNYA	189,685,360	502,112,584	(312,427,224)	(62.22)
JUMLAH ASET	129,872,804,971	131,157,110,892	(1,284,305,921)	(0.98)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	380,754,316	160,609,890	220,144,426	137.07
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	380,754,316	160,609,890	220,144,426	137.07
JUMLAH KEWAJIBAN	380,754,316	160,609,890	220,144,426	137.07
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	129,492,050,655	130,996,501,002	(1,504,450,347)	(1.15)
JUMLAH EKUITAS	129,492,050,655	130,996,501,002	(1,504,450,347)	(1.15)
JUMLAH EKUITAS	129,492,050,655	130,996,501,002	(1,504,450,347)	(1.15)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	129,872,804,971	131,157,110,892	(1,284,305,921)	(0.98)

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (078) PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
UNIT ORGANISASI : (01) PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT
SATUAN KERJA : (417654) PUSDIKLAT ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

Tgl Data : 06/05/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 06/05/24 8:23 AM

Halaman : 2

lap_neraca_satker_komparatif

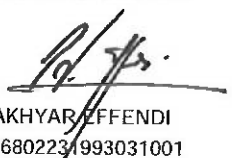
Keterangan :

FINAL

Bogor, 6 Mei 2024

Penanggung Jawab UAKPA

Kepala Pusdiklat APUPPT


AKHYAR EFFENDI

196802231993031001

III. LAPORAN OPERASIONAL

PUSDIKLAT APUPPT
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	360.858.465	161.213.194
JUMLAH PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK		360.858.465	161.213.194
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL		360.858.465	161.213.194
BEBAN OPERASIONAL	D.2		
Beban Pegawai	D.2.1	13.291.977.135	12.243.984.119
Beban Persediaan	D.2.2	756.905.263	630.177.127
Beban Barang dan Jasa	D.2.3	8.140.927.867	7.235.845.159
Beban Pemeliharaan	D.2.4	2.088.615.481	2.639.225.449
Beban Perjalanan Dinas	D.2.5	1.742.302.521	862.148.517
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.2.6	3.575.347.279	3.965.107.997
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.2.7	-	170.092.253
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		29.596.075.546	27.746.580.621
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(29.235.217.081)	(27.585.367.427)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR	D.3	(818.745.601)	40.369.999
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.3.1	43.211.998	40.369.999
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.3.2	861.957.599	-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	D.4	42.650.417	210.133.813
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.4.1	42.650.417	210.222.253
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.4.2	-	88.440
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.5	(776.095.184)	250.503.812
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(30.011.312.265)	(27.334.863.615)
SURPLUS/DEFISIT LO	D.6	(30.011.312.265)	(27.334.863.615)

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (078) PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (01) PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT

**SATUAN KERJA : (417654) PUSDIKLAT ANTI PENCUCIAN UANG DAN
PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME**

Tgl Data : 06/05/24 12:27 AM

Tgl Cetak : 06/05/24 8:15 AM

Halaman : 1

lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	360,858,465	161,213,194	199,645,271	123.839
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	360,858,465	161,213,194	199,645,271	123.839
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	360,858,465	161,213,194	199,645,271	123.839
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	13,291,977,135	12,243,984,119	1,047,993,016	8.559
Beban Persediaan	756,905,263	630,177,127	126,728,136	20.11
Beban Barang dan Jasa	8,140,927,867	7,235,845,159	905,082,708	12.508
Beban Pemeliharaan	2,088,615,481	2,639,225,449	(550,609,968)	(20.863)
Beban Perjalanan Dinas	1,742,302,521	862,148,517	880,154,004	102.088
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (078) PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (01) PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT

**SATUAN KERJA : (417654) PUSDIKLAT ANTI PENCUCIAN UANG DAN
PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME**

Tgl Data : 06/05/24 12:27 AM

Tgl Cetak : 06/05/24 8:15 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	3,575,347,279	3,965,107,997	(389,760,718)	(9.83)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	170,092,253	(170,092,253)	(100)
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	29,596,075,546	27,746,580,621	1,849,494,925	6.666
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(29,235,217,081)	(27,585,367,427)	(1,649,849,654)	5.981
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	(818,745,601)	40,369,999	(859,115,600)	(2,128.104)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	43,211,998	40,369,999	2,841,999	7.04
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	861,957,599	0	861,957,599	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	42,650,417	210,133,813	(167,483,396)	(79.703)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	42,650,417	210,222,253	(167,571,836)	(79.712)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	88,440	(88,440)	(100)
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(776,095,184)	250,503,812	(1,026,598,996)	(409.814)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(30,011,312,265)	(27,334,863,615)	(2,676,448,650)	9.791
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(30,011,312,265)	(27,334,863,615)	(2,676,448,650)	9.791

Keterangan :

FINAL

Bogor, 6 Mei 2024

Penanggung Jawab UAKPA

Kepala Pusdiklat APUPPT


AKHYAR EFFENDI
196802231993031001

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PUSDIKLAT APUPPT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
 (dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022
EKUITAS AWAL	E.1	130.996.501.002	100.483.260.004
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(30.011.312.265)	(27.334.863.615)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	3.000.001	43.360.446
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.3.1	3.000.001	43.360.446
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	28.503.861.917	57.804.744.167
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(1.504.450.347)	30.513.240.998
EKUITAS AKHIR	E.5	129.492.050.655	130.996.501.002

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (078) PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
 UNIT ORGANISASI : (01) PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
 WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT
 SATUAN KERJA : (417654) PUSDIKLAT ANTI PENCUCIAN UANG DAN
 PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

Tgl Data : 06/05/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 06/05/24 8:23 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	130,996,501,002	100,483,260,004	30,513,240,998	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(30,011,312,265)	(27,334,863,615)	(2,676,448,650)	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	3,000,001	43,360,446	(40,360,445)	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	3,000,001	43,360,446	(40,360,445)	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	28,503,861,917	57,804,744,167	(29,300,882,250)	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(1,504,450,347)	30,513,240,998	(32,017,691,345)	-
EKUITAS AKHIR	129,492,050,655	130,996,501,002	(1,504,450,347)	-

Keterangan :

FINAL

Bogor, 6 Mei 2024

Penanggung Jawab UAKPA

Kepala Pusdiklat APUPPT

AKHYAR EFFENDI

196802231993031001

03



**CATATAN ATAS
LAPORAN KEUANGAN**
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023

PUSDIKLAT ANTI PENCUCIAN UANG
DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME
DEPOK, JAWA BARAT

Catatan Atas Laporan Keuangan

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum

A.1 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang APBN Tahun 2023;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga;

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2019 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.05/2021 tentang Sistem Akuntansi Hibah;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2020 tentang Sistem Penerimaan Negara secara Elektronik;
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.06/2023 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun Anggaran 2023;
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan yang Belum Diselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran;
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;
31. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 128/KMK.06/2015 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
32. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 240/KM.6/2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat;
33. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 241/KM.6/2022 tentang Perubahan Kedua Belas

- atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
34. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 266/KM.6/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 Tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
35. Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-331/PB/2021 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar dan KEP-291/PB/2022 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar; dan
36. Peraturan PPATK Nomor 22 Tahun 2021 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif sampai dengan 0,00% (Nol Persen) atas Jenis PNBP Penyelenggaraan Program Pelatihan di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT untuk Tingkat Lanjutan bagi Pihak Pelapor, serta Penggunaan Sarana dan Prasarana Sesuai Tugas dan Fungsi.

*Profil dan Kebijakan
Pusdiklat APU PPT*

A.2 PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Pusdiklat APU PPT) merupakan satuan kerja setingkat Eselon II yang dibentuk oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPATK sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPATK dan Peraturan Kepala PPATK Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala PPATK Nomor 3 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPATK sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala PPATK Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPATK. Pusdiklat APU PPT adalah unsur penunjang tugas dan fungsi PPATK yang bertanggung jawab kepada Kepala PPATK. Peran yang dilakukan Pusdiklat APU PPT, antara lain melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Berdasarkan Pasal 86 Peraturan Kepala PPATK Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPATK, Pusdiklat APU PPT mempunyai tugas melaksanakan pelatihan di bidang anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Pusdiklat APU PPT sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis Pusdiklat APU PPT Tahun 2020 s.d. 2024, sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kapabilitas pemangku kepentingan dan masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme; dan

- b. Meningkatnya kualitas pendidikan dan pelatihan PPATK.

Keberhasilan sasaran strategis Pusdiklat APU PPT diukur berdasarkan indikator kinerja berupa indeks efektivitas pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Indikator kinerja tersebut, sebagai berikut:

- a. Indeks efektivitas diklat anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
- b. Indeks kualitas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; dan
- c. Indeks kepuasan layanan manajemen internal Pusdiklat APU PPT.

Pendekatan
Penyusunan
Laporan Keuangan

A.3 PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Tingkat Satuan Kerja (Satker) merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Satker Pusdiklat APU PPT (417654) di bawah Bagian Anggaran PPATK (BA 078). Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. Laporan keuangan ini dihasilkan melalui aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang direkonsiliasikan dengan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) melalui aplikasi *Monitoring SAKTI* (MonSAKTI) sebagai dasar penyusunan laporan keuangan (LK). Pelaksanaan rekonsiliasi eksternal dilakukan menggunakan aplikasi MonSAKTI. Rekonsiliasi eksternal dilakukan dengan membandingkan data anggaran, realisasi, dan kas pada SPAN dengan SAKTI melalui Aplikasi MonSAKTI.

Aplikasi SAKTI digunakan di PPATK pada Satker 417654 dan Satker 453374 untuk melakukan pencatatan secara transaksional berbasis akrual berdasarkan dokumen yang muncul pada saat transaksi dilakukan. Pada aplikasi SAKTI, Modul Akuntansi dan Pelaporan menggantikan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dalam penyusunan laporan keuangan, Modul Aset Tetap menggantikan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN), dan Modul Persediaan menggantikan aplikasi Persediaan. Perubahan mendasar pada aplikasi SAKTI dalam rangka penyusunan laporan keuangan, yaitu terdapat *Open-Closing Period* untuk melakukan buka-tutup periode buku saat periode transaksi dinyatakan berakhir. Pada saat Modul Akuntansi dan Pelaporan melakukan *closing period*, maka modul lainnya secara otomatis melakukan "tutup buku" pada periode berkenaan. Periode akuntansi pada aplikasi SAKTI terdiri dari 12 periode normal (Januari-Desember), periode *unaudited*, dan periode *audited*.

Basis Akuntansi

A.4 BASIS AKUNTANSI

Pusdiklat APU PPT menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.5 DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pusdiklat APU PPT dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.6 KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 (*audited*) telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan PMK mengenai Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang digunakan oleh satuan kerja Pusdiklat APU PPT berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pusdiklat APU PPT diuraikan, sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

1. Pendapatan-LRA

- a. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah;
- b. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN);

- c. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- d. Pendapatan-LRA dijelaskan menurut klasifikasi sumber pendapatan; dan
- e. Pendapatan-LRA di Pusdiklat APU PPT berasal dari Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pendapatan-LO

2. Pendapatan-LO

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali;
- b. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Pusdiklat APU PPT, yaitu:
 - 1) Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan;
 - 2) Pendapatan Denda akibat perjanjian atau peraturan yang diakui saat menjadi hak entitas, yaitu saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan; dan
 - 3) Pendapatan Anggaran Lain-lain, diakui pada saat ditetapkan surat keputusan timbulnya hak yang berasal dari pengembalian kembali belanja tahun anggaran sebelumnya yang diakui saat diterima oleh entitas.
- c. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- d. Pendapatan dijelaskan menurut klasifikasi sumber pendapatan;
- e. Pendapatan-LO di Pusdiklat APU PPT berasal dari PNBP;
- f. Pendapatan PNBP-LO diukur dengan cara sebagai berikut:
 - 1) Jumlah yang diterima dari wajib bayar atas pendapatan bukan pajak-LO yang diakui berdasarkan aliran uang masuk yang diterima di KUN; dan
 - 2) Jumlah yang menjadi hak entitas atas pendapatan bukan pajak yang berasal dari kontrak kerja sama dalam rangka perikatan.

Belanja

3. Belanja

- a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah;
- b. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN;
- c. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran yang berasal dari uang persediaan, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas

pengeluaran tersebut disahkan oleh KPPN; dan

- d. Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Beban

4. Beban

- a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban;
- b. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa; dan
- c. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam CaLK.

Aset

5. Aset

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pusdiklat APU PPT sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya;
- b. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah; dan
- c. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

5.1. Aset Lancar

- a. Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan;
- b. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas dijelaskan dalam neraca dengan menggunakan nilai nominal rupiah. Kas dalam bentuk valuta asing dijelaskan dalam neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca;
- c. Setara Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo uang muka kerja berupa uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Kementerian Negara/Lembaga/satuan kerja;
- d. Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila

- telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 2) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal;
 - 3) Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- e. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
- 1) harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - 2) harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; dan
 - 3) harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Piutang Jangka Panjang

5.2 Piutang Jangka Panjang

- a. Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan;
- b. Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran;
- c. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh BPK kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah; dan
- d. Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk menuntut

penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

*Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih*

5.3 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- a. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah;
- b. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Penggolongan Kualitas Piutang dijelaskan dalam Tabel 6.

Tabel 6
Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,50%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

Aset Tetap

5.4 Aset Tetap

- a. Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dan disajikan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar;
- b. Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - 1) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - 2) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah); dan
 - 3) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum

kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- c. Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap Aset Tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada Tahun 2017 dan 2020. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah;
- d. Nilai Aset Tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai Aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya, maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya, maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan;
- e. Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang semakin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang, atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya; dan
- f. Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Negara.

Penyusutan Aset Tetap

5.5 Penyusutan Aset Tetap

- a. Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017;
- b. Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - 1) Tanah;
 - 2) Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - 3) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- c. Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu;
- d. Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat; dan
- e. Masa manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 266/KM.6/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 Tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Tabel masa manfaat dijelaskan Tabel 7.

Tabel 7
Penggolongan Masa Manfaat Kelompok Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Alat Tetap Lainnya	4 tahun

Aset Lainnya

5.5 Aset Lainnya

- a. Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya;
- b. ATB merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. ATB dijelaskan sebesar nilai tercatat neto, yaitu sebesar harga perolehan setelah

dikurangi akumulasi amortisasi. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil, sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Masa Manfaat ATB ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 240/KM.6/2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Tabel masa manfaat dijelaskan dalam Tabel 8 sebagai berikut:

Tabel 8
Penggolongan Masa Manfaat Kelompok Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat
<i>Software</i>	4 tahun
<i>Franchise</i>	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 tahun

- c. Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

6. Kewajiban

- a. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah;
- b. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - 1) Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - 2) Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- c. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

7. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas dijelaskan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2023 Nomor: DIPA-078.01.2.417654/2023 tanggal 30 November 2022, alokasi anggaran Pusdiklat APU PPT Tahun 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp29.047.337.000. Selama periode berjalan, satker Pusdiklat APU PPT telah mengadakan revisi DIPA sebanyak sebelas kali dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan urgensi kebutuhan dan situasi, serta kondisi pada saat pelaksanaan, antara lain Penyesuaian Rencana Penarikan Dana, *Automatic Adjustment* (blokir dan buka blokir), serta pergeseran anggaran ke satker PPATK dikarenakan urgensi kebutuhan kegiatan, pemenuhan kebutuhan belanja pegawai, dan penyelesaian pagu minus. Perubahan DIPA Pusdiklat APU PPT Tahun 2023 dijelaskan dalam Tabel 9.

Tabel 9
Perubahan DIPA Pusdiklat APU PPT Tahun 2023
(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2023	
		Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan			
1	PNBP	-	-
	Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja			
1	Belanja Pegawai	11.895.000.000	13.337.121.000
2	Belanja Barang	13.467.973.000	12.846.642.000
3	Belanja Modal	7.298.537.000	2.863.574.000
	Jumlah Belanja	32.661.510.000	29.047.337.000

DIPA Pusdiklat APU PPT berdasarkan program Tahun 2023 dijelaskan dalam Tabel 10.

Tabel 10
DIPA Pusdiklat APU PPT Berdasarkan Program Tahun 2023
(dalam Rupiah)

Kode	Uraian	Anggaran
BE	Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme	3.621.906.000
3365	Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang PPATK	3.621.906.000
WA	Program Dukungan Manajemen	25.425.431.000
3375	Pengelolaan Perencanaan dan Keuangan PPATK	13.402.830.000
3376	Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Ketatalaksanaan Ppatk	249.547.000
3377	Penyelenggaraan Ketatausahaan, Kerumahtanggaan, dan Perlengkapan PPATK	11.773.054.000
	Jumlah	29.047.337.000

Pendapatan
Rp446.720.880

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp446.720.880 dan Rp241.713.193. Rincian perbandingan realisasi pendapatan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 dijelaskan Tabel 11.

Tabel 11
Rincian Perbandingan Realisasi Pendapatan
untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(dalam Rupiah)

Kode	Uraian	Realisasi		Kenalkan (Penurunan)	
		2023	2022	Rp	%
42	Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak				
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha				
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	43.211.998	40.369.999	2.841.999	7,04
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	72.000.000	-	72.000.000	100,00
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	115.211.998	40.369.999	74.841.999	185,39
4254	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi				
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	288.800.000	160.760.000	128.040.000	79,65
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4254	288.800.000	160.760.000	128.040.000	79,65
4258	Pendapatan Denda				
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	58.465	453.194	(394.729)	(87,10)
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4258	58.465	453.194	(394.729)	(87,10)
4259	Pendapatan lain-lain				
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	12	130.000	(129.988)	(99,99)
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	42.650.405	40.000.000	2.650.405	6,63
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	42.650.417	40.130.000	2.520.417	6,63
	JUMLAH PENDAPATAN	446.720.880	241.713.193	205.007.687	84,81

Realisasi Pendapatan untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 mengalami peningkatan sebesar 84,81% dibandingkan tahun 2022 dikarenakan peningkatan Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi dan Pendapatan Layanan Pendidikan/Pelatihan. Rincian Realisasi Pendapatan dijelaskan Tabel 12.

Tabel 12
Rincian Realisasi Pendapatan
untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023
(dalam Rupiah)

Uraian	Nilai (Rp)
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha	
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	43.211.998
Lelang material bongkaran bangunan kantor untuk pembangunan studio multimedia	5.081.000
Lelang material bongkaran bangunan kantor dikarenakan rusak berat	16.000.999
Lelang peralatan dan mesin dikarenakan kondisi rusak berat	22.129.999
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	72.000.000
Penggunaan kamar asrama <i>Twin Bed</i> Pelatihan PT Bank Sahabat Sampoerna 8 s.d. 9 Juni 2023	4.800.000
Penggunaan kamar asrama <i>Twin Bed</i> Pelatihan PT Pegadaian 2 s.d. 4 Oktober 2023	27.200.000
Penggunaan kamar asrama <i>Twin Bed</i> Pelatihan PT Bank Syariah Indonesia sesuai PKS Nomor NK-196/1.02/PPATK/10/2023	40.000.000

Uraian	Nilai (Rp)
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	
Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	288.800.000
Pembayaran Pelatihan di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT Tingkat Lanjutan Bagi Pegawai PT Bank Sahabat Sampoerna	59.280.000
Pembayaran Pelatihan PT Pegadaian 2 s.d. 4 Oktober 2023	77.520.000
Pembayaran Pelatihan PT Bank Syariah Indonesia sesuai PKS Nomor NK-196/1.02/PPATK/10/2023	152.000.000
Pendapatan Denda	58.465
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah atas Pengadaan Horizontal Filling Cabinet berdasarkan SPM Nomor 00528A tanggal 14 Desember 2023	58.465
Pendapatan Lain-Lain	
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	12
Pembayaran Kekurangan Gaji Pegawai Bulan Desember 2022 untuk 3 orang	12
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	42.650.405
Pembayaran Termin Pertama - Pengembalian Kelebihan Pembayaran PT. TC atas Pengadaan Pengecatan Pusdiklat APUPPT TA 2022	8.732.035
Pelunasan Piutang Negara CV. TPA atas Pemeliharaan Dak Asrama TA 2021	33.918.370
Jumlah Pendapatan	446.720.880

Belanja (Neto)
Rp28.950.582.797

B.2 Belanja

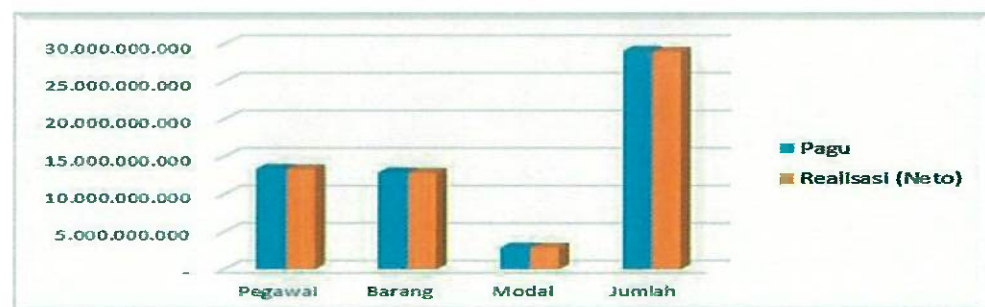
Realisasi Belanja untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp28.950.582.797 dan Rp24.492.921.781. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja (Neto) untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 dijelaskan dalam Tabel 13.

Tabel 13
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja (Neto)
untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023
(dalam Rupiah)

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi (Neto)	%
Pegawai	13.337.121.000	13.290.096.059	99,65
Barang	12.846.642.000	12.803.884.345	99,67
Modal	2.863.574.000	2.856.602.393	99,76
Jumlah	29.047.337.000	28.950.582.797	99,67

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja (Neto) untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2023 dapat dilihat dalam grafik yang dijelaskan dalam Gambar 1.

Gambar 1
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja (Neto)
untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2023
(dalam Rupiah)



Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 mengalami peningkatan menjadi sebesar 18,20% jika dibandingkan dengan 2022 dikarenakan peningkatan signifikan pada Belanja Modal, yaitu pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin dan Belanja Gedung dan Bangunan. Perbandingan Realisasi Belanja (Neto) untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 dijelaskan dalam Tabel 14.

Tabel 14
Perbandingan Realisasi Belanja (Neto)
untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(dalam Rupiah)

Jenis Belanja	Realisasi Anggaran (Neto)		Kenaikan (Penurunan)	
	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Rp	%
Pegawai	13.290.096.059	12.243.625.195	1.046.470.864	8,55
Barang	12.803.884.345	11.196.611.337	1.607.273.008	14,35
Modal	2.856.602.393	1.052.685.249	1.803.917.144	171,36
Jumlah	28.950.582.797	24.492.921.781	4.457.661.016	18,20

Belanja Pegawai (Netto)
Rp13.290.096.059

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi belanja pegawai Pusdiklat APU PPT untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp13.290.096.059 dan Rp12.243.625.195. Terjadi peningkatan pada realisasi belanja pegawai dibandingkan tahun anggaran yang lalu sebesar 8,55% dikarenakan peningkatan signifikan pada Belanja Gaji PPPK dan Belanja Pegawai Tunjangan Khusus PPPK atas pengadaan PPPK, serta penurunan pada Belanja Uang Honor Tetap atas Penghasilan Induk PPNP 51 dikarenakan terdapat tujuh orang PPNP 51 yang berhenti bekerja.

Selain itu, terdapat pengembalian belanja pegawai sebesar Rp5.404.151, terdiri dari:

- Belanja Pembulatan Gaji PNS sebesar Rp313 dikarenakan terdapat pembayaran kekurangan gaji PNS atas perubahan status kepegawaian (peningkatan gaji berkala, pangkat, dan peralihan menjadi jabatan fungsional);
- Belanja Tunjangan Umum PNS sebesar Rp2.960.000 dikarenakan terdapat pembayaran kekurangan gaji dan gaji ke-13 pejabat fungsional atas peralihan jabatan menjadi jabatan fungsional;
- Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK sebesar Rp2.443.838 dikarenakan kelebihan pembayaran tunjangan khusus satu orang PPPK atas tunjangan pajak yang sebelumnya ditanggung oleh negara, tetapi seharusnya tidak ditanggung oleh negara.

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai (Neto) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 dijelaskan dalam Tabel 15.

Tabel 15
Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai
untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(dalam Rupiah)

Kode Akun	Nama Akun	Realisasi		Kenaikan (Penurunan)	
		2023	2022	Rp	%
	Belanja Bruto				
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1.352.189.900	1.355.991.520	(3.801.620)	(0,28)
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	17.347	21.253	(3.906)	(18,38)
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	93.954.060	93.283.610	670.450	0,72
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	29.057.476	27.544.074	1.513.402	5,49
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	63.140.000	82.400.000	(19.260.000)	(23,37)
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	178.900.000	169.484.000	9.416.000	5,56
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	7.473.390	8.715.008	(1.241.618)	(14,25)
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	81.979.440	81.110.400	869.040	1,07
511129	Belanja Uang Makan PNS	220.519.000	257.244.000	(36.725.000)	(14,28)
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	29.740.000	30.990.000	(1.250.000)	(4,03)
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	194.682.500	-	194.682.500	100,00
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2.490	-	2.490	100,00
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	16.501.750	-	16.501.750	100,00
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	3.597.000	-	3.597.000	100,00
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	32.145.000	-	32.145.000	100,00
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	13.252.860	-	13.252.860	100,00
511628	Belanja Uang Makan PPPK	44.997.000	-	44.997.000	100,00
512111	Belanja Uang Honor Tetap	1.203.533.135	1.527.612.105	(324.078.970)	(21,21)
512211	Belanja Uang Lembur	83.060.000	95.270.000	(12.210.000)	(12,82)
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	4.254.000	-	4.254.000	100,00
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	8.707.559.529	8.523.607.129	183.952.400	2,16
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/ Kegiatan/Kinerja PPPK	934.944.333	-	934.944.333	100,00
	Jumlah Belanja Bruto	13.295.500.210	12.253.273.099	1.042.227.111	8,51
	Pengembalian Belanja Pegawai	5.404.151	9.647.904	(4.243.753)	(43,99)
	Total Belanja Pegawai Netto	13.290.096.059	12.243.625.195	1.046.470.864	8,55

Peningkatan pada beberapa akun Belanja Pegawai tersebut disebabkan, sebagai berikut:

- Peningkatan Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS dikarenakan terdapat PNS yang memiliki suami/istri mengalami perubahan status kepegawaian (peningkatan gaji berkala dan pangkat);
- Peningkatan Belanja Tunjangan Anak PNS dikarenakan terdapat PNS mengalami perubahan status kepegawaian (memiliki anak, peningkatan gaji berkala dan pangkat);
- Peningkatan Belanja Tunjangan Fungsional PNS dikarenakan terdapat PNS yg beralih menjadi pejabat fungsional;
- Peningkatan Belanja Tunjangan Beras PNS dikarenakan terdapat PNS yang mempunyai penambahan anggota keluarga (memiliki istri atau anak);
- Peningkatan Belanja Gaji Pokok PPPK dikarenakan terdapat pengangkatan PPPK;
- Peningkatan Belanja Pembulatan Gaji PPPK dikarenakan terdapat pengangkatan PPPK;
- Peningkatan Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK dikarenakan terdapat pengangkatan PPPK (sudah menikah);
- Peningkatan Belanja Tunjangan Anak PPPK dikarenakan terdapat pengangkatan PPPK (sudah memiliki anak);
- Peningkatan Belanja Tunjangan Fungsional PPPK dikarenakan terdapat pengangkatan PPPK;

- j. Peningkatan Belanja Tunjangan Beras PPPK dikarenakan terdapat pengangkatan PPPK;
- k. Peningkatan Belanja Uang Makan PPPK dikarenakan terdapat pengangkatan PPPK;
- l. Peningkatan Belanja Uang Lembur PPPK dikarenakan terdapat kegiatan lembur PPPK;
- m. Peningkatan Belanja Pegawai Tunjangan Khusus dikarenakan terdapat PNS mengalami perubahan status kepegawaian (peningkatan pangkat dan golongan) dan terdapat PNS yang beralih menjadi jabatan fungsional; dan
- n. Peningkatan Belanja Pegawai Tunjangan Khusus PPPK dikarenakan terdapat pengangkatan PPPK.

Terdapat penurunan pada beberapa akun Belanja Pegawai disebabkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Penurunan Belanja Gaji Pokok PNS dikarenakan terdapat penurunan jumlah PNS (mutasi satu PNS ke satker PPAATK) dan penurunan PNS yang mengalami perubahan status kepegawaian PNS (peningkatan gaji berkala dan pangkat) lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya;
- b. Penurunan Belanja Pembulatan Gaji PNS dikarenakan terdapat perubahan jumlah PNS dan pegawai yang mengalami perubahan status kepegawaian PNS (peningkatan gaji berkala dan pangkat) berdasarkan hasil perhitungan aplikasi GPP saat memproses pembayaran;
- c. Penurunan Belanja Tunjangan Struktural PNS dikarenakan terdapat pejabat struktural yang mutasi ke satker PPAATK;
- d. Penurunan Belanja Tunjangan PPh PNS dikarenakan terdapat penurunan jumlah PNS dan pegawai yang mengalami perubahan status kepegawaian PNS (peningkatan gaji berkala dan pangkat);
- e. Penurunan Belanja Uang Makan PNS dikarenakan terdapat peningkatan kegiatan maupun rapat secara tatap muka sehingga pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas dengan uang harian, tidak memperoleh uang makan;
- f. Penurunan Belanja Tunjangan Umum PNS dikarenakan terdapat PNS (pelaksana) yang mengalami perubahan status kepegawaian PNS (peningkatan pangkat golongan);
- g. Penurunan Belanja Uang Honor Tetap dikarenakan terdapat penurunan jumlah PPNNP 51 (Dokter, Tenaga Medis, dan Pengelola Dokumentasi); dan
- h. Penurunan Belanja Uang Lembur dikarenakan terdapat penurunan kegiatan lembur PNS dan PPNNP 51 (Teknisi dan Pengelola Dokumentasi).

Belanja Barang (Neto)
Rp12.803.884.345

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi belanja barang (neto) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp12.803.884.345 dan Rp11.196.611.337. Terjadi peningkatan pada realisasi belanja barang dibandingkan tahun anggaran yang lalu sebesar 14,35%. Perbandingan realisasi belanja barang tahun 2023 dan 2022 dijelaskan dalam Tabel 16.

Tabel 16
Perbandingan Realisasi Belanja Barang
untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(dalam Rupiah)

Kode Akun	Nama Akun	Realisasi		Kenaikan (Penurunan)	
		2023	2022	Rp	%
	Belanja Barang Bruto				
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	3.407.181.439	3.181.258.902	225.922.537	7,10
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	5.736.206	4.225.420	1.510.786	35,75
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	13.080.000	8.502.000	4.578.000	53,85
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	336.352.032	246.581.000	89.771.032	36,41
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	192.000.267	(192.000.267)	(100,00)
521211	Belanja Bahan	835.575.414	734.856.007	100.719.407	13,71
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	335.000.000	264.000.000	71.000.000	26,89
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	39.274.351	25.181.000	14.093.351	55,97
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	2.666.000	(2.666.000)	(100,00)
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	867.593.105	509.739.011	357.854.094	70,20
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	74.001.424	29.280.043	44.721.381	152,74
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	-	56.839.500	(56.839.500)	(100,00)
522111	Belanja Langganan Listrik	1.968.421.323	1.575.370.598	393.050.725	24,95
522112	Belanja Langganan Telepon	9.868.080	9.268.988	599.092	6,46
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	213.915.419	175.235.557	38.679.862	22,07
522141	Belanja Sewa	335.365.170	303.030.636	32.334.534	10,67
522151	Belanja Jasa Profesi	58.850.000	75.400.000	(16.550.000)	(21,95)
522191	Belanja Jasa Lainnya	558.210.550	275.942.500	282.268.050	102,29
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	-	75.241.400	(75.241.400)	(100,00)
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	710.815.750	1.678.328.043	(967.512.293)	(57,65)
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	81.444.210	(81.444.210)	(100,00)
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.299.048.561	827.374.738	471.673.823	57,01
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	-	1.111.000	(1.111.000)	(100,00)
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	187.000	1.715.700	(1.528.700)	(89,10)
524111	Belanja Perjalanan Biasa	1.074.284.820	528.799.321	545.485.499	103,16
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	450.000	40.044	409.956	1.023,76
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	668.511.701	333.309.152	335.202.549	100,57
	Jumlah Belanja Barang Bruto	12.811.722.345	11.196.741.037	1.614.981.308	14,42
	Pengembalian Belanja	7.838.000	129.700	7.708.300	5.943,18
	Total Belanja Barang Netto	12.803.884.345	11.196.611.337	1.607.273.008	14,35

Terdapat pengembalian belanja barang sebesar Rp7.838.000 dikarenakan sebagai berikut:

- Belanja Keperluan Perkantoran sebesar Rp2.412.500 dikarenakan pengembalian belanja melalui KKP atas dana yang masuk dalam periode berikutnya (Rp137.500) dan sebesar Rp2.275.000 karena pengembalian penghasilan PPNPN 52 atas pemberhentian kerja satu orang PPNPN 52 (Pramubakti);
- Belanja Barang Operasional Lainnya sebesar Rp57.700 dikarenakan Rp5.000 atas kelebihan biaya kirim belanja menggunakan KKP dan sebesar Rp52.500 karena pengembalian limit KKP atas transaksi yang melewati periode tagihan bulanan dikarenakan pembatalan transaksi atau barang diterima tidak lengkap ataupun penyesuaian biaya kirim;

- c. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp4.423.800 dikarenakan pembatalan transaksi melalui KKP sebesar Rp2.908.700 dan sebesar Rp1.515.100 karena pengembalian limit KKP atas transaksi yang melewati periode tagihan bulanan dikarenakan pembatalan transaksi atau barang diterima tidak lengkap ataupun penyesuaian biaya kirim; dan
- d. Belanja Perjalanan Biasa sebesar Rp944.000 dikarenakan kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas peserta pelatihan dan pegawai.

Selain itu, terdapat peningkatan realisasi Belanja Barang tahun 2023 disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Peningkatan Belanja Keperluan Perkantoran dikarenakan terdapat pembayaran pengadaan pakaian dinas ASN (KORPRI) dan Pakaian Dinas Tenaga Penunjang; peningkatan jumlah PPNP 52 (Pramubakti dan Pengemudi); peningkatan pembelian air minum, kopi, susu, gula, dan teh dikarenakan peningkatan jumlah pegawai, kegiatan pelatihan, dan rapat di lingkungan Pusdiklat APU PPT; pengisian *etoli*; pembelian *microphone*, *box container*, pembelian jamuan tamu/pimpinan/Eselon I, linen kantor (taplak meja makan dan sarung kursi), pemenuhan asrama (gantungan baju, alas duduk, kain sofa asrama, dan sandal asrama), pembelian *bartender set stainless*, mesin penggiling kopi, *electric cooker*, dan trolley; *laundry* perlengkapan asrama dan biaya materai KKP; serta pembelian kebutuhan operasional klinik; pembelian lampu *emergency*, set pisau dapur, papan; timbangan *digital*, jam dinding, kotak kunci;
- b. Peningkatan Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat dikarenakan terdapat peningkatan pengiriman surat dinas terkait pelatihan dan perkantoran;
- c. Peningkatan Belanja Honor Operasional Satuan Kerja dikarenakan terdapat pergantian Bendahara Pengeluaran dengan status kepegawaian sebagai Pelaksana (bukan jabatan fungsional) sehingga honor pembayaran Bendahara Pengeluaran dibayarkan *full* sesuai SBM;
- d. Peningkatan Belanja Barang Operasional Lainnya dikarenakan terdapat peningkatan pembayaran lembur PPNP atas peningkatan kegiatan pelatihan dan kegiatan di Pusdiklat APU PPT, pembelian keperluan standar pelayanan publik (tempat nama *stainless*, tiang antrian, hiasan dinding, hiasan bunga, peralatan makan, kursi dan meja makan, peralatan olahraga, karpet, mukena mushalla, dan rak tanaman), dan pembayaran pengangkutan sampah dan pengelolaan limbah medis;
- e. Peningkatan Belanja Bahan dikarenakan terdapat peningkatan pembayaran pembelian konsumsi rapat, pelatihan, dan seminar, pembuatan plakat, pembelian alat peraga pelatihan (*spanduk*, *banner*, dan kertas sertifikat pelatihan), amplop kalender, dan pembelian bendera Komite TPPU;

- f. Peningkatan Belanja Honor *Output* Kegiatan dikarenakan terdapat peningkatan pembayaran honorarium narasumber/penceramah dan pengajar pelatihan, serta pembayaran Honor Tim Penyusun Kurikulum, Modul, Bahan Ajar Program Pelatihan, dan Media Rekaman Pembelajaran;
- g. Peningkatan Belanja Barang Non Operasional Lainnya dikarenakan terdapat peningkatan pembayaran *laundry* pakaian peserta pelatihan, pengadaan bendera Merah Putih, pengadaan umbul-umbul ASEAN dan HUT PPATK, pembelian tiang bendera patakan set, serta pembelian obat kebutuhan peserta pelatihan;
- h. Peningkatan Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi dikarenakan terdapat peningkatan pembayaran diklat *kit*, pembelian perlengkapan pelatihan, *souvenir* diklat, ATK, *toner printer*, kalender, plakat, alat rumah tangga dan bahan kebersihan, amenitis asrama, materai, seminar *kit*, *box* arsip, buku saku UU PP TPPU dan TPPT, buku agenda dan *tote bag*, Modul Pelatihan, serta *Stopmap*;
- i. Peningkatan Belanja Barang Persediaan Lainnya dikarenakan terdapat pengadaan pembayaran persediaan obat-obatan klinik dan masker;
- j. Peningkatan Belanja Langganan Listrik dikarenakan terdapat peningkatan pembayaran atas penggunaan listrik Gedung kantor dan kamar asrama atas peningkatan kegiatan pelatihan tatap muka, rapat, dan kegiatan di Pusdiklat APU PPT;
- k. Peningkatan Belanja Langganan Telepon dikarenakan terdapat peningkatan penggunaan telepon dan penambahan biaya telepon pasca bayar untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pelatihan, bagian Humas, Rumah Tangga, dan bagian pos pengamanan;
- l. Peningkatan Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya dikarenakan terdapat pembayaran Langganan Lisensi *Software* Manajemen Perkantoran (*cloud storage google drive*, *template* lisensi unit kegiatan pelatihan, aplikasi absensi pegawai Gedung Arsip Ciloto, aplikasi Canva, aplikasi *Articulate 360*, dan *software* Heyzine), langganan internet Pusdiklat APU PPT dan Gedung Arsip Ciloto, lisensi aplikasi *Video Conference*, langganan *filmora*, dan langganan WPS Pro;
- m. Peningkatan Belanja Sewa dikarenakan terdapat pembayaran kelebihan pemakaian sewa mesin *fotocopy* dan *printer* warna, terdapat penambahan sewa kendaraan operasional roda empat, terdapat sewa mini *garden* dalam rangka kegiatan seminar, terdapat sewa sofa dan meja kaca dalam rangka kegiatan seminar, sewa baju adat dalam rangka upacara HUT RI dan MC kegiatan seminar, sewa *genset* dalam rangka kegiatan seminar dan *joint training*, sewa LED vidiotron dalam rangka *joint training*, dan sewa AC *standing*;
- n. Peningkatan Jasa Lainnya dikarenakan terdapat pembayaran jasa desain kalender, jasa pengangkutan barang dari/ke Pusdiklat APU PPT, Gedung Arsip Ciloto, dan PPATK, jasa penari kegiatan seminar, jasa pembuatan *company profile*, jasa

pembuatan media/vidio pembelajaran, jasa pembuatan konten *e-Learning*, jasa pengiriman diklat *kit*, dan jasa Pembuatan *Teaser* Program Pelatihan;

- o. Peningkatan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin dikarenakan terdapat peningkatan pembayaran pembelian bahan bakar kendaraan dinas roda empat Eselon II, kendaraan dinas operasional roda dua, dan kendaraan roda empat operasional, pembelian penggantian suku cadang dan perbaikan kendaraan dinas roda empat Eselon II, biaya perawatan kendaraan dinas operasional roda dua dan roda empat, perawatan salon mobil kendaraan dinas Eselon II, pembelian *vaccum cleaner* mobil, pembelian kamera belakang mobil kendaraan dinas Eselon II, pembayaran perpanjangan pajak STNK kendaraan dinas operasional roda empat, pembelian kamera mundur kendaraan dinas Eselon II, *bracket* dan *Box Shad*, Pemeliharaan Trafo dan Panel Kelistrikan, Pemeliharaan STP dan Pompa-pompa, Pemeliharaan AC *Presisi* dan AC *Split*, pembelian Mekanikal Elektrikal Lainnya (pembelian suku cadang alat fitnes, kabel dan komponen kelistrikan, baterai *laptop* dan kamera, kabel HDMI, *freon*, pembelian suku cadang dan pemeliharaan mesin kopi), perbaikan Mesin Presensi *Fingerprint*, perbaikan TV, isi ulang APAR, pembelian suku cadang dan pemeliharaan Elevator, pemeliharaan dan pembelian suku cadang *genset*, Pengadaan Bahan Bakar Minyak *Genset*, pembelian bor dan mesin gerindra, penggantian Sensor Temperatur *Chiller*, pemeliharaan sistem tata udara, penggantian terminasi kubikal kelistrikan, penggantian pompa *blower* STP, penggantian pompa udara STP, penggantian *Power Module* dan *Static by Pass Switch* UPS, biaya pembuatan instalasi pipa solar di Gedung Arsip Ciloto, pemeliharaan dan pembelian suku cadang *Fire Alarm* dan *Fire Hydrant*, serta Perbaikan Mesin Pompa Sampit;
- p. Peningkatan Belanja Perjalanan Dinas Biasa dikarenakan terdapat peningkatan perjalanan dinas kegiatan pelatihan dan rapat secara tatap muka;
- q. Peningkatan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dikarenakan terdapat pembayaran biaya transportasi lokal kegiatan rapat; dan
- r. Peningkatan Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Luar Kota dikarenakan terdapat peningkatan kegiatan pelatihan di luar kota (pelatihan penanganan TPPU bagi Apgakum di Medan dan bagi Penyidik di Bali) dan terdapat kegiatan FGD pengembangan *E-Learning* dan FGD Evaluasi Pelatihan di Bogor (pembayaran biaya akomodasi hotel, biaya transportasi, dan uang harian (peserta, pengajar, dan panitia).

Namun, terdapat beberapa realisasi Belanja Barang tahun 2023 yang mengalami penurunan, antara lain disebabkan hal-hal, sebagai berikut:

- a. Penurunan Belanja Barang Operasional – Penanganan Pandemi COVID-19 dikarenakan penurunan pembelian barang-barang terkait COVID-19 dan tidak terdapat alokasi anggaran pada akun tersebut;

- b. Penurunan Belanja Barang Non Operasional – Penanganan Pandemi COVID-19 dikarenakan tidak terdapat alokasi anggaran dan realisasi terkait penanganan pandemi COVID-19 pada akun tersebut;
- c. Penurunan Belanja Barang Persediaan – Penanganan Pandemi COVID-19 dikarenakan penurunan pembelian barang-barang terkait persediaan COVID-19 dan tidak terdapat alokasi anggaran pada akun tersebut;
- d. Penurunan Belanja Jasa Profesi dikarenakan terdapat penurunan kegiatan terkait narasumber kegiatan webinar, FGD, *workshop*, dan seminar;
- e. Penurunan Belanja Jasa - Penanganan pandemi COVID-19 dikarenakan tidak terdapat alokasi anggaran pada tahun 2023 atas kegiatan *screening test* (swab PCR dan antigen) dan penyemprotan desinfektan;
- f. Penurunan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan dikarenakan penurunan terkait kegiatan pemeliharaan gedung bertingkat dan halaman gedung kantor (tidak terdapat transaksi yang lebih besar/konstruksi pemeliharaan gedung, sebagaimana tahun 2022 untuk pengecatan gedung dan pemeliharaan dak gedung);
- g. Penurunan Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan dikarenakan tidak terdapat persediaan terkait Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
- h. Penurunan Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin dikarenakan tidak terdapat persediaan terkait Pemeliharaan Peralatan dan Mesin; dan
- i. Penurunan Belanja Pemeliharaan Lainnya dikarenakan penurunan kebutuhan pemeliharaan alat musik.

Belanja Modal (Neto)
Rp2.856.602.393

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal (neto) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp2.856.602.393 dan Rp1.052.685.249. Terdapat peningkatan pada realisasi belanja modal dibandingkan tahun anggaran yang lalu sebesar 171,36% dikarenakan peningkatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin atas pembelian Peralatan dan Mesin, serta Belanja Modal Gedung dan Bangunan atas pengadaan Rumah. Perbandingan Realisasi Belanja Modal tahun 2023 dan 2022 dijelaskan dalam Tabel 17.

Tabel 17
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun 2023 dan 2022
(dalam Rupiah)

Kode Akun	Nama Akun	Realisasi		Kenaikan (Penurunan)	
		2023	2022	Rp	%
	Belanja Modal Bruto				
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.416.613.873	674.803.334	741.810.539	109,93
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.372.995.000	-	1.372.995.000	100,00
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	66.993.520	377.881.915	(310.888.395)	(82,27)
	Jumlah Belanja Bruto	2.856.602.393	1.052.685.249	1.803.917.144	171,36
	Pengembalian Belanja Modal	-	-	-	-
	Total Belanja Modal Netto	2.856.602.393	1.052.685.249	1.803.917.144	171,36

Terdapat peningkatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin dikarenakan pembelian peralatan dan mesin sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 18.

Tabel 18
Rincian Pembelian Peralatan dan Mesin Tahun 2023
(dalam Rupiah)

No	Kode	Uraian	KUANTITAS	SATUAN	NILAI (Rp)
1	3010305009	Pompa Bensin/Minyak <i>Transportable</i>	1	Unit	3.553.200
2	3010306003	Mesin Bor Beton	1	Unit	2.961.500
3	3020104007	Sepeda Listrik	1	Unit	6.871.000
4	3020201001	Gerobak Tarik	1	Unit	2.451.000
5	3020201009	<i>Baggage Trolley</i>	7	Unit	18.522.696
6	3030101005	Mesin Bor	1	Buah	1.670.100
7	3030102002	Mesin Bor Tangan	1	Buah	1.169.500
8	3030207001	Gergaji	1	Buah	2.992.000
9	3030212025	Mesin Pompa air PMK	1	Buah	5.259.000
10	3030301141	<i>Distance Meter</i>	1	unit	1.962.800
11	3050104001	Lemari Besi/Metal	3	Buah	17.878.040
12	3050104002	Lemari Kayu	13	Buah	110.617.000
13	3050104003	Rak Besi	5	Buah	12.730.800
14	3050104029	Box Camera	1	unit	1.188.000
15	3050105048	<i>LCD Projector/Infocus</i>	1	Buah	9.135.300
16	3050201001	Meja Kerja Besi/Metal	9	Buah	26.518.500
17	3050201004	Kursi Kayu	6	Buah	19.746.900
18	3050203004	Mesin Cuci	1	Buah	16.206.000
19	3050204001	Lemari Es	3	Buah	14.675.200
20	3050204004	A.C. Split	5	Buah	54.778.500
21	3050204005	<i>Portable Air Conditioner</i> (Alat Pendingin)	2	Buah	58.400.000
22	3050206002	Televisi	1	Buah	6.897.000
23	3050206014	<i>Microphone</i>	1	Buah	3.799.999
24	3050206020	<i>Camera Video</i>	3	Buah	48.495.900
25	3050206031	Pataka	2	Buah	3.320.800
26	3050206034	Tangga Aluminium	2	Buah	2.470.000
27	3050206041	Mesin Pengering Pakaian	1	Buah	19.624.800
28	3050206058	Gordyin/Kray	62	Buah	180.600.000
29	3050299999	Alat Rumah Tangga Lainnya	5	dummy	7.311.000
30	3060101036	<i>Microphone/Wireless MIC</i>	2	Buah	8.138.500
31	3060101037	<i>Microphone/Boom Stand</i>	2	Buah	3.441.000
32	3060101048	<i>Uninterruptible Power Supply (UPS)</i>	2	Buah	306.000.000
33	3060102016	<i>Video Switcher</i>	1	Buah	1.287.600
34	3060102061	Lensa Kamera	1	Buah	2.618.900
35	3060201004	Telephone Mobile	2	Buah	13.977.900
36	3070101005	Tensimeter	1	Buah	1.004.100
37	3070101009	Timbangan Badan (Alat Kedokteran Umum)	1	Buah	1.551.000
38	3070199999	Alat Kedokteran Lainnya	1	dummy	3.494.900
39	3080118041	Tangki Penyimpan	1	Buah	25.752.000
40	3080141170	<i>Microwave Oven</i>	1	Buah	3.884.200
41	3080715005	<i>Lighting Equipment</i>	2	Buah	6.573.400
42	3100102003	<i>Note Book</i>	17	Buah	297.000.000
43	3100102009	<i>Tablet PC</i>	2	Buah	20.900.000
44	3100203003	<i>Printer</i> (Peralatan Personal Komputer)	1	Buah	3.991.200
45	3170124004	<i>Polishing Machine</i> /Mesin Poles	1	Buah	2.923.638
46	3190102004	Alat Badminton	2	Buah	39.960.000
Jumlah					1.404.304.873

Selain itu, terdapat penurunan Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan dikarenakan tahun 2023 hanya terdapat renovasi ruang UPS sebesar Rp66.993.520.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

ASET

C.1 Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp674.245.974 dan Rp570.534.771. Terdapat peningkatan nilai Aset Lancar sebesar 18,18% dikarenakan terdapat peningkatan Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*) atas Biaya Langganan Pemakaian Aplikasi Vidio Conference. Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2023 dan 2022 dijelaskan dalam Tabel 19.

Tabel 19
Rincian Aset Lancar
per 31 Desember 2023 dan 2022
(dalam Rupiah)

No.	Aset Lancar	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
1	Belanja Dibayar Dimuka (<i>Prepaid</i>)	3.969.107	1.959.200	2.009.907	102,59
2	Piutang Bukan Pajak	28.765.713	170.092.253	(141.326.540)	(83,09)
3	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(28.765.713)	(170.092.253)	141.326.540	(83,09)
4	Persediaan	670.276.867	568.575.571	101.701.296	17,89
	Jumlah	674.245.974	570.534.771	103.711.203	18,18

Belanja Dibayar Dimuka
(*Prepaid*) Rp3.969.107

C.1.1 Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*)

Belanja dibayar dimuka digunakan untuk mencatat pengeluaran yang telah dapat ditentukan penggunaannya, tetapi belum menerima manfaat, baik berupa barang/jasa atas pengeluaran tersebut. Belanja dibayar dimuka (*prepaid*) Pusdiklat APU PPT per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp3.969.107 dan Rp1.959.200 dengan peningkatan sebesar 102,59% dikarenakan masa manfaat langganan aplikasi manajemen perkantoran, seperti aplikasi kerjoo absensi pegawai Ciloto, *software* Heyzine, aplikasi filmora, aplikasi WPS Pro, aplikasi vidio conference, dan *google play*. Rincian belanja dibayar dimuka (*prepaid*) per 31 Desember 2023 dijelaskan dalam Tabel 20.

Tabel 20
Rincian Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*)
per 31 Desember 2023
(dalam Rupiah)

No	Kode Akun	No Dokumen	Uraian	Nilai (Rp)
Belanja Dibayar Dimuka (<i>Prepaid</i>)				
1	522119	SPM 00019A tanggal 2 Februari 2023 SPBY 00081 tanggal 1 Februari 2023	Langganan Aplikasi Kerjoo Absensi Pegawai Ciloto (28 Januari 2023 - 27 Januari 2024)	1.231.200
			Nilai Prepaid	91.075
2	522119	SPM 00343A SPBY KKP 00343 tanggal 25 September 2023	Langganan software Heyzine (16 Agustus 2023 - 15 Agustus 2024)	767.670
			Nilai Prepaid	478.221

No	Kode Akun	No Dokumen	Uraian	Nilai (Rp)
3	522119	SPM 00432A tanggal 20 November 2023 SPBY KKP 00410 2023	Langganan aplikasi filmora (27 Oktober 2023 - 26 Oktober 2024)	599.000
			Nilai Prepaid	490.984
4	522119	SPM 00537A tanggal 15 Desember 2023 SPBY KKP 00446 2023	Langganan tahunan WPS Pro (6 November 2023 - 5 November 2024)	269.000
			Nilai Prepaid	227.842
5	522119	SPM 00537A tanggal 15 Desember 2023 SPBY 00476 2023	Langganan zoom Keuangan 1 tahun (23 November 2023 - 22 November 2024)	2.635.128
			Nilai Prepaid	2.354.336
6	522119	SPM 00537A tanggal 15 Desember 2023 SPBY KKP 00478	Pembayaran google play RT 3 bulan (24 November 2023 - 24 Februari 2024)	22.200
			Nilai Prepaid	13.129
7	522119	SPM 00540A tanggal 18 Desember 2023 SPBY KKP 00495	Langganan zoom progeva (12 Desember 2023 - 11 Januari 2024)	263.782
			Nilai Prepaid	93.600
8	522119	INV233203842 tanggal 27 Desember 2023	Langganan zoom bagian RT (27 Desember 2023 - 26 Januari 2024)	262.212
			Nilai Prepaid	219.920
Total				3.969.107

Piutang Bukan Pajak
Rp28.765.713

C.1.2 Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak Bruto per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp28.765.713 dan Rp170.092.253, mengalami penurunan sebesar 83,09% dari tahun sebelumnya. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Piutang Bukan Pajak antara lain tagihan denda keterlambatan, kekurangan pekerjaan, dan lain-lain. Rincian Piutang Bukan Pajak secara Bruto dan Neto (setelah dikurangi penyisihan) disajikan dalam Tabel 21 sebagai berikut.

Tabel 21
Rincian Piutang Bukan Pajak
per 31 Desember 2023

Kode Akun	Uraian	Nilai (Rp)
	Piutang Bukan Pajak	
115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	
	Piutang CV. KAK atas temuan BPK Tahun 2021 terhadap kelebihan pembayaran Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi Pembuatan Kanopi Lapangan Tennis Pusdiklat APU PPT TA 2021	28.765.713
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	
116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	(28.765.713)
	Piutang Bukan Pajak (Neto)	-

Dari nilai Piutang Bukan Pajak bruto sebesar Rp28.765.713 terdapat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih sebesar Rp28.765.713 sehingga nilai Piutang Bukan Pajak Bersih yang diperkirakan dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp0. Terdapat penurunan signifikan atas Piutang Bukan Pajak sebesar Rp141.326.540 dibandingkan per 31 Desember 2022 dikarenakan terdapat pelunasan piutang negara a.n. CV. TPA dengan keringanan melalui *Crash Program* berdasarkan Surat KPKNL Nomor S-3195/KNL.0803/2023 tanggal 23 Juni 2023 hal Pemberitahuan Piutang Negara Lunas dengan Keringanan atas nama CV. TPA terhadap pemeriksaan BPK Tahun 2021 atas kelebihan pembayaran Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Dak Asrama Pusdiklat APU PPT TA 2021. Sedangkan, Piutang Negara a.n. CV. KAK atas pemeriksaan BPK Tahun 2021 terhadap kelebihan pembayaran Pekerjaan Konstruksi Pembuatan Kanopi Lapangan Tennis Pusdiklat APU PPT TA 2021 sebesar Rp28.765.713 dikategorikan dalam kategori macet dikarenakan sebagai berikut:

1. CV. KAK belum melunasi kewajiban pembayaran sebesar Rp28.765.713 hingga 31 Desember 2023;
2. Pusdiklat APU PPT telah mengirimkan Surat Peringatan Ke Empat Penyelesaian Kewajiban Pembayaran terhadap hasil pemeriksaan BPK Tahun 2021 kepada CV. KAK;
3. Pusdiklat APU PPT telah menyerahkan pengurusan piutang negara dari PNBPN kepada KPKNL atas CV. KAK; dan
4. KPKNL telah melakukan pemanggilan terakhir kepada CV. KAK.

Persediaan
Rp670.276.867

C.1.3 Persediaan

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional. Nilai persediaan Pusdiklat APU PPT per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp670.276.867 dan Rp568.575.571 dengan peningkatan sebesar 17,89% dibandingkan dengan tahun 2022 dikarenakan peningkatan signifikan persediaan lainnya atas pembelian persediaan obat klinik. Seluruh persediaan per 31 Desember 2023 dalam kondisi baik. Rincian nilai persediaan Neraca dijelaskan dalam dalam Tabel 22.

Tabel 22
Rincian Nilai Persediaan Neraca
per 31 Desember 2023
(dalam Rupiah)

Kode Perkiraan	Uraian	Nilai (Rp)
117111	Barang Konsumsi	578.701.304
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	39.715.719
117114	Suku Cadang	25.450.722
117131	Bahan Baku	1.571.760
117199	Persediaan Lainnya	24.837.362
	Jumlah	670.276.867

Aset Tetap
Rp129.008.873.637

C.2 Aset Tetap

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp129.008.873.637 dan Rp130.084.463.537 yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar 0,83% dikarenakan peningkatan akumulasi penyusutan. Rincian Aset Tetap Pusdiklat APU PPT per 31 Desember 2023 dan 2022 dijelaskan dalam Tabel 23.

Tabel 23
Rincian Aset Tetap
31 Desember 2023 dan 2022
(dalam Rupiah)

Kode Akun	Nama Akun	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
131111	Tanah	41.534.373.342	40.765.908.040	768.465.302	1,89
132111	Peralatan dan Mesin	37.509.748.093	36.351.304.678	1.158.443.415	3,19
133111	Gedung dan Bangunan	99.251.678.085	98.952.090.367	299.587.718	0,30
134113	Jalan irigasi dan Jaringan	235.602.000	235.602.000	-	-
135121	Aset Tetap Lainnya	79.329.600	79.329.600	-	-
136111	Konstruksi Dalam Pengerjaan	99.017.550	99.017.550	-	-
	Jumlah	178.709.748.670	176.483.252.235	2.226.496.435	1,26
	Akumulasi Penyusutan	(49.700.875.033)	(46.398.788.698)	(3.302.086.335)	7,12
	Nilai Buku Aset Tetap	129.008.873.637	130.084.463.537	(1.075.589.900)	(0,83)

Tanah
Rp41.534.373.342

C.2.1 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Pusdiklat APU PPT per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp41.534.373.342 dan Rp40.765.908.040. Nilai Aset Tetap berupa Tanah tersebut disajikan dalam Neraca Pusdiklat APU PPT per 31 Desember 2023. Terdapat mutasi tambah dari perolehan lainnya atas Reklasifikasi dari Nilai Pengadaan Rumah (bangunan gedung kantor permanen) ke tanah sebesar Rp755.592.202 dan dari Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah atas reklasifikasi dari bangunan gedung kantor permanen ke tanah dari pengadaan rumah (biaya notaris dan balik nama) sebesar Rp12.873.100. Rincian Mutasi Tanah dijelaskan dalam Tabel 24.

Tabel 24
Mutasi Tanah
Tahun 2023
(dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2022	40.765.908.040
Mutasi Tambah:	
Perolehan Lainnya	755.592.202
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	12.873.100
Total Mutasi Tambah	768.465.302
Mutasi Kurang:	
Total Mutasi Kurang	-
Saldo per 31 Desember 2023	41.534.373.342
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	-
Nilai Buku per 31 Desember 2023	41.534.373.342

Rincian Aset Tanah Pusdiklat APU PPT dijelaskan dalam Tabel 25.

Tabel 25
Rincian Aset Tanah
per 31 Desember 2023
(dalam Rupiah)

No.	Dokumen	Uraian	Luas (m ²)	Nilai Perolehan (Rp)
1	a b	Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 197/KM.6/2014 tanggal 7 Juli 2014 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Eks Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) pada PPATK; dan Surat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Nomor S-1705/KN/2014 tanggal 19 November 2014 Penihal Roya Hak Tanggungan SHM No. 87/Cimpaeun.	- - Berlokasi di Jalan Raya Tapos - Cimpaeun, Kecamatan Cimaggis, Kota Depok, Jawa Barat; dan Tanah tersebut merupakan pengalihan status penggunaan.	9.510 28.784.107.000
2	a b	Akta Pelepasan Hak Nomor 01 tanggal 9 November 2018 dengan Notaris Early Gresiria Taher, S.G., M.Kn.; dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-00065.AH.02.01 Tahun 2014 Tanggal 29 Januari 2014.	- - Berlokasi di Komplek Pusdiklat PPATK, Jl. Raya Tapos Nomor 82 (d.h. Puri Cimaggis Permai) No A9, RT/RW.004/03, Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat; dan Tanah tersebut merupakan pengalihan status jual beli.	120 394.585.440
3	a b	Akta Pelepasan Hak Nomor 02 tanggal 16 November 2018 dengan Notaris Early Gresiria Taher, S.G., M.Kn.; dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-00065.AH.02.01 Tahun 2014 Tanggal 29 Januari 2014.	- - Jl. Raya Tapos Nomor 82 (d.h. Puri Cimaggis Permai) No A5, RT/RW.004/03, Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat; dan Tanah tersebut merupakan pengalihan status jual beli.	120 332.436.600
4		BAST Nomor: BAST-053A.09/PL.02/X/2019 tanggal 9 September 2019	- - Berlokasi di Jl. Raya Tapos Nomor 82 (d.h. Puri Cimaggis Permai) No. A8, RT 004/RW 03, Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat; dan Tanah tersebut merupakan pengalihan status jual beli.	123 528.900.000
5		BAST Nomor: BAST-061A.09/PL.02/X/2019 tanggal 30 September 2019	- - Jl. Raya Tapos Nomor 82 (d.h. Puri Cimaggis Permai) No. A10, RT 004/RW 03, Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat; dan Tanah tersebut merupakan pengalihan status jual beli.	114 490.200.000
6		BAST Nomor: BAST-062A.09/PL.02/X/2019 tanggal 30 September 2019	- - Jl. Raya Tapos Nomor 82 (d.h. Puri Cimaggis Permai) No. A11, RT 004/RW 03, Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat; dan Tanah tersebut merupakan pengalihan status jual beli.	142 610.600.000
7		Surat Perjanjian No:Perj-056/PL.02/XII/2020 tanggal 08 Desember 2020 dan BAST No: BAST-056.12/PL.02/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020	- Pengadaan Tanah a.n. Wiwik Setyaji Puri Cimaggis Permai No A12 Jl. Raya Tapos No 82 RT 004/RW 03, Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat	152 760.000.000
8		Surat Perjanjian No:Perj-057/PL.02/XII/2020 tanggal 08 Desember 2020 dan BAST No: BAST-057.12/PL.02/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020	- Pengadaan Tanah a.n. Nurfaela Sundari Puri Cimaggis Permai No A6 Jl. Raya Tapos No 82 RT 004/RW 03, Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat	118 590.000.000
9		Akta Pelepasan Hak atas Sertifikat Hak Milik Nomor 79/Cimpaeun atas nama Wiwik Setyaji dengan Notaris Notaris Early Gresiria Taher, S.G., M.Kn.	- Biaya Pengadaan Pembuatan Akta Pelepasan Hak atas Sertifikat Hak Milik Nomor 79/Cimpaeun atas nama Wiwik Setyaji	10.350.000
10		Akta Pelepasan Hak atas Sertifikat Hak Milik Nomor 85/Cimpaeun atas nama Nurfaela Sundari dengan Notaris Notaris Early Gresiria Taher, S.G., M.Kn.	- Biaya Pengadaan Pembuatan Akta Pelepasan Hak atas Sertifikat Hak Milik Nomor 85/Cimpaeun atas nama Nurfaela Sundari	7.850.000
11		Nomor berkas permohonan 123587/2021, 123792/2021, 123802/2021, 123838/2021, 123594/2021, 123833/2021, 120981/2021	- Pengembangan nilai aset (pengurusan surat pelepasan hak tujuh unit rumah)	350.000
12		BAST TRANSFER-02/PL.05/II/2022 tanggal 8 Februari 2022	- Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (transfer masuk Gedung Arsip Ciloto)	8.256.529.000
13		Surat Perjanjian No:Perj-055/PL.02/X/2023 tanggal 11 Oktober 2023 dan BAST No: BAST-055.10/PL.02/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023	- Pengadaan Tanah a.n. Ardhan Dwiyonanto Puri Cimaggis Permai No A7 Jl. Raya Tapos No 82 RT 004/RW 03, Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat	131 768.465.302
			Total	41.534.373.342

Peralatan dan Mesin
Rp37.509.748.093

C.2.2 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin adalah aset yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas dengan nilai kapitalisasi minimal Rp1.000.000/unit. Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp37.509.748.093 dan Rp36.351.304.678. Akumulasi penyusutan per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp35.124.672.064 dan Rp 33.809.953.468.

Terdapat mutasi tambah dari pembelian peralatan mesin sebesar Rp 1.404.304.873, berasal dari Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah terkait pembelian Tangki Penyimpanan sebesar Rp 1.200.000, berasal dari Pengembangan Nilai Aset (Langsung) terkait pembelian AC Split dan Tangki Penyimpanan sebesar Rp7.387.000, berasal dari perolehan lainnya atas pembelian Televisi sebesar Rp4.598.000 (dikarenakan koreksi pencatatan BMN atas kesalahan pencatatan jumlah barang satu NUP TV yang seharusnya tercatat tiga NUP), berasal dari Penyelesaian Pembangunan dengan KDP terkait pembuatan Papan Pengumuman sebesar Rp4.922.000, serta berasal dari transfer masuk barang dari PPATK ke Pusdiklat APU PPT sebesar Rp75.733.542. Peralatan dan mesin atas transfer masuk tersebut telah mengalami depresiasi penuh sehingga saldo transfer masuk pada LPE bernilai Rp0. Mutasi kurang Peralatan dan Mesin selama tahun 2023 berasal dari Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang sebesar Rp5.798.000 atas pembelian Tangki Penyimpanan dan Televisi, serta berasal dari Penghentian Aset Dari Penggunaan atas P.C Unit, Televisi, dan Lemari Kayu. Rincian mutasi Peralatan dan Mesin dijelaskan dalam Tabel 26.

Tabel 26
Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin
Tahun 2023
(dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2022	36.351.304.678
Mutasi tambah tahun 2023:	
- Pembelian	1.404.304.873
- Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah (Tangki Penyimpanan)	1.200.000
- Pengembangan Nilai Aset (Langsung) terkait AC Split	6.187.000
- Pengembangan Nilai Aset (Langsung) terkait Tangki Penyimpanan	1.200.000
- Perolehan Lainnya (Televisi Dua Unit)	4.598.000
- Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP (Papan Pengumuman)	4.922.000
- Transfer masuk	75.733.542
Total Mutasi Tambah	1.498.145.415
Mutasi kurang tahun 2023:	
- Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	5.798.000
- Penghentian Aset Dari Penggunaan	333.904.000
Total Mutasi Kurang	339.702.000
Total Mutasi Tambah (Kurang)	1.158.443.415
Saldo per 31 Desember 2023	37.509.748.093
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(35.124.672.064)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	2.385.076.029

Rincian pembelian Peralatan dan Mesin dijelaskan dalam Tabel 27.

Tabel 27
Rincian Pembelian Peralatan dan Mesin
Tahun 2023
(dalam Rupiah)

No	Kode	Uraian	KUANTITAS	SATUAN	NILAI (Rp)
1	3010305009	Pompa Bensin/Minyak <i>Transportable</i>	1	Unit	3.553.200
2	3010306003	Mesin Bor Beton	1	Unit	2.961.500
3	3020104007	Sepeda Listrik	1	Unit	6.871.000
4	3020201001	Gerobak Tarik	1	Unit	2.451.000
5	3020201009	<i>Baggage Trolley</i>	7	Unit	18.522.696
6	3030101005	Mesin Bor	1	Buah	1.670.100
7	3030102002	Mesin Bor Tangan	1	Buah	1.169.500
8	3030207001	Gergaji	1	Buah	2.992.000
9	3030212025	Mesin Pompa air PMK	1	Buah	5.259.000
10	3030301141	<i>Distance Meter</i>	1	unit	1.962.800
11	3050104001	Lemari Besi/Metal	3	Buah	17.878.040
12	3050104002	Lemari Kayu	13	Buah	110.617.000
13	3050104003	Rak Besi	5	Buah	12.730.800
14	3050104029	Box Camera	1	unit	1.188.000
15	3050105048	<i>LCD Projector/Infocus</i>	1	Buah	9.135.300
16	3050201001	Meja Kerja Besi/Metal	9	Buah	26.518.500
17	3050201004	Kursi Kayu	6	Buah	19.746.900
18	3050203004	Mesin Cuci	1	Buah	16.206.000
19	3050204001	Lemari Es	3	Buah	14.675.200
20	3050204004	A.C. Split	5	Buah	54.778.500
21	3050204005	<i>Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)</i>	2	Buah	58.400.000
22	3050206002	Televisi	1	Buah	6.897.000
23	3050206014	<i>Microphone</i>	1	Buah	3.799.999
24	3050206020	<i>Camera Video</i>	3	Buah	48.495.900
25	3050206031	Pataka	2	Buah	3.320.800
26	3050206034	Tangga Aluminium	2	Buah	2.470.000
27	3050206041	Mesin Pengering Pakaian	1	Buah	19.624.800
28	3050206058	Gordyin/Kray	62	Buah	180.600.000
29	3050299999	Alat Rumah Tangga Lainnya	5	dummy	7.311.000
30	3060101036	<i>Microphone/Wireless MIC</i>	2	Buah	8.138.500
31	3060101037	<i>Microphone/Boom Stand</i>	2	Buah	3.441.000
32	3060101048	<i>Uninterruptible Power Supply (UPS)</i>	2	Buah	306.000.000
33	3060102016	<i>Video Switcher</i>	1	Buah	1.287.600
34	3060102061	Lensa Kamera	1	Buah	2.618.900
35	3060201004	Telephone Mobile	2	Buah	13.977.900
36	3070101005	Tensimeter	1	Buah	1.004.100
37	3070101009	Timbangan Badan (Alat Kedokteran Umum)	1	Buah	1.551.000
38	3070199999	Alat Kedokteran Lainnya	1	dummy	3.494.900
39	3080118041	Tangki Penyimpan	1	Buah	25.752.000
40	3080141170	<i>Microwave Oven</i>	1	Buah	3.884.200
41	3080715005	<i>Lighting Equipment</i>	2	Buah	6.573.400
42	3100102003	<i>Note Book</i>	17	Buah	297.000.000
43	3100102009	<i>Tablet PC</i>	2	Buah	20.900.000
44	3100203003	<i>Printer (Peralatan Personal Komputer)</i>	1	Buah	3.991.200
45	3170124004	<i>Polishing Machine /Mesin Poles</i>	1	Buah	2.923.638
46	3190102004	Alat Badminton	2	Buah	39.960.000
Jumlah					1.404.304.873

Rincian transfer masuk barang dari PPATK ke Pusdiklat APU PPT sebesar Rp75.733.542 dijelaskan dalam Tabel 28.

Tabel 28
Rincian Transfer Masuk
Tahun 2023
(dalam Rupiah)

No.	Peralatan dan Mesin	Kuantitas	Nilai (Rp)
1	Lemari Kayu	9	48.911.875
2	Buffet	2	5.885.000
3	Meja Kerja Kayu	1	2.291.667
4	Kursi Kayu	1	1.155.000
5	Sice	4	5.390.000
6	Kasur/Spring Bed	2	12.100.000
	Jumlah	19	75.733.542

Gedung dan Bangunan
Rp99.251.678.085

C.2.3 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp99.251.678.085 dan Rp98.952.090.367. Rincian Mutasi Nilai Gedung dan Bangunan Tahun 2023 dijelaskan dalam Tabel 29.

Tabel 29
Rincian Mutasi Nilai Gedung dan Bangunan
Tahun 2023
(dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2022	98.952.090.367
Mutasi tambah tahun 2023:	
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP (Pengadaan Rumah) No:Perj-055/PL.02/X/2023 tanggal 11 Oktober 2023 dan BAST No: BAST-055.10/PL.02/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023	1.345.000.000
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP (Jasa Penilai Aset) berdasarkan SPM Nomor 00365A tanggal 9 Oktober 2023	4.995.000
Pengembangan Melalui KDP (renovasi ruang UPS) berdasarkan BAST-010/PL.02/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023	66.993.520
Pengembangan Melalui KDP (Biaya Notaris) berdasarkan SPM Nomor 00530A tanggal 15 Desember 2023	10.000.000
Pengembangan melalui KDP (Biaya Balik Nama) berdasarkan SPM Nomor 00531A tanggal 15 Desember 2023	13.000.000
Pengembangan Melalui KDP (BA Koreksi Pencatatan-06/PL.04.01/XI/2023)	3.000.000
Total Mutasi Tambah	1.442.988.520
Mutasi kurang tahun 2023:	
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang (BA Koreksi Pencatatan-04/PL.04.01/XI/2023)	755.592.202
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang dari bangunan gedung kantor permanen ke tanah dari pembelian rumah eks warga blok A7 (biaya notaris dan balik nama) berdasarkan BA Koreksi Pencatatan-07/PL.04.01/XI/2023	12.873.100
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang (BA Koreksi Pencatatan-05/PL.04.01/XI/2023)	3.000.000
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan (SK Nomor 004 Tahun 2023)	371.935.500
Total Mutasi Kurang	1.143.400.802
Total Mutasi Tambah (Kurang)	299.587.718
Saldo per 31 Desember 2023	99.251.678.085
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(14.401.827.265)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	84.849.850.820

Nilai Gedung dan Bangunan yang dimiliki oleh Pusdiklat APU PPT per 31 Desember 2023 yang dijelaskan dalam Tabel 30.

Tabel 30
Rincian Aset Gedung dan Bangunan
per 31 Desember 2023

No.	Uraian	NUP	Luas (m ²)	Nilai Perolehan (Rp)	Sub Kelompok Barang	Kondisi Barang
1	a) Bangunan Gedung Kantor Permanen Gedung Pusdiklat APUPPT (Cimanggis) di Jalan Raya Tapos - Cimanggis, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Pengembangan langsung (31-10-2019) Pengembangan langsung (29-12-2020) Pengembangan melalui KDP (09-07-2021) Pengembangan melalui KDP (09-07-2021) Pengembangan melalui KDP (09-07-2021) Koreksi pencatatan nilai bertambah Pengembangan melalui KDP (20-06-2023)	1	6.502	36.537.420.808 123.987.690 99.000.000 265.140.134 614.530.214 89.980.000 50.005.500 66.593.920	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik
	b) BA Koreksi Pencatatan Nomor BA Koreksi Pencatatan-01/PL.04.01/VI/2022 tanggal 01 Juli 2022 Pengembangan nilai aset langsung Pengembangan melalui KDP (05-12-2022)	1	6.946	27.505.087.249 34.545.975 43.341.280	Asrama Permanen	Baik
	c) BA Koreksi Pencatatan SMN Nomor: BA Koreksi Pencatatan-02/PL.04.01/XI/2022 tanggal 6 September 2022 Pengembangan melalui KDP	1	682	3.451.999.387 150.971.630	Bangunan Gedung Olahraga Tertutup Permanen	Baik
2	a) Berlokasi di Komplek Pusdiklat PPATK, Jl. Raya Tapos Nomor 86 (d.h. Puri Cimanggis Permai) No. A5, RT/RW 004/03, Kelurahan Cimanggis, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat; dan b) Bangunan tersebut merupakan pengalihan status jual beli berdasarkan Akta Pelepasan Hak Nomor 01 tanggal 9 November 2018 dengan Notaris Early Gresilia Taher, S.G., M.Kn. dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-00065. AH.02.01 Tahun 2014 Tanggal 29 Januari 2014. c) Reklas menjadi tempat ibadah permanen berdasarkan BA Reklasifikasi-01/PL.04.01/VI/2022 d) Penghapusan bangunan dikarenakan kondisi rusak berat berdasarkan SK Penghapusan Nomor 003 Tahun 2023	3	122	348.695.440 (348.695.440)	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	Rusak Berat
3	a) Berlokasi di Komplek Pusdiklat PPATK, Jl. Raya Tapos Nomor 82 (d.h. Puri Cimanggis Permai) No. A9, RT/RW 004/03, Kelurahan Cimanggis, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. b) Bangunan tersebut merupakan pengalihan status jual beli berdasarkan Akta Pelepasan Hak Nomor 02 tanggal 16 November 2018 dengan Notaris Early Gresilia Taher, S.G., M.Kn. dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-00065. AH.02.01 Tahun 2014 Tanggal 29 Januari 2014. c) Reklas menjadi klinik berdasarkan BA Reklasifikasi-01/PL.04.01/VI/2022	4	58	258.982.240	Klinik	Baik
4	a) Berlokasi di Jl. Raya Tapos Nomor 82 (d.h. Puri Cimanggis Permai) No. A8, RT 004/RW 03, Kelurahan Cimanggis, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Tanah tersebut merupakan pengalihan status jual beli. b) Sesuai dengan BAST Nomor: BAST-053B.09/PL.02/XI/2019 tanggal 9 September 2019 c) Reklas menjadi gudang berdasarkan BA Reklasifikasi-01/PL.04.01/VI/2022 d) Pengembangan langsung e) Pengembangan melalui KDP (31-13-2019)	5		135.040.000 119.695.400 30.689.400 119.970.000	Gudang	Baik
5	a) Berlokasi di Jl. Raya Tapos Nomor 82 (d.h. Puri Cimanggis Permai) No. A10, RT 004/RW 03, Kelurahan Cimanggis, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Tanah tersebut merupakan pengalihan status jual beli. b) Sesuai dengan BAST Nomor: BAST-051B.09/PL.02/XI/2019 tanggal 30 September 2019 c) Pengembangan melalui KDP d) Pengembangan melalui KDP e) Penghapusan bangunan dikarenakan adanya DIPA Pengganti berdasarkan SK Penghapusan Nomor 004 Tahun 2023	7		25.654.200 (145.624.200)	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Rusak Ringan
6	a) Berlokasi di Jl. Raya Tapos Nomor 82 (d.h. Puri Cimanggis Permai) No. A11, RT 004/RW 03, Kelurahan Cimanggis, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Tanah tersebut merupakan pengalihan status jual beli. b) BAST Nomor: BAST-062B.09/PL.02/XI/2019 tanggal 30 September 2019 c) Pengembangan melalui KDP d) Pengembangan melalui KDP (31-13-2019) e) Penghapusan bangunan dikarenakan adanya DIPA Pengganti berdasarkan SK Penghapusan Nomor 004 Tahun 2023	6		197.530.000 28.781.300 (226.311.300)	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik
7	a) Pagor permanen b) Koreksi Revaluasi			331.941.070 (9.527.000)	Pagor Permanen	
8	a) Akta Pelepasan Hak atas Sertifikat Hak Milik Nomor 79/Cimanggis atas nama Wwik Setyaji (A12) dengan Notaris Notaris Early Gresilia Taher, S.G., M.Kn. b) Surat Perjanjian No. Perj-056/PL.02/XI/2020 tanggal 08 Desember 2020 dan BAST No: BAST-056.12/PL.02/XI/2020 tanggal 10 Desember 2020 c) Reklas menjadi gudang berdasarkan BA Reklasifikasi-01/PL.04.01/VI/2022	8	127	275.000.000	Gudang	Baik
9	a) Akta Pelepasan Hak atas Sertifikat Hak Milik Nomor 85/Cimanggis atas nama Nurafat Sundari (No. A6) dengan Notaris Notaris Early Gresilia Taher, S.G., M.Kn. b) Surat Perjanjian No. Perj-057/PL.02/XI/2020 tanggal 08 Desember 2020 dan BAST No: BAST-057.12/PL.02/XI/2020 tanggal 14 Desember 2020 c) Reklas menjadi tempat ibadah berdasarkan BA Reklasifikasi-01/PL.04.01/VI/2022 d) Penghapusan bangunan dikarenakan kondisi rusak berat berdasarkan SK Penghapusan Nomor 003 Tahun 2023	9	50	195.000.000 (195.000.000)	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	Rusak Berat
10	a) Transfer masuk Gedung Arsip Ciloto	10		28.072.324.000	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Rusak Berat
11	a) Pengadaan Rumah berdasarkan Surat Perjanjian No. Perj-055/PL.02/XI/2023 tanggal 11 Oktober 2023 dan BAST No: BAST-055.10/PL.02/XI/2023 tanggal 13 Oktober 2023 b) Pengadaan Jasa Perbaikan Aset (Tanah dan Bangunan) berdasarkan SPM Nomor 00365A tanggal 9 Oktober 2023 c) Pengembangan melalui KDP (Biaya Notaris) berdasarkan SPM Nomor 00530A tanggal 15 Desember 2023 d) Pengembangan melalui KDP (Biaya Balik Nama) berdasarkan SPM Nomor 00531A tanggal 15 Desember 2023 e) Nilai Reklasifikasi dan Nilai Pengadaan Rumah (bangunan gedung kantor permanen) ke tanah berdasarkan BA Koreksi Pencatatan-04/PL.04.01/XI/2023 f) Nilai reklasifikasi dari bangunan gedung kantor permanen ke tanah dari pembelian rumah eks warga blok A7 (biaya notaris dan balik nama) berdasarkan BA Koreksi Pencatatan-07/PL.04.01/XI/2023	11		1.345.000.000 4.895.000 10.000.000 13.000.000 (755.592.202) (12.873.100)	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik
	Total			99.251.678.085		

Terdapat Penyelesaian Pembangunan dari KDP atas Pengadaan Rumah, Jasa Penilai Aset, Biaya Notaris, dan Biaya Balik Nama sebesar Rp604.529.698. Terdapat Pengembangan melalui KDP berasal dari pembangunan swakelola renovasi ruang UPS sebesar Rp66.993.520. Selain itu, terdapat penghapusan dua unit Bangunan Gedung Kantor Permanen dengan nilai saldo sebesar Rp371.935.500 dikarenakan kondisi rusak berat berdasarkan SK Penghapusan Nomor 003 Tahun 2023. Akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp14.401.827.265.

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp235.602.000

C.2.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sama sebesar Rp235.602.000, yaitu berupa instalasi air bersih. Akumulasi penyusutan jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp140.399.454. Tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang tahun 2023. Rincian mutasi jalan, irigasi, dan jaringan dijelaskan Tabel 31.

Tabel 31
Rincian Mutasi Nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Tahun 2023
(dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2022	235.602.000
Total Mutasi Tambah	-
Total Mutasi Kurang	-
Saldo per 31 Desember 2023	235.602.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(140.399.454)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	95.202.546

Aset Tetap Lainnya
Rp79.329.600

C.2.5 Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Termasuk ke dalam Aset Tetap Lainnya, yaitu buku-buku perpustakaan Pusdiklat APU PPT dan alat musik *modern*. Saldo Aset Tetap Lainnya Pusdiklat APU PPT per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sama sebesar Rp79.329.600. Akumulasi penyusutan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp33.976.250. Tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang aset tetap lainnya tahun 2023. Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya dijelaskan dalam Tabel 32.

Tabel 32
Rincian Mutasi Nilai Aset Tetap Lainnya
Tahun 2023
(dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2022	79.329.600
Total Mutasi Tambah	-
Total Mutasi Kurang	-
Saldo per 31 Desember 2023	79.329.600
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(33.976.250)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	45.353.350

Konstruksi Dalam
Pengerjaan
Rp99.017.550

C.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) merupakan asset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Saldo KDP per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sama sebesar Rp99.017.550 berupa jasa konsultan perencana pembangunan gedung multimedia. Pembangunan gedung multimedia tersebut yang semula direncanakan akan dilaksanakan tahun 2023, tetapi dikarenakan pengadaan konstruksi gedung multimedia mengalami gagal lelang sehingga rencana pembangunan tersebut diundur pada tahun 2024. Terdapat mutasi tambah Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan berupa perbaikan ruang UPS sebesar Rp66.993.520 dan pengadaan Rumah dan jasa penilaian aset tanah dan bangunan sebesar Rp1.349.995.000, serta Pengembangan melalui KDP berupa biaya notaris dan balik nama sebesar Rp13.000.000. Terdapat mutasi kurang berupa Pengembangan Nilai Aset berupa Gedung Kantor Permanen sebesar Rp66.993.520, penyelesaian KDP menjadi bangunan gedung kantor sebesar Rp1.372.995.000. Rincian mutasi KDP dijelaskan Tabel 33.

Tabel 33
Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan
Tahun 2023
(dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2022	99.017.550
Mutasi tambah tahun 2023:	
Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan (perbaikan ruang UPS) berdasarkan BAST-010/PL.02/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023	66.993.520
Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan (jasa penilaian aset tanah dan bangunan) berdasarkan SPM Nomor 00365A tanggal 9 Oktober 2023	4.995.000
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP (Pengadaan Rumah) No:Perj-055/PL.02/X/2023 tanggal 11 Oktober 2023 dan BAST No: BAST-055.10/PL.02/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023	1.345.000.000
Pengembangan Melalui KDP (BA Koreksi Pencatatan-05/PL.04.01/XI/2023) untuk mengakomodir biaya notaris dan balik nama rumah	3.000.000
Pengembangan Melalui KDP (Biaya Notaris) berdasarkan SPM Nomor 00530A tanggal 15 Desember 2023	10.000.000
Pengembangan melalui KDP (Biaya Balik Nama) berdasarkan SPM Nomor 00531A tanggal 15 Desember 2023	13.000.000
Total Mutasi Tambah	1.442.988.520
Mutasi kurang tahun 2023:	
Pengembangan Nilai Aset berupa Gedung Kantor Permanen dari hasil perbaikan ruang UPS	66.993.520
KDP menjadi bangunan gedung kantor NUP 11	1.349.995.000
Penghapusan/Penghentian KDP (BA Koreksi Pencatatan-05/PL.04.01/XI/2023)	3.000.000
KDP menjadi bangunan gedung kantor NUP 11	23.000.000
Total Mutasi Kurang	1.442.988.520
Total Mutasi Tambah (Kurang)	-
Saldo per 31 Desember 2023	99.017.550
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	-
Nilai Buku per 31 Desember 2023	99.017.550

Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
Rp49.700.875.033

C.2.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang dijelaskan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan

kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan KDP. Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp49.700.875.033 dan Rp46.398.788.698. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dijelaskan Tabel 34.

Tabel 34
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
per 31 Desember 2023
(dalam Rupiah)

No	Aset Tetap	Nilai per 31 Desember 2023	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku per 31 Desember 2023
1	Tanah	41.534.373.342	-	41.534.373.342
2	Peralatan dan Mesin	37.509.748.093	(35.124.672.064)	2.385.076.029
3	Gedung dan Bangunan	99.251.678.085	(14.401.827.265)	84.849.850.820
4	Jalan irigasi dan Jaringan	235.602.000	(140.399.454)	95.202.546
5	Aset Tetap Lainnya	79.329.600	(33.976.250)	45.353.350
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	99.017.550	-	99.017.550
Jumlah		178.709.748.670	(49.700.875.033)	129.008.873.637

Aset Lainnya
Rp189.685.360

C.3 Aset Lainnya

Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp189.685.360 dan Rp502.112.584 yang merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar maupun aset tetap, berupa aset tak berwujud berupa *software* komputer sebesar Rp94.420.730, Dana yang Dibatasi Penggunaannya sebesar Rp189.685.360, dan Aset Lain-Lain berupa Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan sebesar Rp27.472.500. Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp121.893.230 dan Rp200.697.186. Rincian nilai Aset Lainnya dijelaskan dalam Tabel 35.

Tabel 35
Rincian Aset Lainnya
per 31 Desember 2023 dan 2022
(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)	
			Rp	%
Aset Tak Berwujud	94.420.730	94.420.730	-	-
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	189.685.360	-	189.685.360	100,00
Aset Lain-Lain	27.472.500	608.389.040	(580.916.540)	(95,48)
Jumlah	311.578.590	702.809.770	(391.231.180)	(55,67)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(121.893.230)	(200.697.186)	78.803.956	(39,27)
Aset Lainnya	189.685.360	502.112.584	(312.427.224)	(62,22)

Aset Tak Berwujud
Rp94.420.730

C.3.1 Aset Tak Berwujud (ATB)

Aset Tak Berwujud adalah aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud tersebut berupa *software* maupun antivirus komputer untuk menunjang kegiatan operasional sehari-hari. Tidak terdapat mutasi tambah maupun kurang ATB pada tahun 2023. Nilai Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sama sebesar Rp94.420.730. Saldo Akumulasi Amortisasi ATB per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp94.420.730. Rincian mutasi ATB dijelaskan dalam Tabel 36.

Tabel 36
Rincian Mutasi Nilai Aset Tak Berwujud
Tahun 2023
(dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2022	94.420.730
Total Mutasi Tambah	-
Total Mutasi Kurang	-
Saldo per 31 Desember 2023	94.420.730
Akumulasi Amortisasi Software s.d. 31 Desember 2023	(94.420.730)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	-

Dana yang Dibatasi
Penggunaannya
Rp189.685.360

C.3.2 Dana yang Dibatasi Penggunaannya

Dana yang Dibatasi Penggunaannya adalah aset lainnya yang dikelola Kementerian Negara/Lembaga yang terikat pada suatu kegiatan tertentu dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan atau kurang dari 12 (dua belas) bulan. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya tersebut berupa Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga atas mekanisme pembayaran melalui Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) sebagai pengganti bank garansi sebagai jaminan pembayaran akhir tahun anggaran yang ditetapkan oleh Ditjen Perbendaharaan di 2023. Mekanisme pembayaran melalui RPATA merupakan tata cara pembayaran pada akhir tahun anggaran pada saat prestasi pekerjaan belum diterima dimana pencairan dana ditampung ke dalam rekening penampungan terlebih dahulu. Pembayaran/pencairan dana kepada penyedia barang/jasa akan dilakukan setelah prestasi pekerjaan diterima. Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp189.685.360 dan Rp0. Masih terdapat saldo per 31 Desember 2023 dikarenakan SP2D atas pembayaran RPATA tersebut terbit pada periode Januari 2024. Rincian mutasi Dana yang Dibatasi Penggunaannya dijelaskan dalam Tabel 37.

Tabel 37
Rincian Dana yang Dibatasi Penggunaannya
Per 31 Desember 2023

Saldo per 31 Desember 2022	-
Mutasi tambah tahun 2023:	
Pengisian RPATA Kontrak Nomor PO-026/PL.02/VII/2023 untuk Pengadaan Langganan Layanan Internet Semester II TA 2023	68.500.000
Pengisian RPATA Kontrak Nomor SPK-052/PL.02/X/2023 untuk Pengadaan Pemeliharaan Chiller dan FCU pada TA 2023	53.280.000
Pengisian RPATA Kontrak Nomor PO-014/PL.02/III/2023 untuk Pengadaan Jasa Pemeliharaan AC Presisi termin III TA 2023	32.190.000
Pengisian RPATA Kontrak Nomor SPK-001/PL.02/I/2023 untuk Pengadaan Jasa Pemeliharaan Elevator Termin III TA 2023	16.849.800
Pengisian RPATA Kontrak Nomor PO-022/PL.03.03/XII/2022 untuk Pengadaan Sewa Mesin Printer Warna dan Mesin Fotokopi Digital Termin ke XII TA 2023	7.770.000
Pengisian Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran atas Kontrak Nomor PO-002/PL.02/I/2023 untuk Pengadaan Jasa Hygiene Service dan Pest Control Termin XII TA 2023	11.095.560
Total Mutasi Tambah	189.685.360
Mutasi kurang tahun 2023:	
Pembayaran tahun 2023	-
Total Mutasi Kurang	-
Total Mutasi Tambah (Kurang)	189.685.360
Saldo per 31 Desember 2023	189.685.360

Aset Lain-Lain
Rp27.472.500

C.3.3 Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain adalah barang milik negara yang berasal dari perolehan lain yang sah. Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Lain-lain meliputi Penetapan Status Penggunaan, Penjualan, Hibah, Pemusnahan, Penghapusan, Pengamanan dan Pemeliharaan, serta Penatausahaan. Nilai Aset Lain-Lain per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp27.472.500 dan Rp608.389.040. Aset Lain-Lain tersebut berupa Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan, yaitu lima unit Lemari Kayu. Terdapat mutasi berupa penghentian aset dari penggunaan, yaitu dua unit Bangunan Gedung Kantor Permanen untuk pembangunan bangunan pengganti berupa studio multimedia sebesar Rp371.935.500, Pencatatan Barang yang akan Dihapuskan atas Lemari Kayu, Televisi, P.C Unit, dan *notebook* sebesar Rp373.135.100, serta penghapusan dua unit Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen sebesar Rp541.685.440 dikarenakan kondisi rusak berat. Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain per 31 Desember 2023 sebesar Rp27.472.500. Rincian mutasi Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan dijelaskan dalam Tabel 38.

Tabel 38
Rincian Mutasi Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan
Tahun 2023
(dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2022	608.389.040
Mutasi tambah tahun 2023:	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya (Lemari Kayu)	98.813.000
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya (Televisi)	77.516.000
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya (P.C Unit)	157.575.000
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya (Bangunan Gedung Kantor Permanen)	371.935.500
Total Mutasi Tambah	705.839.500
Mutasi kurang tahun 2023:	
Penghapusan	371.935.500
Pencatatan Barang yang akan Dihapuskan (Lemari Kayu)	98.813.000
Pencatatan Barang yang akan Dihapuskan (Televisi)	77.516.000
Pencatatan Barang yang akan Dihapuskan (P.C Unit)	157.575.000
Pencatatan Barang yang akan Dihapuskan (Note Book)	39.231.100
Pencatatan Barang yang akan Dihapuskan (Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen)	541.685.440
Total Mutasi Kurang	1.286.756.040
Total Mutasi Tambah (Kurang)	(580.916.540)
Saldo per 31 Desember 2023	27.472.500
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(27.472.500)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	-

Akumulasi
Penyusutan/Amortisasi
Aset Lainnya
Rp121.893.230

C.3.3 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp121.893.230, yaitu berupa amortisasi *software* dan penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan. Rincian Akumulasi Amortisasi/Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dijelaskan dalam Tabel 39.

Tabel 39
Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya
per 31 Desember 2023
(dalam Rupiah)

Aset Lainnya	Nilai per 31 Desember 2023	Akumulasi Amortisasi/ Penyusutan	Nilai Buku per 31 Desember 2023
Aset Tak Berwujud	94.420.730	94.420.730	-
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	189.685.360	-	189.685.360
Aset Lain-Lain	27.472.500	27.472.500	-
Jumlah Aset Lainnya	311.578.590	121.893.230	189.685.360

KEWAJIBAN

Kewajiban Jangka
Pendek Rp380.754.316

C.4 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Nilai Kewajiban Jangka Pendek Pusdiklat APU PPT per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp380.754.316 dan Rp160.609.890. Terdapat peningkatan kewajiban jangka pendek sebesar Rp220.144.426 atau 137,07%. Rincian Kewajiban Jangka Pendek dijelaskan dalam Tabel 40.

Tabel 40
Perbandingan Rincian Kewajiban Jangka Pendek
per 31 Desember 2023 dan 2022
(dalam Rupiah)

No.	Kewajiban Jangka Pendek	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
1	Utang Kepada Pihak Ketiga	380.754.316	160.609.890	220.144.426	137,07
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	380.754.316	160.609.890	220.144.426	137,07

Utang Kepada Pihak
Ketiga Rp380.754.316

C.4.1 Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 bulan. Terdapat peningkatan Utang kepada Pihak Ketiga sebesar Rp220.144.426 atau 137,07%. Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp380.754.316 dan Rp160.609.890. Rincian Utang kepada Pihak Ketiga dijelaskan dalam Tabel 41.

Tabel 41
Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga
per 31 Desember 2023
(dalam Rupiah)

Kode Akun	Uraian	Jumlah
212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	2.240.000
212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	188.828.956
212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	189.685.360
	Utang Kepada Pihak Ketiga	380.754.316

Terdapat Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.240.000 dikarenakan SP2D pembayaran kekurangan gaji PNS bulan November dan Desember Tahun 2023 atas peningkatan jabatan fungsional dua PNS di 2024.

Terdapat Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2023 sebesar Rp188.828.956 dijelaskan dalam Tabel 42 dikarenakan SP2D pembayaran tagihan internet, telepon, dan listrik bulan Desember 2023 terbit pada periode Januari 2024.

Tabel 42
Rincian Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar
per 31 Desember 2023
(dalam Rupiah)

No	Kode Akun	No Dokumen	Tanggal Dok	Uraian	Nilai (Rp)
1	522119	150487280121	09/01/2024	Jurnal beban internet Ciloto Desember 2023 tagihan Januari 2024	374.850
2	522113	001/Pemasaran/I/2024	03/01/2024	Jurnal beban langganan air Pusdiklat Desember 2023 tagihan Januari 2024	2.383.000
3	522112	88836453532001000010202401	-	Jurnal beban telepon Telkom Pusdiklat Desember 2023 tagihan Januari 2024	537.628
4	522112	SPBY KKP 00006	12/01/2024	Jurnal beban telepon kartu halo Satpam Desember 2023 tagihan Januari 2024	113.000
5	522112	IVR/20240104/XXI V/II/1892287155	04/01/2024	Jurnal beban telepon kartu halo RT Desember 2023 tagihan Januari 2024	176.998
6	522112	SPBY KKP 00007	12/01/2024	Jurnal beban telepon kartu halo Humas Desember 2023 tagihan Januari 2024	113.000
7	522111	SPM 00017A	09/01/2024	Beban listrik Gedung Ciloto Desember 2023 tagihan Januari 2024	22.528.756
8	522111	SPM 00018A	09/01/2024	Beban listrik Gedung Ciloto Desember 2023 tagihan Januari 2024	162.601.724
Total					188.828.956

Terdapat Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp189.685.360 dijelaskan dalam Tabel 43.

Tabel 43
Rincian Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya
per 31 Desember 2023
(dalam Rupiah)

No Dok	Tanggal Dok	Uraian	Jumlah
00549A	21/12/2023	Pengisian RPATA Kontrak Nomor PO-026/PL.02/VII/2023 untuk Pengadaan Langganan Layanan Internet Semester II TA 2023	68.500.000
00548A	21/12/2023	Pengisian RPATA Kontrak Nomor SPK-052/PL.02/X/2023 untuk Pengadaan Pemeliharaan Chiller dan FCU pada TA 2023	53.280.000
00547A	21/12/2023	Pengisian RPATA Kontrak Nomor PO-014/PL.02/III/2023 untuk Pengadaan Jasa Pemeliharaan AC Presisi termin III TA 2023	32.190.000
00546A	21/12/2023	Pengisian RPATA Kontrak Nomor SPK-001/PL.02/II/2023 untuk Pengadaan Jasa Pemeliharaan Elevator Termin III TA 2023	16.849.800
00542A	21/12/2023	Pengisian RPATA Kontrak Nomor PO-022/PL.03.03/XII/2022 untuk Pengadaan Sewa Mesin Printer Warna dan Mesin Fotokopi Digital Termin ke XII TA 2023	7.770.000
00551A	22/12/2023	Pengisian Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran atas Kontrak Nomor PO-002/PL.02/II/2023 untuk Pengadaan Jasa Hygiene Service dan Pest Control Termin XII TA 2023	11.095.560
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya			189.685.360

Terdapat Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya sebesar Rp189.685.360 dikarenakan SP2D terbit pada periode Januari 2024 atas pembayaran RPATA terkait pengadaan dengan BAST 31 Desember 2023.

EKUITAS

Ekuitas
Rp129.492.050.655

C.5 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp129.492.050.655 dan Rp130.996.501.002. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas dijelaskan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) merupakan laporan yang menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO.

*Pendapatan Negara
Bukan Pajak*
Rp360.858.465

D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp360.858.465 dan Rp161.213.194, maka terjadi peningkatan sebesar 123,84% berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya tersebut terdiri dari Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi, yaitu berupa penggunaan kamar asrama untuk pelatihan sebesar Rp72.000.000, Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan sebesar Rp288.800.000, yaitu berupa Pembayaran Pelatihan di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT Tingkat Lanjutan bagi Pegawai PT Bank Sahabat Sampoerna, PT Pegadaian, dan PT Bank Syariah Indonesia, serta Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah atas Pengadaan *Horizontal Filling Cabinet* berdasarkan SPM Nomor 00528A tanggal 14 Desember 2023 sebesar Rp58.465. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak dijelaskan dalam Tabel 44.

Tabel 44
Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023
(dalam Rupiah)

Akun	Pendapatan Negara Bukan Pajak	31 Desember 2023
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	72.000.000
	Penggunaan kamar asrama Twin Bed Pelatihan PT Bank Sahabat Sampoerna 8 s.d. 9 Juni 2023	4.800.000
	Penggunaan kamar asrama Twin Bed Pelatihan PT Pegadaian 2 s.d. 4 Oktober 2023	27.200.000
	Penggunaan kamar asrama Twin Bed Pelatihan PT Bank Syariah Indonesia sesuai PKS Nomor NK-196/1.02/PPATK/10/2023	40.000.000
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	288.800.000
	Pembayaran Pelatihan di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT Tingkat Lanjutan Bagi Pegawai PT Bank Sahabat Sampoerna	59.280.000
	Pembayaran Pelatihan PT Pegadaian 2 s.d. 4 Oktober 2023	77.520.000
	Pembayaran Pelatihan PT Bank Syariah Indonesia sesuai PKS Nomor NK-196/1.02/PPATK/10/2023	152.000.000
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah atas Pengadaan Horizontal Filling Cabinet berdasarkan SPM Nomor 00528A tanggal 14 Desember 2023	58.465
	Pendapatan Negara Bukan Pajak	360.858.465

Beban Operasional
Rp29.596.075.546

D.2 Beban Operasional

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi dan/atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang mengakibatkan penurunan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atas konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban operasional merupakan beban yang dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan operasional entitas.

Beban Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp29.596.075.546 dan Rp27.746.580.621. Saldo tersebut naik sebesar Rp2.019.587.178 atau sebesar 7,28% dari tahun sebelumnya. Perbandingan Rincian Beban Operasional dapat dilihat dalam rincian Tabel 45 berikut ini.

Tabel 45
Perbandingan Rincian Beban Operasional
untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022
(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)	
			Rp	%
Beban Pegawai	13.291.977.135	12.243.984.119	1.047.993.016	8,56
Beban Persediaan	756.905.263	630.177.127	126.728.136	20,11
Beban Barang dan Jasa	8.140.927.867	7.235.845.159	905.082.708	12,51
Beban Pemeliharaan	2.088.615.481	2.639.225.449	(550.609.968)	(20,86)
Beban Perjalanan Dinas	1.742.302.521	862.148.517	880.154.004	102,09
Beban Penyusutan dan Amortisasi	3.575.347.279	3.965.107.997	(389.760.718)	(9,83)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-	170.092.253	(170.092.253)	(100,00)
Jumlah Beban Operasional	29.596.075.546	27.746.580.621	2.019.587.178	7,28

Beban Pegawai
Rp13.291.977.135

D.2.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Beban Pegawai Pusdiklat APU PPT untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp13.291.977.135 dan Rp12.243.984.119. Saldo Beban Pegawai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp1.047.993.016 atau sebesar 8,56% dari tahun sebelumnya. Perbandingan Rincian Beban Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 dijelaskan Tabel 46.

Tabel 46
Perbandingan Rincian Beban Pegawai
untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022
(dalam Rupiah)

Kode Akun	Nama Akun	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
511111	Beban Gaji Pokok PNS	1.351.873.400	1.356.308.020	(4.434.620)	(0,33)
511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	17.004	21.283	(4.279)	(20,11)
511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	93.922.410	93.315.260	607.150	0,65
511122	Beban Tunj. Anak PNS	29.046.732	27.554.818	1.491.914	5,41
511123	Beban Tunj. Struktural PNS	63.140.000	82.400.000	(19.260.000)	(23,37)
511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	181.140.000	169.484.000	11.656.000	6,88
511125	Beban Tunj. PPh PNS	7.473.390	8.715.008	(1.241.618)	(14,25)
511126	Beban Tunj. Beras PNS	81.979.440	81.110.400	869.040	1,07
511129	Beban Uang Makan PNS	220.519.000	257.244.000	(36.725.000)	(14,28)

Kode Akun	Nama Akun	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
511151	Beban Tunjangan Umum PNS	26.780.000	30.990.000	(4.210.000)	(13,59)
511611	Beban Gaji Pokok PPPK	194.682.500	-	194.682.500	100,00
511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	2.490	-	2.490	100,00
511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	16.501.750	-	16.501.750	100,00
511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	3.597.000	-	3.597.000	100,00
511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	32.145.000	-	32.145.000	100,00
511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	13.252.860	-	13.252.860	100,00
511628	Beban Uang Makan PPPK	44.997.000	-	44.997.000	100,00
512111	Beban Uang Honor Tetap	1.203.533.135	1.527.612.105	(324.078.970)	(21,21)
512211	Beban Uang Lembur	83.060.000	95.270.000	(12.210.000)	(12,82)
512212	Beban Uang Lembur PPPK	4.254.000	-	4.254.000	100,00
512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	8.707.559.529	8.523.607.129	183.952.400	2,16
512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	932.500.495	-	932.500.495	100,00
Total Beban Pegawai Bruto		13.291.977.135	12.253.632.023	1.034.091.112	8,44
Pengembalian Beban		-	9.647.904	(9.647.904)	(100,00)
Total Beban Pegawai Netto		13.291.977.135	12.243.984.119	1.047.993.016	8,56

Peningkatan Beban Pegawai tersebut disebabkan, sebagai berikut:

- Peningkatan Beban Tunjangan Suami/Istri PNS dikarenakan terdapat PNS yang memiliki suami/istri mengalami perubahan status kepegawaian (peningkatan gaji berkala dan pangkat);
- Peningkatan Beban Tunjangan Anak PNS dikarenakan terdapat PNS mengalami perubahan status kepegawaian (memiliki anak, peningkatan gaji berkala dan pangkat);
- Peningkatan Beban Tunjangan Fungsional PNS dikarenakan terdapat PNS yg beralih menjadi pejabat fungsional;
- Peningkatan Beban Tunjangan Beras PNS dikarenakan terdapat PNS yang mempunyai penambahan anggota keluarga (memiliki istri atau anak);
- Peningkatan Beban Gaji Pokok PPPK dikarenakan terdapat pengangkatan PPPK;
- Peningkatan Beban Pembulatan Gaji PPPK dikarenakan terdapat pengangkatan PPPK;
- Peningkatan Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK dikarenakan terdapat pengangkatan PPPK (sudah menikah);
- Peningkatan Beban Tunjangan Anak PPPK dikarenakan terdapat pengangkatan PPPK (sudah memiliki anak);
- Peningkatan Beban Tunjangan Fungsional PPPK dikarenakan terdapat pengangkatan PPPK;
- Peningkatan Beban Tunjangan Beras PPPK dikarenakan terdapat pengangkatan PPPK;
- Peningkatan Beban Uang Makan PPPK dikarenakan terdapat pengangkatan PPPK;
- Peningkatan Beban Uang Lembur PPPK dikarenakan terdapat kegiatan lembur PPPK;
- Peningkatan Beban Pegawai (Tunjangan Khusus) dikarenakan terdapat PNS mengalami perubahan status kepegawaian (peningkatan pangkat dan golongan) dan terdapat PNS yang beralih menjadi jabatan fungsional; dan
- Peningkatan Beban Pegawai Tunjangan Khusus PPPK dikarenakan terdapat pengangkatan PPPK.

Terdapat penurunan pada beberapa akun Beban Pegawai disebabkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Penurunan Beban Gaji Pokok PNS dikarenakan terdapat penurunan jumlah PNS (mutasi satu PNS ke satker PPATK) dan penurunan PNS yang mengalami perubahan status kepegawaian PNS (peningkatan gaji berkala dan pangkat) lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya;
- b. Penurunan Beban Pembulatan Gaji PNS dikarenakan perubahan jumlah PNS dan pegawai yang mengalami perubahan status kepegawaian PNS (peningkatan gaji berkala dan pangkat) berdasarkan hasil perhitungan aplikasi GPP saat memproses pembayaran;
- c. Penurunan Beban Tunjangan Struktural PNS dikarenakan terdapat pejabat struktural yang mutasi ke satker PPATK;
- d. Penurunan Beban Tunjangan PPh PNS dikarenakan terdapat penurunan jumlah PNS dan pegawai yang mengalami perubahan status kepegawaian PNS (peningkatan gaji berkala dan pangkat);
- e. Penurunan Beban Uang Makan PNS dikarenakan terdapat peningkatan kegiatan maupun rapat secara tatap muka sehingga pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas dengan uang harian, tidak memperoleh uang makan;
- f. Penurunan Beban Tunjangan Umum PNS dikarenakan terdapat PNS (pelaksana) yang mengalami perubahan status kepegawaian PNS (peningkatan pangkat golongan);
- g. Penurunan Beban Uang Honor Tetap dikarenakan terdapat penurunan jumlah PPNP 51 (Dokter, Tenaga Medis, dan Pengelola Dokumentasi); dan
- h. Penurunan Beban Uang Lembur dikarenakan terdapat penurunan kegiatan lembur PNS dan PPNP 51 (Teknisi dan Pengelola Dokumentasi).

Beban Persediaan
Rp756.905.263

D.2.2 Beban Persediaan

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp756.905.263 dan Rp630.177.127. Saldo tersebut naik sebesar Rp126.728.136 atau sebesar 20,11% dari tahun sebelumnya.

Peningkatan Beban Persediaan tersebut dikarenakan terdapat peningkatan pemakaian persediaan bahan baku berupa bahan kimia cair (cairan pembersih serangga) dan persediaan konsumsi berupa persediaan pelatihan untuk kegiatan pelatihan (*lanyard* dan *card holder*, *diklat kit*, *seminar kit*, dan *souvenir diklat*), persediaan ATK (baterai, kertas HVS, *box arsip*, dan *toner printer*), Amenitis Asrama, plakat, dan materai.

Terdapat penurunan pada beban persediaan lainnya dikarenakan terdapat pembelian/pengadaan obat-obatan klinik. Perbandingan Rincian Beban Persediaan untuk periode yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 dijelaskan dalam Tabel 47.

Tabel 47
Perbandingan Rincian Beban Persediaan
untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(dalam Rupiah)

Kode Akun	Nama Akun	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
593111	Beban Persediaan konsumsi	695.006.906	547.771.974	147.234.932	26,88
593131	Beban Persediaan bahan baku	9.323.334	7.956.706	1.366.628	17,18
593149	Beban Persediaan Lainnya	52.575.023	74.448.447	(21.873.424)	(29,38)
Total Beban Persediaan		756.905.263	630.177.127	126.728.136	20,11

Beban Barang dan Jasa
Rp8.140.927.867

D.2.3 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang dan jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp8.140.927.867 dan Rp7.235.845.159. Saldo tersebut naik sebesar Rp905.082.708 atau sebesar 12,51%. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 dijelaskan dalam Tabel 48.

Tabel 48
Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa
untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(dalam Rupiah)

Kode Akun	Nama Akun	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
	Beban Barang				
521111	Beban Keperluan Perkantoran	3.404.768.939	3.181.258.902	223.510.037	7,03
521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	5.736.206	4.225.420	1.510.786	35,75
521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	13.080.000	8.502.000	4.578.000	53,85
521119	Beban Barang Operasional Lainnya	336.294.332	246.581.000	89.713.332	36,38
521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	194.666.267	(194.666.267)	(100,00)
521211	Beban Bahan	835.575.414	734.856.007	100.719.407	13,71
521213	Beban Honor Output Kegiatan	335.000.000	264.000.000	71.000.000	26,89
521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	39.274.351	25.181.000	14.093.351	55,97
	Beban Jasa				
522111	Beban Langganan Listrik	1.994.811.702	1.637.203.480	357.608.222	21,84
522112	Beban Langganan Telepon	9.937.713	9.455.018	482.695	5,11
522113	Beban Langganan Air	2.383.000	-	2.383.000	100,00
522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	209.777.853	175.778.866	33.998.987	19,34
522131	Beban Jasa Konsultan	-	4.922.500	(4.922.500)	(100,00)
522141	Beban Sewa	337.227.807	301.167.999	36.059.808	11,97
522151	Beban Jasa Profesi	58.850.000	75.400.000	(16.550.000)	(21,95)
522191	Beban Jasa Lainnya	558.210.550	297.530.000	260.680.550	87,61
522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	-	75.241.400	(75.241.400)	(100,00)
Total Beban Barang dan Jasa Bruto		8.140.927.867	7.235.969.859	904.958.008	12,51
	Pengembalian Beban	-	124.700	(124.700)	(100,00)
Total Beban Barang dan Jasa Netto		8.140.927.867	7.235.845.159	905.082.708	12,51

Peningkatan realisasi Beban Barang dan Jasa tahun 2023 disebabkan sebagai berikut:

- a. Peningkatan Beban Keperluan Perkantoran dikarenakan terdapat pengadaan pakaian dinas ASN (KORPRI) dan Pakaian Dinas Tenaga Penunjang; peningkatan jumlah PPNPN 52 (Pramubakti dan Pengemudi); peningkatan pembelian air minum, kopi, susu, gula, dan teh dikarenakan peningkatan jumlah pegawai, kegiatan pelatihan, dan rapat di lingkungan Pusdiklat APU PPT; pengisian *etoll*; pembelian *microphone*, *box container*, pembelian jamuan tamu/pimpinan/Eselon I, linen kantor (taplak meja makan dan sarung kursi), pemenuhan asrama (gantungan baju, alas duduk, kain sofa asrama, dan sandal asrama), pembelian *bartender set stainless*, mesin penggiling kopi, *electric cooker*, dan troli; *laundry* perlengkapan asrama dan biaya materai KKP; serta pembelian kebutuhan operasional klinik; pembelian lampu *emergency*, set pisau dapur, papan; timbangan *digital*, jam dinding, kotak kunci;
- b. Peningkatan Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat dikarenakan terdapat peningkatan pengiriman surat dinas terkait pelatihan dan perkantoran;
- c. Peningkatan Beban Honor Operasional Satuan Kerja dikarenakan terdapat pergantian Bendahara Pengeluaran dengan status kepegawaian sebagai Pelaksana (bukan jabatan fungsional) sehingga honor pembayaran Bendahara Pengeluaran dibayarkan *full* sesuai SBM;
- d. Peningkatan Beban Barang Operasional Lainnya dikarenakan terdapat peningkatan lembur PPNPN atas peningkatan kegiatan pelatihan dan kegiatan di Pusdiklat APU PPT, pembelian keperluan standar pelayanan publik (tempat nama *stainless*, tiang antrian, hiasan dinding, hiasan bunga, peralatan makan, kursi dan meja makan, peralatan olahraga, karpet, mukena mushalla, dan rak tanaman), dan pembayaran pengangkutan sampah dan pengelolaan limbah medis;
- e. Peningkatan Beban Bahan dikarenakan terdapat peningkatan pembelian konsumsi rapat, pelatihan, dan seminar, pembuatan plakat, pembelian alat peraga pelatihan (spanduk, *banner*, dan kertas sertifikat pelatihan), amplop kalender, dan pembelian bendera Komite TPPU;
- f. Peningkatan Beban Honor *Output* Kegiatan dikarenakan terdapat peningkatan honorarium narasumber/penceramah dan pengajar pelatihan, serta Honor Tim Penyusun Kurikulum, Modul, Bahan Ajar Program Pelatihan, dan Media Rekaman Pembelajaran;
- g. Peningkatan Beban Barang Non Operasional Lainnya dikarenakan terdapat peningkatan *laundry* pakaian peserta pelatihan, pengadaan bendera Merah Putih, pengadaan umbul-umbul ASEAN dan HUT PPATK, pembelian tiang bendera patakan set, serta pembelian obat kebutuhan peserta pelatihan;

- h. Peningkatan Beban Langganan Listrik dikarenakan terdapat peningkatan penggunaan listrik Gedung kantor dan kamar asrama atas peningkatan kegiatan pelatihan tatap muka, rapat, dan kegiatan di Pusdiklat APU PPT;
- i. Peningkatan Beban Langganan Telepon dikarenakan terdapat peningkatan penggunaan telepon dan penambahan biaya telepon pasca bayar untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pelatihan, bagian Humas, Rumah Tangga, dan bagian pos pengamanan;
- j. Peningkatan Beban Langganan Air dikarenakan terdapat pembebanan pemakaian langganan air bulan Desember 2023 yang dibayarkan di bulan Januari 2024;
- k. Peningkatan Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya dikarenakan terdapat pembebanan Langganan Lisensi *Software* Manajemen Perkantoran (*cloud storage google drive, template* lisensi unit kegiatan pelatihan, aplikasi absensi pegawai Gedung Arsip Ciloto, aplikasi Canva, aplikasi *Articulate 360*, dan *software Heyzine*), langganan internet Pusdiklat APU PPT dan Gedung Arsip Ciloto, lisensi aplikasi *Video Conference*, langganan *filmora*, dan langganan WPS Pro;
- l. Peningkatan Beban Sewa terdapat kelebihan pemakaian sewa mesin *fotocopy* dan *printer* warna, terdapat penambahan sewa kendaraan operasional roda empat, terdapat sewa mini *garden* dalam rangka kegiatan seminar, terdapat sewa sofa dan meja kaca dalam rangka kegiatan seminar, sewa baju adat dalam rangka upacara HUT RI dan MC kegiatan seminar, sewa *genset* dalam rangka kegiatan seminar dan *joint training*, sewa LED vidiotron dalam rangka *joint training*, dan sewa AC *standing*; dan
- m. Peningkatan Jasa Lainnya dikarenakan terdapat jasa desain kalender, jasa pengangkutan barang dari/ke Pusdiklat APU PPT, Gedung Arsip Ciloto, dan PPATK, jasa penari kegiatan seminar, jasa pembuatan *company profile*, jasa pembuatan media/vidio pembelajaran, jasa pembuatan konten *e-Learning*, jasa pengiriman diklat kit, dan jasa Pembuatan *Teaser* Program Pelatihan.

Namun demikian, terdapat beberapa realisasi Beban Barang dan Jasa tahun 2023 yang mengalami penurunan, antara lain disebabkan hal-hal, sebagai berikut:

- a. Penurunan Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 dikarenakan penurunan pembelian barang-barang terkait COVID-19 dan tidak terdapat alokasi anggaran pada akun tersebut;
- b. Penurunan Beban Jasa Konsultan dikarenakan tidak terdapat pembebanan pada jasa konsultan di tahun 2023 sebagaimana di tahun 2022;
- c. Penurunan Beban Jasa Profesi dikarenakan terdapat penurunan kegiatan terkait narasumber kegiatan webinar, FGD, *workshop*, dan seminar; dan
- d. Penurunan Beban Jasa - Penanganan pandemi COVID-19 dikarenakan tidak terdapat alokasi anggaran pada tahun 2023 atas kegiatan *screening test* (*swab* PCR dan antigen) dan penyemprotan desinfektan.

Beban Pemeliharaan
Rp2.088.615.481

D.2.4 Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya dalam kondisi normal. Beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp2.088.615.481 dan Rp2.639.225.449. Saldo tersebut turun sebesar Rp550.609.968 atau sebesar 20,86% dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan terdapat penurunan Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, Beban Pemeliharaan Lainnya, serta Beban Persediaan suku cadang. Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 dijelaskan Tabel 49.

Tabel 49
Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan
untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(dalam Rupiah)

Kode Akun	Nama Akun	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	710.815.750	1.678.328.043	(967.512.293)	(57,65)
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.294.624.761	877.914.238	416.710.523	47,47
523199	Beban Pemeliharaan Lainnya	187.000	1.715.700	(1.528.700)	(89,10)
593113	Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	81.799.160	79.743.786	2.055.374	2,58
593114	Beban Persediaan suku cadang	1.188.810	1.523.682	(334.872)	(21,98)
	Total Beban Pemeliharaan Bruto	2.088.615.481	2.639.225.449	(550.609.968)	(20,86)
	Pengembalian Beban	-	-	-	100,00
	Total Beban Pemeliharaan Netto	2.088.615.481	2.639.225.449	(550.609.968)	(20,86)

Terdapat peningkatan realisasi Beban Pemeliharaan tahun 2023 disebabkan:

- Peningkatan Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin dikarenakan terdapat peningkatan pemakaian bahan bakar kendaraan dinas roda empat Eselon II, kendaraan dinas operasional roda dua, dan kendaraan roda empat operasional, pembelian penggantian suku cadang dan perbaikan kendaraan dinas roda empat Eselon II, biaya perawatan kendaraan dinas operasional roda dua dan roda empat, perawatan salon mobil kendaraan dinas Eselon II, pembelian *vaccum cleaner* mobil, pembelian kamera belakang mobil kendaraan dinas Eselon II, pembayaran perpanjangan pajak STNK kendaraan dinas operasional roda empat, pembelian kamera mundur kendaraan dinas Eselon II, *bracket* dan *Box Shad*, Pemeliharaan Trafo dan Panel Kelistrikan, Pemeliharaan STP dan Pompa-pompa, Pemeliharaan AC *Presisi* dan AC *Split*, pembelian Mekanikal Elektrikal Lainnya (pembelian suku cadang alat fitness, kabel dan komponen kelistrikan, baterai *laptop* dan kamera, kabel HDMI, *freon*, pembelian suku cadang dan pemeliharaan mesin kopi), perbaikan Mesin Presensi *Fingerprint*, perbaikan TV, isi ulang APAR, pembelian suku cadang dan pemeliharaan Elevator, pemeliharaan dan pembelian suku cadang *genset*, Pengadaan

Bahan Bakar Minyak *Genset*, pembelian bor dan mesin gerindra, penggantian Sensor Temperatur *Chiller*, pemeliharaan sistem tata udara, penggantian terminasi kubikal kelistrikan, penggantian pompa *blower* STP, penggantian pompa udara STP, penggantian *Power Module* dan *Static by Pass Switch* UPS, biaya pembuatan instalasi pipa solar di Gedung Arsip Ciloto, pemeliharaan dan pembelian suku cadang *Fire Alarm* dan *Fire Hydrant*, serta Perbaikan Mesin Pompa Sampit; dan

- b. Peningkatan Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan dikarenakan terdapat peningkatan pemakaian persediaan untuk pemeliharaan (pembersih lantai, piring, dan kaca, pengharum, kantong sampah, alat lap dan pel, serta sapu).

Terdapat penurunan realisasi Beban Pemeliharaan tahun 2023 disebabkan:

- a. Penurunan Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan dikarenakan penurunan terkait kegiatan pemeliharaan gedung bertingkat dan halaman gedung kantor (tidak terdapat transaksi yang lebih besar/konstruksi pemeliharaan gedung, sebagaimana tahun 2022 untuk pengecatan gedung dan pemeliharaan dak gedung), serta penurunan alokasi anggaran terkait pemeliharaan gedung;
- b. Penurunan Beban Pemeliharaan Lainnya dikarenakan penurunan kebutuhan biaya untuk pemeliharaan alat musik; dan
- c. Penurunan Beban Persediaan Suku Cadang dikarenakan terdapat peningkatan pembelian suku cadang alat-alat pemeliharaan gedung (kunci *ring*, *relay* pompa, dan *flaring* AC)

Beban Perjalanan Dinas
Rp1.742.302.521

D.2.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas adalah beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.742.302.521 dan Rp862.148.517. Saldo tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp880.154.004 atau sebesar 102,09% dari tahun sebelumnya. Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 dijelaskan dalam Tabel 50.

Tabel 50
Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas
untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(dalam Rupiah)

Kode Akun	Nama Akun	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.073.340.820	528.799.321	544.541.499	102,98
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	450.000	40.044	409.956	1.023,76
524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	668.511.701	333.309.152	335.202.549	100,57
Total Beban Perjalanan Dinas		1.742.302.521	862.148.517	880.154.004	102,09
	Pengembalian Beban	-	-	-	100,00
Total Beban Pemeliharaan Netto		1.742.302.521	862.148.517	880.154.004	102,09

Terdapat peningkatan Beban Perjalanan Dinas disebabkan sebagai berikut:

- Peningkatan Beban Perjalanan Dinas Biasa disebabkan terdapat peningkatan perjalanan dinas kegiatan pelatihan dan rapat secara tatap muka;
- Peningkatan Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota dikarenakan terdapat pembebanan biaya transportasi lokal kegiatan rapat; dan
- Peningkatan Beban Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Luar Kota dikarenakan terdapat peningkatan kegiatan pelatihan di luar kota (pelatihan penanganan TPPU bagi Apgakum di Medan dan bagi Penyidik di Bali) dan terdapat kegiatan FGD pengembangan *E-Learning* dan FGD Evaluasi Pelatihan di Bogor (pembayaran biaya akomodasi hotel, biaya transportasi, dan uang harian (peserta, pengajar, dan panitia).

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp3.575.347.279

D.2.6 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan, sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud. Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp3.575.347.279 dan Rp3.965.107.997. Terdapat penurunan sebesar Rp389.760.718 atau sebesar 9,83% karena penurunan Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan, Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin, serta Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah dikarenakan terdapat penghapusan Aset Tetap. Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 dijelaskan dalam Tabel 51.

Tabel 51
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(dalam Rupiah)

Kode Akun	Nama Akun	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.561.359.355	1.914.948.072	(353.588.717)	(18,46)
591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.982.680.508	2.013.420.503	(30.739.995)	(1,53)
591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	18.745.250	18.745.250	-	-
591313	Beban Penyusutan Jaringan	2.854.666	2.854.666	-	-
591411	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	9.707.500	9.707.500	-	-
592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	-	5.432.006	(5.432.006)	(100,00)
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi		3.575.347.279	3.965.107.997	(389.760.718)	(9,83)

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Rp0

D.2.7 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp0 dan Rp170.092.253. Penurunan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dikarenakan terdapat pelunasan

piutang negara a.n. CV. TPA atas pemeriksaan BPK terhadap kelebihan pembayaran Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Dak Asrama Pusdiklat APU PPT TA 2021 sebesar Rp141.326.540 dan Pengakuan Piutang Negara a.n. CV. KAK atas pemeriksaan BPK terhadap kelebihan pembayaran Pekerjaan Konstruksi Pembuatan Kanopi Lapangan Tennis Pusdiklat APU PPT TA 2021 sebesar Rp28.765.713 yang dikategorikan dalam kategori macet.

Defisit Pelepasan Aset
Non Lancar
Rp818.745.601

D.3 Surplus/Defisit dari Pelepasan Aset Non Lancar

Surplus/Defisit dari Pelepasan Aset Non Lancar terdiri dari pendapatan pelepasan aset non lancar dan beban kerugian pelepasan aset non lancar. Surplus/Defisit dari Pelepasan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah defisit sebesar Rp818.745.601 dan surplus sebesar Rp40.369.999. Defisit dari Pelepasan Aset Non Lancar pada 31 Desember 2023 merupakan selisih antara total Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp43.211.998 dan total Beban Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp861.957.599.

Pendapatan Pelepasan
Aset Non Lancar
Rp43.211.998

D.3.1 Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp43.211.998 dan Rp40.369.999. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 berupa Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar atas Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya dijelaskan Tabel 52.

Tabel 52
Rincian Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar
untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023
(dalam Rupiah)

Akun	Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	Jumlah
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	
	Hasil lelang material bongkaran bangunan kantor untuk pembangunan studio multimedia	5.081.000
	Hasil lelang material bongkaran bangunan kantor dikarenakan rusak berat	16.000.999
	Hasil lelang peralatan dan mesin dikarenakan kondisi rusak berat	22.129.999
	Total Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	43.211.998

Beban Pelepasan Aset
Non Lancar
Rp861.957.599

D.3.2 Beban Pelepasan Aset Non Lancar

Beban Pelepasan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp861.957.599 dan Rp0. Rincian Beban Pelepasan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 berupa Kerugian Pelepasan Aset sebesar Rp861.957.599 dijelaskan dalam Tabel 53.

Tabel 53
Rincian Beban Pelepasan Aset Non Lancar
untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023
(dalam Rupiah)

Akun	Beban Pelepasan Aset Non Lancar	Jumlah
596111	Beban Pelepasan Aset	
	Koreksi pencatatan nilai berkurang atas KDP (untuk mengakomodir biaya notaris dan biaya balik nama)	3.000.000
	Penghapusan Bangunan Gedung Kantor Permanen	371.935.500
	Akumulasi Penyusutan Penghapusan Bangunan Gedung Kantor Permanen	(26.035.485)
	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen NUP 1	346.685.440
	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen NUP 1	(29.822.856)
	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen NUP 2	195.000.000
	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen NUP 2	(9.750.000)
	Penghapusan Dua Unit Lemari Kayu NUP 72 dan 73	21.890.000
	Akumulasi Penyusutan Penghapusan Dua Unit Lemari Kayu NUP 72 dan 73	(10.945.000)
	Total Beban Pelepasan Aset Non Lancar	861.957.599

Defisit dari Kegiatan
Non Operasional
Lainnya Rp42.650.417

D.4 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Surplus (Defisit) dari kegiatan Non Operasional terdiri dari Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya dan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya atau pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah surplus sebesar Rp42.650.417 dan Rp210.133.813. dikarenakan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.

Pendapatan dari
Kegiatan Non
Operasional Lainnya
Rp42.650.417

D.4.1 Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya bersifat tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp42.650.417 dan Rp210.222.253. Rincian Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya dijelaskan Tabel 54.

Tabel 54
Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023
(dalam Rupiah)

Akun	Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Jumlah
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	12
	(Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu atas Kekurangan Gaji Bulan Desember 2022 untuk Tiga Pegawai 11 Jiwa)	12
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	42.650.405
	Pembayaran Termin Pertama - Pengembalian Kelebihan Pembayaran PT TC atas Pengadaan Pengecatan Pusdiklat APUPPT TA. 2022	8.732.035
	Pelunasan Piutang Negara CV. TPA atas Pemeliharaan Dak Asrama TA 2021	33.918.370
	Total Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	42.650.417

Beban dari Kegiatan
Non Operasional
Lainnya Rp0

D.4.2 Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya bersifat tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp0 dan Rp88.440. Penurunan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dikarenakan tidak terdapat Beban Persediaan Rusak/Usang sebagaimana tahun 2022 terdapat penghapusan persediaan obat-obatan yang telah kadaluarsa.

Defisit dari Kegiatan
Non Operasional
Rp776.095.184

D.5 Surplus /Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional diperoleh dari selisih antara pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah defisit sebesar Rp776.095.184 dan surplus sebesar Rp250.503.812. Defisit Kegiatan Non Operasional merupakan jumlah dari Defisit Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp818.745.601 dan surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp42.650.417.

Defisit Laporan
Operasional
Rp30.011.312.265

D.6 Surplus /Defisit Laporan Operasional

Nilai Surplus/Defisit Laporan Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah defisit sebesar Rp30.011.312.265 dan Rp27.334.863.615. Nilai tersebut diperoleh dari penjumlahan antara Defisit Kegiatan Operasional sebesar Rp29.265.810.309 dan Defisit Kegiatan Non Operasional sebesar Rp776.095.184.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih kementerian yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi peningkatan atau penurunan ekuitas pada satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Ekuitas Awal
Rp130.996.501.002

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas awal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp130.996.501.002 dan Rp100.483.260.004.

Defisit Laporan
Operasional
Rp30.011.312.265

E.2 Surplus/Defisit Laporan Operasional

Jumlah Surplus/Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah defisit sebesar Rp30.011.312.265 dan Rp27.334.863.615. Defisit LO merupakan

penjumlahan antara defisit kegiatan operasional sebesar Rp29.265.810.309 dan defisit kegiatan non operasional sebesar Rp776.095.184.

Koreksi yang
Menambah Ekuitas
Rp3.000.001

E.3 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah koreksi kurang sebesar Rp3.000.001 dan Rp43.360.446. Koreksi yang Mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah berupa Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi sebesar koreksi tambah Rp3.000.001 dan Rp43.360.446.

Koreksi Nilai Aset Tetap
Non Revaluasi
Rp3.000.001

E.3.1 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan perolehan aset tetap, misalnya reklasifikasi antar Aset Tetap yang menyebabkan perubahan penyusutan karena perbedaan masa manfaat Aset Tetap. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp3.000.001 dan Rp43.360.446 dijelaskan dalam Tabel 55.

Tabel 55
Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi
untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023
(dalam Rupiah)

Akun	KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	Jumlah
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	
	Koreksi pencatatan nilai berkurang atas KDP (untuk mengakomodir biaya notaris dan biaya balik nama)	3.000.000
	Koreksi penyesuaian selisih Rp1 dikarenakan selisih perbaikan revaluasi aset tahun anggaran yang lalu	1
	Total Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	3.000.001

Transaksi Antar Entitas
Rp28.503.861.917

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp28.503.861.917 dan Rp57.804.744.167. Rincian Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 dijelaskan Tabel 56.

Tabel 56
Rincian Transaksi Antar Entitas
untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022
(dalam Rupiah)

Kode Akun	Nama Akun	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
313111	Ditagikan ke Entitas Lain	28.950.582.797	24.492.921.781	4.457.661.016	18,20
313121	Diterima dari Entitas Lain	(446.720.880)	(241.713.193)	(205.007.687)	84,81
313221	Transfer Masuk	-	33.553.535.579	(33.553.535.579)	(100,00)
Total Transaksi Antar Entitas		28.503.861.917	57.804.744.167	(29.300.882.250)	(50,69)

Ditagihkan ke Entitas
Lain Rp28.950.582.797

E.4.1 Ditagihkan ke Entitas Lain

Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar-entitas atas belanja Pusdiklat APU PPT yang melibatkan kas negara/Bendahara Umum Negara (BUN). Ditagihkan ke Entitas Lain untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp28.950.582.797 dan Rp24.492.921.781. Transaksi Ditagihkan ke Entitas Lain, antara lain Pembayaran Perjalanan Dinas Peserta Pelatihan, Pembayaran Perjalanan Dinas Pegawai, Pembayaran Jasa Layanan Internet, Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, Pengadaan pakaian dinas ASN (KORPRI) dan Pakaian Dinas Tenaga Penunjang; pembayaran Penghasilan Induk PPNN; pembelian air minum, kopi, susu, gula, dan teh; pengisian *etoll*; pembelian *microphone*, *box container*, pembelian jamuan tamu/pimpinan/Eselon I, linen kantor (taplak meja makan dan sarung kursi), pemenuhan asrama (gantungan baju, alas duduk, kain sofa asrama, dan sandal asrama), pembelian *bartender set stainless*, mesin penggiling kopi, *electric cooker*, dan troli; *laundry* perlengkapan asrama dan biaya materai KKP; pembelian kebutuhan operasional klinik; pembelian lampu *emergency*, set pisau dapur, papan; timbangan *digital*, jam dinding, kotak kunci, Pembayaran Honorarium Pengajar, pembayaran honorarium narasumber/penceramah dan pengajar pelatihan, serta pembayaran Honor Tim Penyusun Kurikulum, Modul, Bahan Ajar Program Pelatihan, dan Media Rekaman Pembelajaran, Pembelian Keperluan Sehari-Hari Perkantoran, Pengadaan Jasa *Hygiene Service* dan *Pest Control*, Pembelian Suku Cadang Perbaikan Elevator, Pengadaan Peralatan *Zoom*, Pembayaran Uang Lembur dan Uang Makan Lembur ASN dan PPNN, Pengadaan Persediaan Obat Klinik, Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Luar Kota (pelatihan penanganan TPPU Apgakum di Medan dan bagi Penyidik di Bali), berupa pembayaran biaya akomodasi hotel, biaya transportasi, dan uang harian (peserta, pengajar, dan panitia), biaya pemeliharaan gedung dan bangunan, pembayaran uang harian peserta pelatihan ToT, Pengadaan Jasa Akomodasi Hotel Kegiatan FGD Pengembangan *E-Learning* dan FGD Evaluasi Pelatihan di Bogor, Pengadaan AC *Standing*, Langganan Lisensi *Software* Manajemen Perkantoran (*cloud storage google drive*, *template* lisensi unit kegiatan pelatihan, aplikasi absensi pegawai Gedung Arsip Ciloto, aplikasi Canva, aplikasi *Articulate 360*, dan *software* Heyzine), langganan internet Pusdiklat APU PPT dan Gedung Arsip Ciloto, lisensi aplikasi *Video Conference*, langganan *filmora*, dan langganan WPS Pro, pembelian bahan bakar kendaraan dinas roda empat Eselon II, kendaraan dinas operasional roda dua, dan kendaraan roda empat operasional, pembelian penggantian suku cadang dan perbaikan kendaraan dinas roda empat Eselon II, biaya perawatan kendaraan dinas operasional roda dua dan roda empat, perawatan salon mobil kendaraan dinas Eselon II, pembelian *vaccum cleaner* mobil, pembelian kamera belakang mobil kendaraan dinas Eselon II, pembayaran perpanjangan pajak STNK kendaraan dinas operasional roda empat, pembelian kamera mundur kendaraan dinas Eselon II, *bracket* dan *Box Shad*, Pemeliharaan Trafo dan Panel Kelistrikan, Pemeliharaan

STP dan Pompa-pompa, Pemeliharaan AC *Presisi* dan AC *Split*, pembelian Mekanikal Elektrikal Lainnya (pembelian suku cadang alat fitnes, kabel dan komponen kelistrikan, baterai *laptop* dan kamera, kabel HDMI, *freon*, pembelian suku cadang dan pemeliharaan mesin kopi), perbaikan Mesin Presensi *Fingerprint*, perbaikan TV, isi ulang APAR, pembelian suku cadang dan pemeliharaan Elevator, pemeliharaan dan pembelian suku cadang *genset*, Pengadaan Bahan Bakar Minyak *Genset*, pembelian bor dan mesin gerindra, penggantian Sensor Temperatur *Chiller*, pemeliharaan sistem tata udara, penggantian terminasi kubikal kelistrikan, penggantian pompa *blower* STP, penggantian pompa udara STP, penggantian *Power Module* dan *Static by Pass Switch* UPS, biaya pembuatan instalasi pipa solar di Gedung Arsip Ciloto, pemeliharaan dan pembelian suku cadang *Fire Alarm* dan *Fire Hydrant*, serta Perbaikan Mesin Pompa Sampit; pengadaan diklat *kit*, pembelian perlengkapan pelatihan, *souvenir* diklat, ATK, *toner printer*, kalender, plakat, alat rumah tangga dan bahan kebersihan, amenitis asrama, materai, seminar *kit*, *box* arsip, buku saku UU PP TPPU dan TPPT, buku agenda dan *tote bag*, Modul Pelatihan, serta *Stopmap*, Pengadaan *Power Module*, Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas, Biaya Pengangkutan Sampah, Pembayaran Honor Bendahara Pengeluaran, Pengadaan Bahan Material Pembuatan Kanopi Dak Gedung Asrama, Pengadaan Konsumsi Pelatihan, sewa mesin printer warna dan mesin fotokopi *digital*, sewa kendaraan operasional roda empat, terdapat sewa mini *garden* dalam rangka kegiatan seminar, terdapat sewa sofa dan meja kaca dalam rangka kegiatan seminar, sewa baju adat dalam rangka upacara HUT RI dan MC kegiatan seminar, sewa *genset* dalam rangka kegiatan seminar dan *joint training*, sewa LED vidiotron dalam rangka *joint training*, dan sewa AC *standing*, Jasa Pemeliharaan *Elevator*, Gaji dan Uang Makan PNS dan PPPK, Pembayaran Kekurangan Tunjangan Khusus, Jasa Pemeliharaan *Genset*, biaya pengiriman diklat *kit* ke luar kota, Jasa Pemeliharaan STP dan Pompa-pompa, Jasa Pemeliharaan AC *Presisi*, Beban Listrik Gedung Pusdiklat dan Ciloto, pembayaran biaya langganan telepon, Gaji Susulan PPPK, Tunjangan Khusus PNS dan PPPK, konsumsi rapat, pelatihan, dan seminar, pembuatan plakat, pembelian alat peraga pelatihan (*spanduk*, *banner*, dan kertas sertifikat pelatihan), amplop kalender, dan pembelian bendera Komite TPPU, Pembelian Peralatan dan Mesin, Pengadaan Rumah, Biaya Notaris dan Balik Nama, pembelian keperluan standar pelayanan publik (tempat nama *stainless*, tiang antrian, hiasan dinding, hiasan bunga, peralatan makan, kursi dan meja makan, peralatan olahraga, karpet, mukena mushalla, dan rak tanaman), dan pembayaran pengangkutan sampah dan pengelolaan limbah medis, pembayaran *laundry* pakaian peserta pelatihan, pengadaan bendera Merah Putih, pengadaan umbul-umbul ASEAN dan HUT PPATK, pembelian tiang bendera patakan set, serta pembelian obat kebutuhan peserta pelatihan, pembayaran jasa desain kalender, jasa pengangkutan barang dari/ke Pusdiklat APU PPT, Gedung Arsip Ciloto, dan PPATK, jasa penari kegiatan seminar, jasa pembuatan *company profile*, jasa pembuatan media/vidio

pembelajaran, jasa pembuatan konten *e-Learning*, jasa pengiriman diklat *kit*, serta jasa Pembuatan *Teaser* Program Pelatihan.

Diterima dari Entitas
Lain Rp446.720.880

E.4.2 Diterima dari Entitas Lain

Diterima dari Entitas Lain merupakan transaksi antar-entitas atas pendapatan Pusdiklat APU PPT yang melibatkan kas negara/Bendahara Umum Negara (BUN). Diterima dari Entitas Lain untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp446.720.880 dan Rp241.713.193. Rincian Transaksi Diterima dari Entitas Lain dijelaskan dalam Tabel 57.

Tabel 57
Rincian Diterima dari Entitas Lain
untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2023
(dalam Rupiah)

Akun	Keterangan	Jumlah
313121	Diterima dari Entitas Lain	
	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu atas Kekurangan Gaji Bulan Desember 2022 untuk Tiga Pegawai 11 Jiwa	12
	Hasil lelang material bongkaran bangunan kantor untuk pembangunan studio multimedia	5.081.000
	Hasil lelang material bongkaran bangunan kantor dikarenakan rusak berat	16.000.999
	Hasil lelang peralatan dan mesin dikarenakan kondisi rusak berat	22.129.999
	Pembayaran Pelatihan di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT Tingkat Lanjutan Bagi Pegawai PT Bank Sahabat Sampoerna	59.280.000
	Pembayaran Pelatihan PT Pegadaian 2 s.d. 4 Oktober 2023	77.520.000
	Pembayaran Pelatihan PT Bank Syariah Indonesia	152.000.000
	Pelunasan Piutang Negara CV. TPA atas Pemeliharaan Dak Asrama TA 2021	33.918.370
	Pembayaran Termin Pertama - Pengembalian Kelebihan Pembayaran PT. TC atas Pengadaan Pengecatan Pusdiklat APUPPT TA 2022	8.732.035
	Penggunaan kamar asrama Pelatihan PT Bank Sahabat Sampoerna	4.800.000
	Penggunaan kamar asrama Pelatihan PT Pegadaian	27.200.000
	Penggunaan kamar asrama Pelatihan PT Bank Syariah Indonesia	40.000.000
	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah atas Pengadaan Horizontal Filling Cabinet	58.465
	Total Diterima dari Entitas Lain	446.720.880

Transfer Masuk Rp0

E.4.3 Transfer Masuk

Transfer masuk merupakan transaksi untuk mencatat penerimaan BMN dari entitas pelaporan lain berdasarkan BAST. Transfer masuk untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp33.553.535.579. Transfer masuk untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 bernilai Rp0 berupa transfer masuk peralatan dan mesin dari PPATK ke Pusdiklat APU PPT yang telah terdepresiasi penuh per 31 Desember 2023 sehingga bernilai Rp0. Transfer masuk tahun 2022 tersebut berupa tanah, bangunan, jalan, serta peralatan dan mesin Gedung Arsip Ciloto.

Ekuitas Akhir
Rp129.492.050.655

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp129.492.050.655 dan Rp130.996.501.002.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1 Capaian *Output* per Fungsi APBN

Pelaksanaan APBN pada PPATK dapat diklasifikasikan dalam satu fungsi, yaitu Pelayanan Umum. Rincian capaian *output* per fungsi APBN dijelaskan dalam Tabel 58.

Tabel 58
Rincian Capaian *Output* per Fungsi APBN Pelayanan Umum (01)
Tahun 2023

No	Kode RO	Uraian RO	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Target Volume RO	Realisasi Volume RO	Satuan	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	EBB951	Layanan Sarana Internal	1.418.574.000	1.416.613.873	99,86	174	176	Unit	100
2	EBA960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	94.754.000	91.842.419	96,93	1	1	Dokumen	100
3	EBA962	Layanan Umum	183.793.000	180.027.319	97,95	1	1	Layanan	100
4	EBD955	Layanan Manajemen Keuangan	41.700.000	39.752.244	95,33	2	2	Dokumen	100
5	DCF001	Pendidikan dan Pelatihan bagi Pihak Pelapor	2.238.186.000	2.233.157.773	99,78	1650	1691	Orang	100
6	EBB971	Layanan Prasarana Internal	1.445.000.000	1.439.988.520	99,65	5	5	Unit	100
7	EBA994	Layanan Perkantoran	13.337.121.000	13.295.500.210	99,69	1	1	Layanan	100
8	EBC954	Layanan Manajemen SDM	154.793.000	148.764.137	96,11	101	101	Orang	100
9	EBD961	Layanan Reformasi Kinerja	5.589.000	5.584.000	99,91	2	2	Laporan	100
10	EBD952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	18.420.000	17.395.870	94,44	3	3	Dokumen	100
11	SCF002	Pelatihan Bagi Aparat Penegak Hukum	1.383.720.000	1.383.699.461	100,00	460	534	Orang	100
12	EBA994	Layanan Perkantoran	8.725.687.000	8.711.499.122	99,84	1	1	Layanan	100

F.2 Program Prioritas Nasional

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, pada PPATK terdapat alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN), yaitu pada Prioritas Nasional VII Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik dari 7 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP. Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Target serta Realisasi Pencapaian Output dari PN VII - Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik dijelaskan dalam Tabel 59.

Tabel 59
Rincian PN VII - Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
Tahun 2023

No	Kode RO	Uraian RO	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Target Volume RO	Realisasi Volume RO	Satuan	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SCF002	Pelatihan Bagi Aparat Penegak Hukum	1.383.720.000	1.383.699.461	100,00%	460	534	Orang	116,09%

Dalam rangka upaya peningkatan kualitas informasi laporan keuangan sebagai bagian dari pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023, Pusdiklat APU PPT memiliki Prioritas Nasional pada tahun 2023, yaitu target peserta Pelatihan bagi Aparat Penegak Hukum Tahun 2023 sejumlah 460 orang peserta. Realisasi pencapaian *output* dari Prioritas Nasional sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sejumlah 534 orang peserta. Rincian Target dan Realisasi Pelatihan bagi Apgakum dijelaskan dalam Tabel 60.

Tabel 60
Rincian Target dan Realisasi Pelatihan bagi Apgakum
Tahun 2023
(dalam Rupiah)

No	Tanggal Pelaksanaan	Nama Obat bagi APKAKUM	Perencanaan		Realisasi	
			Total Peserta	Asal Instansi Peserta	Total Peserta	Asal Instansi Peserta
1	24 – 27 Jan	Pelatihan Penanganan TPPU Batch 1	50	Bareskrim Polri, BNN, BP2MI, BPH Migas, BPOM RI, Direktorat Jenderal Pajak, DISC, Kejaksaan RI, Kementerian ATR/BPN, KKP, PPATK	31	BPOM, PPATK, DISC, POLRI, KKP, BNNP, DIP, Kejaksaan RI, BP2MI, BP3MI Jakarta
2	21 – 24 Feb	Pelatihan Penanganan TPPU Batch 2	30	Bareskrim Polri, BNN, BP2MI, BPH Migas, BPOM RI, Direktorat Jenderal Pajak, DISC, Kejaksaan RI, Kementerian ATR/BPN, KKP, PPATK	37	Bareskrim Polri, BNN, BP2MI, BPH Migas, BPOM RI, Direktorat Jenderal Pajak, DISC, Kejaksaan RI, Kementerian ATR/BPN, KKP, PPATK
3	7 - 10 Mar	Pelatihan Penanganan TPPU (Medan)	30	Bareskrim Polri, BNN, BP2MI, BPH Migas, BPOM RI, Direktorat Jenderal Pajak, DISC, Kejaksaan RI, Kementerian ATR/BPN, KKP, PPATK	54	Bareskrim Polri, BNN, BP2MI, BPH Migas, BPOM RI, Direktorat Jenderal Pajak, DISC, Kejaksaan RI, Kementerian ATR/BPN, KKP, PPATK
4	3-14 Apr	Teknis Analisis TPPU Hasil Dari Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika (Joint Training)	30	BNN	40	BNN dan PPATK
5	9-11 May	Pemulihan Aset dari Kejahatan Kehutanan dan Lingkungan Hidup	30	BNN, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Penyidikan pada JAM Pidus, Ditirpidnarkoba Bareskrim Polri, Ditirpidnarkoba Bareskrim Polri, Ditirpidnarkoba Bareskrim Polri, Ditirpidnarkoba Bareskrim Polri, Ditirpidnarkoba Bareskrim Polri, Kantor Wilayah DIP D.I. Yogyakarta, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi, KP9BC Tipe Medya Pabean A Tangerang, KP9BC Tipe Medya Pabean C Kendari, KP9BC TMP B Kualanamu, KP9BC TMP C Tanjungpandan, PPATK	29	BNN, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Penyidikan pada JAM Pidus, Ditirpidnarkoba Bareskrim Polri, Ditirpidnarkoba Bareskrim Polri, Ditirpidnarkoba Bareskrim Polri, Ditirpidnarkoba Bareskrim Polri, Ditirpidnarkoba Bareskrim Polri, Kantor Wilayah DIP D.I. Yogyakarta, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi, KP9BC Tipe Medya Pabean A Tangerang, KP9BC Tipe Medya Pabean C Kendari, KP9BC TMP B Kualanamu, KP9BC TMP C Tanjungpandan, PPATK
6	9-11 May	Pemulihan Aset dari Kejahatan Transnasional	30	BNN, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Penyidikan pada JAM Pidus, Ditirpidnarkoba Bareskrim Polri, Ditirpidnarkoba Bareskrim Polri, Ditirpidnarkoba Bareskrim Polri, Ditirpidnarkoba Bareskrim Polri, Ditirpidnarkoba Bareskrim Polri, Kantor Wilayah DIP D.I. Yogyakarta, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi, KP9BC Tipe Medya Pabean A Tangerang, KP9BC Tipe Medya Pabean C Kendari, KP9BC TMP B Kualanamu, KP9BC TMP C Tanjungpandan, PPATK	33	BNN, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Penyidikan pada JAM Pidus, Ditirpidnarkoba Bareskrim Polri, Ditirpidnarkoba Bareskrim Polri, Ditirpidnarkoba Bareskrim Polri, Ditirpidnarkoba Bareskrim Polri, Ditirpidnarkoba Bareskrim Polri, Kantor Wilayah DIP D.I. Yogyakarta, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi, KP9BC Tipe Medya Pabean A Tangerang, KP9BC Tipe Medya Pabean C Kendari, KP9BC TMP B Kualanamu, KP9BC TMP C Tanjungpandan, PPATK
7	4-5 Juli	Investigasi Keuangan Batch 1	30	PPATK, Badan POM RI, Bappebti, Bareskrim Polri, BNN RI, BP2MI, Direktorat Jenderal Pajak, DIBC, Kejaksaan Agung, KKP, Otoritas Jasa Keuangan	33	BNN, BNNP, BPOM, Kejaksaan Agung, Diskrimus POLDA, Otriskrimus Polda Metro Jaya, Ditresnarkoba POLDA, PPATK, KKP, KLHK, DIP, DISC
8	14-16 Agustus	Penanganan TPPU Tingkat Lanjutan (Studi Kasus) Batch 1	30	Bareskrim Polri, BNN, BP2MI, BPH Migas, BPOM RI, Direktorat Jenderal Pajak, DISC, Kejaksaan RI, Kementerian ATR/BPN, KKP, PPATK	28	BNN, BNNP, BPOM, Kejaksaan Agung, Diskrimus POLDA, Otriskrimus Polda Metro Jaya, Ditresnarkoba POLDA, PPATK, KKP, KLHK, DIP, DISC
9	22 - 24 Agustus	Investigasi Keuangan Batch 2	30	PPATK, Badan POM RI, Bappebti, Bareskrim Polri, BNN RI, BP2MI, Direktorat Jenderal Pajak, DISC, Kejaksaan Agung, KKP, Otoritas Jasa Keuangan	34	BNN, BNNP, BPOM, Kejaksaan Agung, Diskrimus POLDA, Otriskrimus Polda Metro Jaya, Ditresnarkoba POLDA, PPATK, KKP, KLHK, DIP, DISC
10	4 - 8 September	Penanganan TPPU bagi Penyidik Batch IV (Bali)	30	Bareskrim Polri, BNN, BP2MI, BPH Migas, BPOM RI, Direktorat Jenderal Pajak, DISC, Kejaksaan RI, Kementerian ATR/BPN, KKP, PPATK	63	BNN, DIP, KKP, KEJAKSAAN TIMING, DISC, POLDA, BAPPENAS, KEJAKSAAN NEGERI, BPOM, POLRESTA, DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI, BP2MI
11	9 - 13 oktober	Pemeriksaan Perkara TPPU bagi Hakim Batch I	35	Hakim MA	30	Hakim MA
12	17 - 19 Oktober	Pemulihan Aset dari Kejahatan Transnasional Batch 2	35	Badan Pengawas Obat dan Makanan, Bappebti, Bareskrim Polri, BNN, BP2MI, BPH Migas, Direktorat Hukum dan Regulasi, Bappenas, Direktorat Intelijen Peradilan, Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Pajak, DISC, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kementerian ATR/BPN, Otoritas Jasa Keuangan, Pengkalan PSDKP Tual Ditjen PSDKP	32	Bareskrim Polri, Jampidit Kejaksaan Agung, KKP, BNN, DIP, DISC, KKP
13	23 - 27 Oktober	Pemeriksaan Perkara TPPU bagi Hakim Batch II	35	Hakim MA	28	Hakim MA
14	24 - 27 Oktober	Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Penyidik TPPU terkait TPPU Kehutanan	35	Bareskrim Polri, BNN, BP2MI, BPH Migas, BPOM RI, Direktorat Jenderal Pajak, DISC, Kejaksaan RI, Kementerian ATR/BPN, KKP, PPATK	36	Bareskrim Polri, Kejaksaan Agung, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Bea Cukai, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan BP2MI, Kejaksaan Agung (Jempidum), Kejati DKI, Kejati Jabar, KPPIA, Polres Jakarta Barat, Polres Jakarta Pusat, Polres Jakarta Selatan, Polres Jakarta Timur, Polres Jakarta Utara, Polres Kabupaten Bogor, Polres Kota Bekasi, Polres Kota Bogor, Polres Kota Depok, Polres Tangerang, Polres Tangsel, PPATK, Reskrimus Polda Jabar, Reskrimus Polda Metro Jaya
15	14 - 17 November	Penanganan TPPU Terkait dan TPPU	20	Bareskrim Polri, BNN, BP2MI, BPH Migas, BPOM RI, Direktorat Jenderal Pajak, DISC, Kejaksaan RI, Kementerian ATR/BPN, KKP, PPATK	26	Total Peserta
		Total Peserta	460	Total Peserta	534	Total Peserta

Depok, 6 Mei 2024

Kepala

Pusat Pendidikan dan Pelatihan APU PPT, ✈.

Akhyar Effendi

Lampiran

A



**NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023**

**PUSDIKLAT ANTI PENCUCIAN UANG
DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME
DEPOK, JAWA BARAT**

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (078) PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (01) PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT

**SATUAN KERJA : (417654) PUSDIKLAT ANTI PENCUCIAN UANG DAN
PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME**

Tgl Data : 06/05/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 06/05/24 8:24 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	28,950,582,797
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	446,720,880	0
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	43,211,998
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	72,000,000
3.0	425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	0	288,800,000
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	58,465
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	12
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	42,650,405
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1,352,189,900	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	17,347	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	93,954,060	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	29,057,476	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	63,140,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	178,900,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	7,473,390	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	81,979,440	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	220,519,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	29,740,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	194,682,500	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2,490	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	16,501,750	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	3,597,000	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	32,145,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	13,252,860	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	44,997,000	0
3.0	512111	Belanja Uang Honor Tetap	1,203,533,135	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	83,060,000	0
3.0	512212	Belanja Uang Lembur PPPK	4,254,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	8,707,559,529	0
3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	934,944,333	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	3,407,181,439	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	5,736,206	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	13,080,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	336,352,032	0
3.0	521211	Belanja Bahan	835,575,414	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	335,000,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	39,274,351	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (078) PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (01) PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT

SATUAN KERJA : (417654) PUSDIKLAT ANTI PENCUCIAN UANG DAN
PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

Tgl Data : 06/05/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 06/05/24 8:24 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	867,593,105	0
3.0	521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	74,001,424	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	1,968,421,323	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	9,868,080	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	213,915,419	0
3.0	522141	Belanja Sewa	335,365,170	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	58,850,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	558,210,550	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	710,815,750	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,299,048,561	0
3.0	523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	187,000	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,074,284,820	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	450,000	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	668,511,701	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,416,613,873	0
3.0	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1,372,995,000	0
3.0	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	66,993,520	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	313
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	2,960,000
3.1	512414	Pengembalian Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	0	2,443,838
3.1	521111	Pengembalian Belanja Keperluan Perkantoran	0	2,412,500
3.1	521119	Pengembalian Belanja Barang Operasional Lainnya	0	57,700
3.1	523121	Pengembalian Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	4,423,800
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	944,000
JUMLAH			29,410,545,828	29,410,545,828

Keterangan :

FINAL

Bogor, 6 Mei 2024

Penanggung Jawab UAKPA

Kepala Pusdiklat APUPPT

AKHYAR EFFENDI

196802237993031001

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (078) PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (01) PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT

SATUAN KERJA : (417654) PUSDIKLAT ANTI PENCUCIAN UANG DAN
PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

Tgl Data : 06/05/24 6:26 AM

Tgl Cetak : 06/05/24 8:24 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	114112	Beban barang yang dibayar di muka (prepaid)	3,969,107	0
0.0	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	28,765,713	0
0.0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	0	28,765,713
0.0	117111	Barang Konsumsi	578,701,304	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	39,715,719	0
0.0	117114	Suku Cadang	25,450,722	0
0.0	117131	Bahan Baku	1,571,760	0
0.0	117199	Persediaan Lainnya	24,837,362	0
0.0	131111	Tanah	41,534,373,342	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	37,509,748,093	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	99,251,678,085	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	149,962,000	0
0.0	134113	Jaringan	85,640,000	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	79,329,600	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	99,017,550	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	35,124,672,064
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	14,401,827,265
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	121,844,125
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	18,555,329
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	33,976,250
0.0	162151	Software	94,420,730	0
0.0	163139	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	189,685,360	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	27,472,500	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	27,472,500
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	94,420,730
0.0	212111	Beban pegawai yang masih harus dibayar	0	2,240,000
0.0	212112	Beban barang yang masih harus dibayar	0	188,828,956
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	189,685,360
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	28,950,582,797
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	446,720,880	0
0.0	391111	Ekuitas	0	130,996,501,002
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	3,000,001
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	43,211,998
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	72,000,000
3.0	425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	0	288,800,000
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	58,465
3.0	425911	Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	12

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (078) PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (01) PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT

SATUAN KERJA : (417854) PUSDIKLAT ANTI PENCUCIAN UANG DAN
PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

Tgl Data : 06/05/24 6:26 AM

Tgl Cetak : 06/05/24 8:24 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	425912	Penerimaan Kembali Beban Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	42,650,405
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	1,351,873,400	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	17,004	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	93,922,410	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	29,046,732	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	63,140,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	181,140,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	7,473,390	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	81,979,440	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	220,519,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	26,780,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	194,682,500	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	2,490	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	16,501,750	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	3,597,000	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	32,145,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	13,252,860	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	44,997,000	0
3.0	512111	Beban Uang Honor Tetap	1,203,533,135	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	83,060,000	0
3.0	512212	Beban Uang Lembur PPPK	4,254,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	8,707,559,529	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	932,500,495	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	3,404,768,939	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	5,736,206	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	13,080,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	336,294,332	0
3.0	521211	Beban Bahan	835,575,414	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	335,000,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	39,274,351	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	1,994,811,702	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	9,937,713	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	2,383,000	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	209,777,853	0
3.0	522141	Beban Sewa	337,227,807	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	58,850,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	558,210,550	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	710,815,750	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (078) PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (01) PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT

SATUAN KERJA : (417654) PUSDIKLAT ANTI PENCUCIAN UANG DAN
PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

Tgl Data : 06/05/24 6:26 AM

Tgl Cetak : 06/05/24 8:24 AM

Halaman : 3

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,294,624,761	0
3.0	523199	Beban Pemeliharaan Lainnya	187,000	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1,073,340,820	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	450,000	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	668,511,701	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1,561,359,355	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1,982,680,508	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	18,745,250	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	2,854,666	0
3.0	591411	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	9,707,500	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	695,006,906	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	81,799,160	0
3.0	593114	Beban Persediaan suku cadang	1,188,810	0
3.0	593131	Beban Persediaan bahan baku	9,323,334	0
3.0	593149	Beban persediaan lainnya	52,575,023	0
3.0	596111	Kerugian Pelepasan Aset	861,957,599	0
JUMLAH			210,629,092,972	210,629,092,972

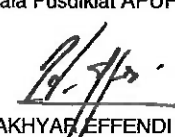
Keterangan :

FINAL

Bogor, 6 Mei 2024

Penanggung Jawab UAKPA

Kepala Pusdiklat APUPPT


AKHYAR EFFENDI
196802231993031001

Lampiran

B



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TINGKAT SATUAN KERJA
MENURUT AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023**

**PUSDIKLAT ANTI PENCUCIAN UANG
DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME
DEPOK, JAWA BARAT**

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 078
ESELON I : 01
WILAYAH/PROVINSI : null
SATUAN KERJA : 417654
JENIS SATUAN KERJA : KD

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
JAWA BARAT
PUSDIKLAT ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

Kode Lap : LRA.B.S.1
 Tanggal : 06/05/24 4:34 PM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lra_bel_sgo

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
01	RUPIAH MURNI							
3365	Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang PPATK							
DCF	Pelatihan Bidang Ekonomi dan Keuangan							
52	BELANJA BARANG							
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	455,264,000	391,899,000	390,758,642	0	390,758,642	99.71	1,140,358
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	263,800,000	158,100,000	157,900,000	0	157,900,000	99.87	200,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	39,650,000	7,574,000	7,573,901	0	7,573,901	100	99
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	758,714,000	557,573,000	556,232,543	0	556,232,543	99.76	1,340,457
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	231,400,000	474,772,000	474,228,237	0	474,228,237	99.89	543,763
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	231,400,000	474,772,000	474,228,237	0	474,228,237	99.89	543,763
5221	Belanja Jasa							
522141	Belanja Sewa	0	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000	100	0
522151	Belanja Jasa Profesi	93,100,000	50,400,000	50,400,000	0	50,400,000	100	0
522191	Belanja Jasa Lainnya	889,693,000	529,845,000	529,845,000	0	529,845,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	982,793,000	582,745,000	582,745,000	0	582,745,000	100	0
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	563,544,000	414,142,000	411,199,342	7,000	411,192,342	99.29	2,949,658
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	113,728,000	208,954,000	208,752,651	0	208,752,651	99.9	201,349
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	677,272,000	623,096,000	619,951,993	7,000	619,944,993	99.5	3,151,007
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	2,650,179,000	2,238,186,000	2,233,157,773	7,000	2,233,150,773	99.78	5,035,227
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 3365.DCF	2,650,179,000	2,238,186,000	2,233,157,773	7,000	2,233,150,773	99.775	5,035,227
SCF	null							
52	BELANJA BARANG							
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	244,090,000	330,042,000	330,030,500	0	330,030,500	100	11,500
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	192,000,000	155,700,000	155,700,000	0	155,700,000	100	0
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	9,100,000	7,800,000	7,800,000	0	7,800,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	445,190,000	493,542,000	493,530,500	0	493,530,500	100	11,500
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	57,600,000	76,430,000	76,429,370	0	76,429,370	100	630
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	57,600,000	76,430,000	76,429,370	0	76,429,370	100	630

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 078
ESELON I : 01
WILAYAH/PROVINSI : null
SATUAN KERJA : 417654
JENIS SATUAN KERJA : KD

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
JAWA BARAT
PUSDIKLAT ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 06/05/24 4:34 PM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_sgo

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
5121	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	0	310,172,000	305,178,600	0	305,178,600	98.39	4,993,400
512111	Belanja Honorarium							
	Belanja Uang Honor Tetap							
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5121	1,338,400,000	1,203,553,000	1,203,533,135	0	1,203,533,135	100	19,865
5122	Belanja Lembur	1,338,400,000	1,203,553,000	1,203,533,135	0	1,203,533,135	100	19,865
512211	Belanja Uang Lembur	88,392,000	95,825,000	83,060,000	0	83,060,000	86.68	12,765,000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	0	9,383,000	4,254,000	0	4,254,000	45.34	5,129,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	88,392,000	105,208,000	87,314,000	0	87,314,000	82.99	17,894,000
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transitio							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	8,305,688,000	8,707,715,000	8,707,559,529	0	8,707,559,529	100	155,471
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	0	935,299,000	934,944,333	2,443,838	932,500,495	99.7	2,798,505
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	8,305,688,000	9,643,014,000	9,642,503,862	2,443,838	9,640,060,024	99.99	2,953,976
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	11,895,000,000	13,337,121,000	13,295,500,210	5,404,151	13,290,096,059	99.69	47,024,941
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 3375.EBA	11,895,000,000	13,337,121,000	13,295,500,210	5,404,151	13,290,096,059	99.688	47,024,941
EBD	null							
52	BELANJA BARANG							
5212	Belanja Barang Non Operasional	17,320,000	11,779,000	10,826,300	0	10,826,300	91.91	952,700
521211	Belanja Bahan	17,320,000	11,779,000	10,826,300	0	10,826,300	91.91	952,700
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212							
5221	Belanja Jasa	19,600,000	4,950,000	4,950,000	0	4,950,000	100	0
522151	Belanja Jasa Profesi	19,600,000	4,950,000	4,950,000	0	4,950,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221							
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	68,430,000	48,980,000	46,955,814	0	46,955,814	95.87	2,024,186
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,250,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	70,680,000	48,980,000	46,955,814	0	46,955,814	95.87	2,024,186
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	107,600,000	65,709,000	62,732,114	0	62,732,114	95.47	2,976,886
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 3375.EBD	107,600,000	65,709,000	62,732,114	0	62,732,114	95.47	2,976,886
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN3375	12,002,600,000	13,402,830,000	13,358,232,324	5,404,151	13,352,828,173	99.67	50,001,827
3376	Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan							
EBA	null							
52	BELANJA BARANG							

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 078

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

ESELON I

: 01

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

WILAYAH/PROVINSI

: null

JAWA BARAT

SATUAN KERJA

: 417654

PUSDIKLAT ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

JENIS SATUAN KERJA

: KD

Kode Lap : LRA.B.S.1

Tanggal : 06/05/24 4:34 PM

Halaman : 5

Prg ID : lap_lra_bel_sgo

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
3377	Penyelenggaraan Ketatausahaan, Kerumahtanggaan,							
EBA	null							
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional	3,158,678,000	3,408,270,000	3,407,181,439	2,412,500	3,404,768,939	99.9	3,501,061
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	12,000,000	5,850,000	5,736,206	0	5,736,206	98.05	113,794
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	7,200,000	13,080,000	13,080,000	0	13,080,000	100	0
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	307,984,000	343,798,000	336,352,032	57,700	336,294,332	97.82	7,503,668
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya							
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	3,485,862,000	3,770,998,000	3,762,349,677	2,470,200	3,759,879,477	99.77	11,118,523
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	47,969,000	55,240,000	53,397,505	0	53,397,505	96.66	1,842,495
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	13,250,000	23,988,000	23,900,450	0	23,900,450	99.64	87,550
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	61,219,000	79,228,000	77,297,955	0	77,297,955	97.56	1,930,045
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	179,630,000	314,990,000	314,023,998	0	314,023,998	99.69	966,002
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	157,640,000	74,052,000	74,001,424	0	74,001,424	99.93	50,576
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	337,270,000	389,042,000	388,025,422	0	388,025,422	99.74	1,016,578
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	2,040,000,000	1,968,432,000	1,968,421,323	0	1,968,421,323	100	10,677
522112	Belanja Langganan Telepon	14,400,000	10,320,000	9,868,080	0	9,868,080	95.62	451,920
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	219,245,000	214,362,000	213,915,419	0	213,915,419	99.79	446,581
522141	Belanja Sewa	259,080,000	320,341,000	320,043,170	0	320,043,170	99.91	297,830
522151	Belanja Jasa Profesi	28,300,000	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000	100	0
522191	Belanja Jasa Lainnya	61,470,000	14,956,000	14,924,270	0	14,924,270	99.79	31,730
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	2,622,495,000	2,531,911,000	2,530,672,262	0	2,530,672,262	99.95	1,238,738
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	976,611,000	712,834,000	710,815,750	0	710,815,750	99.72	2,018,250
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,394,812,000	1,300,214,000	1,299,048,561	4,423,800	1,294,624,761	99.57	5,589,239
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	3,000,000	200,000	187,000	0	187,000	93.5	13,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	2,374,423,000	2,013,248,000	2,010,051,311	4,423,800	2,005,627,511	99.84	7,620,489
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	113,375,000	124,603,000	122,679,814	0	122,679,814	98.46	1,923,186
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,250,000	450,000	450,000	0	450,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	115,625,000	125,053,000	123,129,814	0	123,129,814	98.46	1,923,186

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 078
SATUAN KERJA : 417654

**PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
PUSDIKLAT ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME**

Kode Lap : LRA.B.E1.2
Tanggal : 06/05/24 4:34 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_satker

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
01	RUPIAH MURNI							
BE	Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme							
3365	Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang PPA TK	4,033,899,000	3,621,906,000	3,616,857,234	7,000	3,616,850,234	99.86	5,055,766
	JUMLAH BELANJA PROGRAM BE	4,033,899,000	3,621,906,000	3,616,857,234	7,000	3,616,850,234	99.86	5,055,766
WA	Program Dukungan Manajemen							
3375	Pengelolaan Perencanaan dan Keuangan PPA TK	12,002,600,000	13,402,830,000	13,358,232,324	5,404,151	13,352,828,173	99.67	50,001,827
3376	Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Ketatalaksanaan PPA TK	329,560,000	249,547,000	240,606,556	937,000	239,669,556	96.42	9,877,444
3377	Penyelenggaraan Ketatausahaan, Kerumahtanggaan, Perlengkapan, dan Kehumasan PPA TK	16,295,431,000	11,773,054,000	11,748,128,834	6,894,000	11,741,234,834	99.79	31,819,166
	JUMLAH BELANJA PROGRAM WA	28,627,611,000	25,425,431,000	25,346,967,714	13,235,151	25,333,732,563	99.69	91,698,437
	JUMLAH BELANJA RUPIAH MURNI	32,661,510,000	29,047,337,000	28,963,824,948	13,242,151	28,950,582,797	99.71	96,754,203
	JUMLAH	32,661,510,000	29,047,337,000	28,963,824,948	13,242,151	28,950,582,797	99.71	96,754,203

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN 2023

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 078
SATUAN KERJA : 417654

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
PUSDIKLAT ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 06/05/24 4:33 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_sd_jb_akun_satker

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
01	RUPIAH MURNI							
51	BELANJA PEGAWAI							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1,379,000,000	1,352,446,000	1,352,189,900	0	1,352,189,900	99.98	256,100
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	252,000	27,000	17,347	313	17,034	63.09	9,966
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	91,700,000	93,980,000	93,954,060	0	93,954,060	99.97	25,940
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	28,000,000	29,068,000	29,057,476	0	29,057,476	99.96	10,524
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	98,766,000	63,140,000	63,140,000	0	63,140,000	100	0
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	159,280,000	179,209,000	179,900,000	0	179,900,000	99.83	309,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	8,124,000	7,474,000	7,473,390	0	7,473,390	99.99	610
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	80,700,000	82,164,000	81,979,440	0	81,979,440	99.78	184,560
511129	Belanja Uang Makan PNS	284,724,000	237,926,000	220,519,000	0	220,519,000	92.68	17,407,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	31,974,000	29,740,000	29,740,000	2,960,000	26,780,000	90.05	2,960,000
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	0	194,683,000	194,682,500	0	194,682,500	100	500
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	5,000	2,490	0	2,490	49.8	2,510
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	0	16,503,000	16,501,750	0	16,501,750	99.99	1,250
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	0	3,598,000	3,597,000	0	3,597,000	99.97	1,000
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0	32,145,000	32,145,000	0	32,145,000	100	0
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	0	13,253,000	13,252,860	0	13,252,860	100	140
511628	Belanja Uang Makan PPPK	0	49,985,000	44,997,000	0	44,997,000	90.02	4,988,000
512111	Belanja Uang Honor Tetap	1,338,400,000	1,203,553,000	1,203,533,135	0	1,203,533,135	100	19,865
512211	Belanja Uang Lembur	88,392,000	95,825,000	83,060,000	0	83,060,000	86.68	12,765,000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	0	9,383,000	4,254,000	0	4,254,000	45.34	5,129,000
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	8,305,668,000	8,707,715,000	8,707,559,529	0	8,707,559,529	100	155,471
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	0	935,299,000	934,944,333	2,443,838	932,500,495	99.7	2,798,505
	JUMLAH BELANJA PEGAWAI	11,895,000,000	13,337,121,000	13,295,500,210	5,404,151	13,290,096,059	99.69	47,024,941
52	BELANJA BARANG							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	3,158,678,000	3,408,270,000	3,407,181,439	2,412,500	3,404,768,939	99.9	3,501,061
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	12,000,000	5,850,000	5,736,206	0	5,736,206	98.05	113,794
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	7,200,000	13,080,000	13,080,000	0	13,080,000	100	0
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	307,984,000	343,798,000	336,352,032	57,700	336,294,332	97.82	7,503,668
521211	Belanja Bahan	827,014,000	840,422,000	835,575,414	0	835,575,414	99.42	4,846,586
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	510,300,000	335,200,000	335,000,000	0	335,000,000	99.94	200,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	62,000,000	39,362,000	39,274,351	0	39,274,351	99.78	87,649
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	468,630,000	869,113,000	867,593,105	0	867,593,105	96.83	1,519,895
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	157,640,000	74,052,000	74,001,424	0	74,001,424	99.93	50,576
522111	Belanja Langganan Listrik	2,040,000,000	1,968,432,000	1,968,421,323	0	1,968,421,323	100	10,677
522112	Belanja Langganan Telepon	14,400,000	10,320,000	9,868,080	0	9,868,080	95.62	451,920
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	219,245,000	214,362,000	213,915,419	0	213,915,419	99.79	446,581
522141	Belanja Sewa	259,080,000	335,663,000	335,365,170	0	335,365,170	99.91	297,830
522151	Belanja Jasa Profesi	188,700,000	58,850,000	58,850,000	0	58,850,000	100	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	: 078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
ESELON I	: 01	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
WILAYAH/PROVINSI	: 0200	JAWA BARAT
SATUAN KERJA	: 417654	PUSDIKLAT ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 06/05/24 8:25 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	43,211,998	0	43,211,998	0
425129	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	72,000,000	0	72,000,000	0
425151	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	0	115,211,998	0	115,211,998	
4254	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi					
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	0	288,800,000	0	288,800,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4254	0	288,800,000	0	288,800,000	
4258	Pendapatan Denda					
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	58,465	0	58,465	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4258	0	58,465	0	58,465	
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	12	0	12	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	42,650,405	0	42,650,405	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	42,650,417	0	42,650,417	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	0	446,720,880	0	446,720,880	
	JUMLAH PENDAPATAN	0	446,720,880	0	446,720,880	

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	: 078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	Kode Lap	: LRA.B.S.2
ESELON I	: 01	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	Tanggal	: 06/05/24 8:25 AM
WILAYAH/PROVINSI	: 0200	JAWA BARAT	Halaman	: 1
SATUAN KERJA	: 417654		Prg ID	: lap_lra_bel_akun_satker
JENIS SATUAN KERJA	: KD		Tgl Data	: 6/5/24 7:40 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1,379,000,000	1,352,446,000	1,352,189,900	0	1,352,189,900	99.98	256,100
51111	Belanja Gaji Pokok PNS	252,000	27,000	17,347	313	17,034	64.25	9,966
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	91,700,000	93,980,000	93,954,060	0	93,954,060	99.97	25,940
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	28,000,000	29,088,000	29,057,476	0	29,057,476	99.96	10,524
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	98,766,000	63,140,000	63,140,000	0	63,140,000	100	0
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	159,280,000	179,209,000	178,900,000	0	178,900,000	99.83	309,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	8,124,000	7,474,000	7,473,390	0	7,473,390	99.99	610
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	80,700,000	82,164,000	81,979,440	0	81,979,440	99.78	184,560
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	284,724,000	237,926,000	220,519,000	0	220,519,000	92.68	17,407,000
511129	Belanja Uang Makan PNS	31,974,000	29,740,000	29,740,000	2,960,000	26,780,000	100	2,960,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS							
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	2,162,520,000	2,075,174,000	2,056,970,613	2,960,313	2,054,010,300	99.12	21,163,700
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	0	194,683,000	194,682,500	0	194,682,500	100	500
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	5,000	2,490	0	2,490	49.8	2,510
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	0	16,503,000	16,501,750	0	16,501,750	99.99	1,250
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	0	3,598,000	3,597,000	0	3,597,000	99.97	1,000
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0	32,145,000	32,145,000	0	32,145,000	100	0
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	0	13,253,000	13,252,860	0	13,252,860	100	140
511628	Belanja Uang Makan PPPK	0	49,985,000	44,997,000	0	44,997,000	90.02	4,988,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	0	310,172,000	305,178,600	0	305,178,600	98.39	4,993,400
5121	Belanja Honorarium							
51211	Belanja Uang Honor Tetap	1,338,400,000	1,203,553,000	1,203,533,135	0	1,203,533,135	100	19,865
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5121	1,338,400,000	1,203,553,000	1,203,533,135	0	1,203,533,135	100	19,865
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	88,392,000	95,825,000	83,060,000	0	83,060,000	86.68	12,765,000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	0	9,383,000	4,254,000	0	4,254,000	45.34	5,129,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	88,392,000	105,208,000	87,314,000	0	87,314,000	82.99	17,894,000
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	8,305,688,000	8,707,715,000	8,707,559,529	0	8,707,559,529	100	155,471
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	0	935,299,000	934,944,333	2,443,838	932,500,495	99.96	2,798,505
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	8,305,688,000	9,643,014,000	9,642,503,862	2,443,838	9,640,060,024	99.99	2,953,976
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	11,895,000,000	13,337,121,000	13,295,500,210	5,404,151	13,290,096,059	99.69	47,024,941

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 078
ESELON I : 01
WILAYAH/PROVINSI : 0200
SATUAN KERJA : 417654
JENIS SATUAN KERJA : KD

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
JAWA BARAT
PUSDIKLAT ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 06/05/24 8:25 AM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker
Tgl Data : 6/5/24 7:40 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA		% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	13,467,973,000	12,846,642,000	12,811,722,345	7,838,000	12,803,884,345	99.73
53	BELANJA MODAL						
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,180,000,000	1,418,574,000	1,416,613,873	0	1,416,613,873	99.86
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,180,000,000	1,418,574,000	1,416,613,873	0	1,416,613,873	99.86
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321						
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1,365,000,000	1,378,000,000	1,372,995,000	0	1,372,995,000	99.64
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4,673,537,000	67,000,000	66,993,520	0	66,993,520	99.99
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	6,038,537,000	1,445,000,000	1,439,988,520	0	1,439,988,520	99.65
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331						
5361	Belanja Modal Lainnya	80,000,000	0	0	0	0	0
536111	Belanja Modal Lainnya	80,000,000	0	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361						
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	7,298,537,000	2,863,574,000	2,856,602,393	0	2,856,602,393	99.76
	JUMLAH BELANJA	32,661,510,000	29,047,337,000	28,963,824,948	13,242,151	28,950,582,797	99.71
							96,754,203

Lampiran C



DAFTAR REKENING PEMERINTAH 31 DESEMBER 2023

PUSDIKLAT ANTI PENCUCIAN UANG
DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME
DEPOK, JAWA BARAT

DAFTAR REKENING PEMERINTAH

No.	Kantor/Satuan Kerja	Kementerian Negara/Lembaga	Kode BA - Es. I - Sarker	Jenis Rekening (Giro/Deposito)	Nomor Rekening	Nama Rekening	Rek. Atas Nama	Bank/Kantor Pos
1	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Pusdiklat APUPPT)	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)	078.01-417654-Pusdiklat APUPPT	Giro	8100124176541000	BPG 023 PUSDIKLAT APU PPT	BPG 023 PUSDIKLAT APU PPT	Bank Mandiri, KC. Jkt Plaza Mandiri
2	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Pusdiklat APUPPT)	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)	078.01-417654-Pusdiklat APUPPT	Giro	1330026731364	BNP 023 PUSDIKLAT APU DAN PPT	BNP 023 PUSDIKLAT APU DAN PPT	Bank Mandiri, KCP Cibinong Mayor Oking

Lampiran D



CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA 31 DESEMBER 2023

PUSDIKLAT ANTI PENCUCIAN UANG
DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME
DEPOK, JAWA BARAT

**CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA
PADA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN
PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME
PERIODE 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2023
(AUDITED)**

I. PENDAHULUAN

1.1 Dasar Hukum

Penyusunan Catatan Ringkas Barang Milik Negara (CRBMN) pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme berpedoman pada:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 532/KM.6/2015;
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- f. Peraturan lain terkait dengan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.

1.2 Entitas Pelaporan

Dalam rangka menghasilkan Sumber Daya Manusia yang berkompeten di bidang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan membentuk Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Pusdiklat APU PPT) atau *Indonesian Financial Intelligence Institute* (IFII) sebagai penyelenggara pendidikan dan pelatihan di bidang APU PPT, serta menjadi Pembina sertifikasi keahlian dan kompetensi di bidang APU PPT.

Pekerjaan pembangunan Pusdiklat APU PPT / IFII dibangun pada tahun 2016 yang disimbolkan dengan peletakan batu pertama pada tanggal 4 April 2016 dan berlokasi di Jl. Raya Tapos No.82. Cimpaeun, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat.

Sebagai lembaga yang baru berdiri Pusdiklat APU PPT mempunyai harapan agar dapat meningkatkan pengetahuan dan kompetensi pemangku kepentingan dan SDM Pusdiklat APU PPT dan pelatihan di bidang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, dapat mengembangkan dan meningkatkan kualitas layanan dan pengelolaan diklat melalui standarisasi

lembaga yang berkompeten serta dapat melakukan pembinaan sertifikasi keahlian dan kompetensi di bidang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

1.3 Periode Laporan

Laporan Barang Milik Negara pada Pusdiklat APU PPT disusun untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

II. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

Penatausahaan BMN pada Pusdiklat APU PPT didasarkan pada peraturan-peraturan yang terkait langsung dengan usaha pengelolaan BMN diantaranya:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara;
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat; dan
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

III. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Barang Kuasa Pengguna periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2023 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh Pusdiklat APU PPT. Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri dari:

1. Laporan Posisi Barang Milik Negara;
2. Laporan Posisi Barang Persediaan;
3. Laporan Aset Tetap Gabungan;
4. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
5. Laporan Aset Tak Berwujud;
6. Laporan Barang Bersejarah;
7. Laporan Kondisi Barang;
8. Laporan Penyusutan Aset Tetap;
9. Laporan Amortisasi Aset Tak Berwujud;
10. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara.

IV. Ringkasan Barang Milik Negara dan Persediaan Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2023

1. Saldo Barang Milik Negara dan Persediaan per 31 Desember 2023

Nilai Barang Milik Negara Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Pusdiklat APU PPT) per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp178,679,490,420 (seratus tujuh puluh delapan miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh ribu empat ratus dua puluh rupiah). Nilai Barang Milik Negara tersebut terdiri dari saldo Barang Intrakompatibel sebesar Rp178,638,203,620 (seratus tujuh puluh delapan miliar enam ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tiga ribu enam ratus dua puluh rupiah) dan saldo Barang Ekstrakompatibel sebesar Rp41,286,800 (empat puluh satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah). Sedangkan nilai Persediaan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp670,276,867 (enam ratus tujuh puluh juta dua ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah).

2. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara per 1 Januari s.d. 31 Desember 2023

A. Barang Persediaan

Saldo persediaan pada Pusdiklat APU PPT pada 31 Desember 2023 sebesar Rp670,276,867 (enam ratus tujuh puluh juta dua ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah). Dengan saldo awal pada 1 Januari 2023 sebesar Rp568,575,571 (lima ratus enam puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah), mutasi tambah persediaan sebesar Rp994,501,149 (sembilan ratus sembilan puluh empat juta lima ratus satu ribu seratus empat puluh sembilan rupiah), dan mutasi kurang persediaan sebesar Rp892,799,853 (delapan ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah). Adapun rincian mutasi barang persediaan Pusdiklat APU PPT per kode persediaan hingga semester II Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut.

Kode	Uraian	Saldo 1 Januari 2023 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Saldo 31 Desember 2023 (Rp)
117111	Barang Konsumsi	467,166,317	856,181,613	744,646,626	578,701,304
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	62,670,899	62,042,060	84,997,240	39,715,719
117114	Suku Cadang	26,639,532	0	1,188,1810	25,450,722
117121	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0	0	0
117131	Bahan Baku	1,887,444	9,007,650	9,323,334	1,571,760
117199	Persediaan Lainnya	10,211,379	67,269,826	52,643,843	24,837,362
Jumlah		568,575,571	994,501,149	892,799,853	670,276,867

Total nilai barang persediaan yang dalam kondisi rusak dan usang adalah sebesar Rp0.

Adapun rincian mutasi masuk dan mutasi keluar persediaan Pusdiklat APU PPT per bulan hingga Semester II Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

No	Periode Transaksi	Nilai Mutasi Tambah (Rp)	Nilai Mutasi Kurang (Rp)
1	Januari 2023	3,789,000	109,692,859
2	Februari 2023	25,988,490	88,274,141
3	Maret 2023	358,659,888	38,668,273
4	April 2023	14,614,000	19,815,276
5	Mei 2023	3,727,100	39,730,675
6	Juni 2023	22,020,452	74,846,311
7	Juli 2023	3,774,000	135,696,918
8	Agustus 2023	10,746,450	40,463,270
9	September 2023	54,644,000	35,743,279
10	Oktober 2023	36,124,458	78,657,049
11	November 2023	178,072,996	88,679,157
12	Desember 2023	282,340,515	142,532,645
Total (Rp)		994,501,149	892,799,853

B. Tanah

Saldo Tanah pada Pusdiklat APU PPT per 31 Desember 2023 adalah seluas 16.178m² dengan nilai perolehan sebesar Rp41,534,373,342 (empat puluh satu miliar lima ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah). Jumlah tersebut merupakan nilai per 1 Januari 2023 sebesar Rp40,765,908,040 (empat puluh miliar tujuh ratus enam puluh lima juta sembilan ratus delapan ribu empat puluh rupiah), mutasi bertambah sebesar 131 m² dengan nilai perolehan sebesar Rp768,465,302 (tujuh ratus enam puluh delapan juta empat ratus enam puluh lima ribu tiga ratus dua rupiah) dan mutasi kurang nihil dengan keterangan sebagai berikut:

No	Nama Barang	Kuantitas	Nilai	Jenis Transaksi	Keterangan
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	131 m ²	Rp768,465,302	Pembelian	Pembelian rumah eks warga blok A7

Dari jumlah luas tanah di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah nihil dan sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah nihil.

C. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada Pusdiklat APU PPT per 31 Desember 2023 adalah sejumlah 3,634 unit dengan nilai perolehan sebesar Rp 37,551,034,893 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus lima puluh satu juta tiga puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh

tiga rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo 1 Januari 2023 sebanyak 3,467 unit dengan nilai perolehan sebesar Rp36,392,591,478 (tiga puluh enam miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah), mutasi tambah sebanyak 204 unit dengan nilai perolehan sebesar Rp1,804,145,415 (satu miliar delapan ratus empat juta seratus empat puluh lima ribu empat ratus lima belas rupiah) dan mutasi kurang sebanyak 37 unit dengan nilai sebesar Rp645,702,000 (enam ratus empat puluh lima juta tujuh ratus dua ribu rupiah).

Adapun rincian saldo peralatan dan mesin Pusdiklat APU PPT per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.

Uraian Jenis Transaksi	Kuantitas (Unit)	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Saldo per 1 Januari 2023	3,467	36,351,304,678	41,286,800
Mutasi Tambah	204	1,804,145,415	0
Mutasi Kurang	37	645,702,000	0
Saldo per 31 Desember 2023	3,634	37,509,748,093	41,286,800

Adapun rincian mutasi tambah peralatan dan mesin Pusdiklat APU PPT Semester II Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut.

No	Nama Barang	Kuantitas	Jenis Transaksi	Nilai
1	Sepeda Listrik	1	Pembelian	6,871,000
2	Distance Meter	1	Pembelian	1,962,800
3	Lemari Kayu	11	Pembelian	95,700,000
4	Rak Besi	2	Pembelian	5,083,800
5	Meja Kerja Besi/Metal	9	Pembelian	26,518,500
6	Mesin Cuci	1	Pembelian	16,206,000
7	Televisi	1	Pembelian	6,897,000
8	Microphone	1	Pembelian	3,799,999
9	Camera Video	3	Pembelian	48,495,900
10	Tangga Alumunium	2	Pembelian	2,470,000
11	Mesin Pengering Pakaian	1	Pembelian	19,624,800
12	Microphone/Wireless Mic	1	Pembelian	2,559,000
13	Microphone/Boom Stand	2	Pembelian	3,441,000
14	Video Switcher	1	Pembelian	1,287,600
15	Note Book	16	Pembelian	272,000,000
16	Polishing Machine/Mesin Poles	1	Pembelian	2,923,638
17	Alat Badminton	2	Pembelian	39,960,000
18	Lemari Kayu	7	Transfer Masuk	30,028,750
19	Buffet	2	Transfer Masuk	5,885,000
20	Meja Kerja Kayu	1	Transfer Masuk	2,291,667
21	Kursi Kayu	1	Transfer Masuk	1,155,000
22	Sice	4	Transfer Masuk	5,390,000

No	Nama Barang	Kuantitas	Jenis Transaksi	Nilai
23	Kasur/Spring Bed	2	Transfer Masuk	12,100,000
24	Televisi	2	Perolehan Lainnya	4,598,000
25	Gerobak Tarik	1	Pembelian	2,451,000
26	Lemari Kayu	1	Pembelian	9,846,000
27	Box Camera	1	Pembelian	1,188,000
28	Lemari Es	2	Pembelian	9,998,000
29	Lemari Es	1	Pembelian	4,677,200
30	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	2	Pembelian	58,400,000
31	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1	Pembelian	153,000,000
32	Microwave Oven	1	Pembelian	3,884,200
33	Lemari Kayu	1	Transfer masuk	3,847,500
34	Lemari Kayu	1	Transfer Masuk	15,035,625
35	Baggage Trolley	2	Pembelian	4,724,000
36	Baggage Trolley	1	Pembelian	2,049,000
37	Mesin Bor	1	Pembelian	1,670,100
38	Mesin Bor Tangan	1	Pembelian	1,169,500
39	Gergaji	1	Pembelian	2,992,000
40	Lemari Kayu	1	Pembelian	5,071,000
41	Pataka	2	Pembelian	3,320,800
42	Alat Rumah Tangga Lainnya	2	Pembelian	2,742,000
43	Microphone/Wireless Mic	1	Pembelian	5,579,500
44	Telephone Mobile	1	Pembelian	8,999,000
45	Telephone Mobile	1	Pembelian	4,978,900
46	Tensimeter	1	Pembelian	1,004,100
47	Timbangan Badan (Alat Kedokteran Umum)	1	Pembelian	1,551,000
48	Alat Kedokteran Lainnya	1	Pembelian	3,494,900
49	Tangki Penyimpanan	1	Pembelian	25,752,000
50	Lighting Equipment	2	Pembelian	6,573,400
51	Printer	1	Pembelian	3,991,200
52	Pompa Bensin/Minyak	1	Pembelian	3,553,200
53	Baggage Trolley	1	Pembelian	5,131,696
54	Baggage Trolley	1	Pembelian	2,220,000
55	Baggage Trolley	2	Pembelian	4,398,000
56	Mesin Pompa Air PMK	1	Pembelian	5,259,000
57	Rak Besi	3	Pembelian	7,647,000
58	LCD Projector/Infocus	1	Pembelian	9,135,300
59	Kursi Kayu	6	Pembelian	19,746,900
60	A.C Split	5	Pembelian	54,778,500
61	Gordyn/Kray	9	Pembelian	37,349,991
62	Gordyn/Kray	1	Pembelian	4,150,004
63	Gordyn/Kray	51	Pembelian	136,425,000
64	Gordyn/Kray	1	Pembelian	2,675,005
65	Alat Rumah Tangga Lainnya	1	Pembelian	1,371,000
66	Alat Rumah Tangga Lainnya	2	Pembelian	3,198,000

No	Nama Barang	Kuantitas	Jenis Transaksi	Nilai
67	Note Book	1	Pembelian	25,000,000
68	Tablet PC	2	Pembelian	20,900,000
69	Mesin Bor Beton	1	Pembelian	2,961,500
70	Lemasi Besi/Metal	1	Pembelian	12,980,000
71	Lemasi Besi/Metal	2	Pembelian	4,898,040
72	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1	Pembelian	153,000,000
73	Lensa Kamera	1	Pembelian	2,618,900
74	Papan Pengumuman	1	Penyelesaian dengan KDP	4,922,000
75	A.c Split		Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	6,187,000
76	Tangki Penyimpanan		Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	1,200,000
77	Tangki Penyimpanan		Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	1,200,000
78	Uninterruptible Power Supply (UPS)		Koreksi Perubahan Nilai Bertambah	153,000,000
79	Uninterruptible Power Supply (UPS)		Koreksi Perubahan Nilai Bertambah	153,000,000
Total				1,804,145,415

Adapun rincian mutasi kurang peralatan dan mesin Pusdiklat APU PPT Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut.

No	Tanggal Transaksi	Jenis Transaksi	Nomor Bukti	Keterangan	Kuantitas (unit)	Total Mutasi Kurang (Rp)
1	30 Mei 2023	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	BA Koreksi Pencatatan - 01/PL.04.0 1/V/2023	Televisi	-	4,598,000
2	06 Oktober 2023	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	BA Koreksi Pencatatan - 03/PL.04.0 1/X/2023	Tangki Penyimpanan	-	1,200,000
3	10 Oktober 2023	Penghapusan (Lelang)	SK Nomor 017 Tahun 2023	Televisi	4	77,516,000
4	10 Oktober 2023	Penghapusan (Lelang)	SK Nomor 017 Tahun 2023	Lemari Kayu	16	98,813,000
5	10 Oktober 2023	Penghapusan (Lelang)	SK Nomor 017 Tahun 2023	P.C Unit	15	157,575,000

No	Tanggal Transaksi	Jenis Transaksi	Nomor Bukti	Keterangan	Kuantitas (unit)	Total Mutasi Kurang (Rp)
6	29 Desember 2023	Koreksi Catat Hapus	BA Koreksi Pencatatan - 08/PL.04.0 1/XII/2023	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2	306,000,000
Total					37	645,702,000

Total akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp35,165,693,239 (tiga puluh lima miliar seratus enam puluh lima juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah). Adapun rincian Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Pusdiklat APU PPT per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.

Uraian Penyusutan	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Total Akumulasi Penyusutan (Rp)
1 Januari s.d. 31 Desember 2023	35,124,672,064	41,021,175	35,165,693,239

D. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada Pusdiklat APUPPT per 31 Desember 2023 adalah sejumlah 9 unit dengan nilai perolehan sebesar Rp99,251,678,085 (sembilan puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh satu juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu delapan puluh lima rupiah). Jumlah tersebut terdiri saldo awal tanggal 1 Januari 2023 sebanyak 10 unit dengan nilai perolehan sebesar Rp98,952,090,367 (sembilan puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh dua juta sembilan puluh ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah), mutasi tambah senilai Rp1,442,988,520 (satu miliar empat ratus empat puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah), dan mutasi kurang senilai Rp1,143,400,802 (satu miliar seratus empat puluh tiga juta empat ratus ribu delapan ratus dua rupiah). Adapun rincian saldo Gedung dan Bangunan Pusdiklat APU PPT per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.

Uraian Jenis Transaksi	Kuantitas (Unit)	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Saldo per 1 Januari 2023	10	98,952,090,367	0
Mutasi Tambah	1	1,442,988,520	0
Mutasi Kurang	2	1,143,400,802	0
Saldo per 31 Desember 2023	9	99,251,678,085	0

Adapun rincian mutasi tambah Gedung dan Bangunan Pusdiklat APU PPT sampai dengan Semester II Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Jenis Transaksi	Tanggal Transaksi	Nomor Bukti	Kuantitas (unit)	Total Mutasi Tambah (Rp)
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Pengembangan Melalui KDP	20 Juni 2023	BAST-010/PL.02/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023		66,993,520
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Penyelesaian dengan KDP	16 Oktober 2023	PERJ-055/PL.02/X/2023 ARDHIAN DWIYOENANTO	1	1,349,995,000
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Pengembangan Melalui KDP	29 Desember 2023	BA Koreksi Pencatatan-06/PL.04.01/XI/2023		26,000,000
Total						1,442,988,520

Adapun rincian mutasi kurang Gedung dan Bangunan Pusdiklat APU PPT sampai dengan Semester II Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Jenis Transaksi	Tanggal Transaksi	Nomor Bukti	Kuantitas (unit)	Total Mutasi Kurang (Rp)
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Penghapusan	24 Februari 2023	SK Nomor 004 Tahun 2023	2	371,935,500
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	02 November 2023	BA Koreksi Pencatatan-04/PL.04.01/XI/2023		755,592,202
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	28 Desember 2023	BA Koreksi Pencatatan-05/PL.04.01/XI/2023		3,000,000

4	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	29 Desember 2023	BA Koreksi Pencatatan-07/PL.04.01/XI/2023		12,873,100
Total					2	1,143,400,802

Dari jumlah Gedung dan Bangunan di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah nihil dan sedang dalam proses penghapusan nihil.

Rincian Gedung dan Bangunan pada Pusdiklat APU PPT berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut.

Uraian Kondisi	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
Baik	9	71,179,354,085
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	1	28,072,324,000

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp14,401,827,265 (empat belas miliar empat ratus satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh lima rupiah)

E. Jalan dan Jembatan

Saldo Jalan dan Jembatan pada Pusdiklat APU PPT per 31 Desember 2023 adalah sejumlah 1 unit dengan nilai perolehan sebesar Rp149,962,000 (seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo 1 Januari 2023 jalan dan jembatan sebesar Rp149,962,000 (seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah), mutasi tambah dan mutasi kurang nihil.

Akumulasi penyusutan pada akun Jalan dan Jembatan per 31 Desember 2023 adalah Rp121,844,125 (seratus dua puluh satu juta delapan ratus empat puluh empat ribu seratus dua puluh lima rupiah).

F. Jaringan

Saldo Jaringan pada Pusdiklat APU PPT per 31 Desember 2023 adalah sejumlah 2 unit dengan nilai perolehan sebesar Rp85.640.000 (delapan puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo 1 Januari 2023 jaringan senilai Rp85.640.000 (delapan puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), mutasi tambah nihil, dan mutasi kurang nihil.

Akumulasi penyusutan pada akun Jaringan per 31 Desember 2023 adalah Rp18,555,329 (delapan belas juta lima ratus lima puluh lima ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah).

G. Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Kontruksi Dalam Pengerjaan pada Pusdiklat APU PPT per 31 Desember 2023 adalah Rp99,017,550 (sembilan puluh sembilan juta tujuh belas ribu lima ratus lima puluh rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo 1 Januari 2023 sebesar Rp99,017,550 (sembilan puluh sembilan juta tujuh belas ribu lima ratus lima puluh rupiah), mutasi tambah sebesar Rp1,450,910,520 (satu miliar empat ratus lima puluh juta sembilan ratus sepuluh ribu lima ratus dua puluh rupiah), dan mutasi kurang sebesar Rp1,450,910,520 (satu miliar empat ratus lima puluh juta sembilan ratus sepuluh ribu lima ratus dua puluh rupiah). Adapun mutasi tambah Kontruksi Dalam Pengerjaan adalah sebagai berikut:

No	Tanggal transaksi	Nomor Dokumen	Saldo KDP	Keterangan
1	20 Juni 2023	BAST-010/PL.02/VI/2023	66,993,520	Swakelola renovasi ruang UPS
2	18 September 2023	-	4,995,000	Pembayaran Jasa Penilai Publik untuk Pembelian Rumah Eks Warga Blok A7
3	16 Oktober 2023	PERJ-055/PL.02/X/2023 ARDHIAN DWIYOENANTO	1,345,000,000	Pembayaran Pembelian Rumah Eks Warga Blok A7
4	08 Desember 2023	-	4,922,000	Swakelola Pembuatan Papan Pengumuman (Baliho)
5	28 Desember 2023	BA Koreksi Pencatatan-05/PL.04.01/XI/2023	3,000,000	Reklasifikasi dari bangunan gedung kantor menjadi bangunan gedung dalam pengerjaan untuk mengakomodir biaya notaris dan balik nama rumah eks warga blok A7
6	29 Desember 2023	-	26,000,000	Pembebanan biaya reklasifikasi bangunan sebesar Rp3,000,000 untuk mengakomodir biaya balik nama sebesar Rp13,000,000 dan biaya

No	Tanggal transaksi	Nomor Dokumen	Saldo KDP	Keterangan
				notaris sebesar Rp10,000,000 untuk kemudian dikapitalisasi ke Bangunan Gedung Kantor NUP 11

Adapun mutasi kurang Kontruksi Dalam Pengerjaan adalah sebagai berikut:

No	Tanggal transaksi	Nomor Dokumen	Saldo KDP	Keterangan
1	20 Juni 2023	BAST-010/PL.02/VI/2023	66,993,520	Pengembangan Nilai Aset berupa Gedung Kantor Permanen dari hasil renovasi ruang UPS
2	16 Oktober 2023		1,349,995,000	KDP menjadi bangunan gedung kantor NUP 11
3	08 Desember 2023	-	4,922,000	Swakelola Pembuatan Papan Pengumuman (Baliho)
4	29 Desember 2023	BA Koreksi Pencatatan-05/PL.04.01/XI/2023	3,000,000	Direklas ke KDP Nomor 13
5	29 Desember 2023		26,000,000	KDP menjadi bangunan gedung kantor NUP 11

H. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud pada Pusdiklat APU PPT per 31 Desember 2023 adalah sejumlah 1 unit dengan nilai perolehan sebesar Rp94,420,730 (sembilan puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo 1 Januari 2023 sebesar Rp94,420,730 (sembilan puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah), mutasi tambah nihil, dan mutasi kurang nihil. Dari jumlah Aset Tak Berwujud tersebut, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan sedang dalam proses penghapusan adalah nihil.

Akumulasi amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 adalah Rp94,420,730 (sembilan puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah).

I. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Pusdiklat APU PPT per 31 Desember 2023 adalah sejumlah 87 unit dengan nilai perolehan sebesar Rp79.329.600 (tujuh puluh sembilan juta

tiga ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo 1 Januari 2023 sebesar Rp79.329.600 (tujuh puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), mutasi tambah nihil, dan mutasi kurang nihil.

Dari jumlah Aset Tetap Lainnya tersebut, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan sedang dalam proses penghapusan adalah nihil.

Akumulasi amortisasi pada akun Aset Tetap Lainnya adalah Rp33,976,250 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).

J. Barang Milik Negara Berupa Aset Bersejarah

Saldo Barang Milik Negara berupa Aset Bersejarah pada Pusdiklat APU PPT per 31 Desember 2023 adalah sebesar nihil, mutasi tambah nihil, dan mutasi kurang nihil.

K. Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan

Saldo Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan pada Pusdiklat APU PPT per 31 Desember 2023 adalah Rp27,472,500 (dua puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo 1 Januari 2023 sebesar Rp608,389,040 (enam ratus delapan juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu empat puluh rupiah), mutasi tambah sebesar Rp705,839,500 (tujuh ratus lima juta delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah), dan mutasi kurang sebesar Rp1,286,756,040 (satu miliar dua ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh enam ribu empat puluh rupiah). Adapun mutasi tambah aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Tanggal transaksi	Dokumen Pendukung	Kuantitas (unit)	Saldo
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	4 Januari 2023	Surat Persetujuan Penghapusan Nomor S-3/MK.6/KNL.0803/2023	2	371,935,500
2	Lemari Kayu	10 Oktober 2023	Telah terbit SK Penghapusan Nomor 017 Tahun 2023 tanggal 10 Oktober 2023	16	98,813,000
3	Televisi	10 Oktober 2023	Telah terbit SK Penghapusan Nomor 017 Tahun 2023 tanggal 10 Oktober 2023	4	77,516,000
4	P.C Unit	10 Oktober 2023	Telah terbit SK Penghapusan Nomor 017 Tahun 2023 tanggal 10 Oktober 2023	15	157,575,000
Total				37	705,839,500

Adapun mutasi kurang aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Tanggal transaksi	Dokumen Pendukung	Kuantitas (unit)	Saldo
1	Note Book	24 Februari 2023	Telah terbit SK Penghapusan Nomor 002 Tahun 2023 tanggal 24 Februari 2023	2	39,231,100
2	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	24 Februari 2023	Telah terbit SK Penghapusan Nomor 003 Tahun 2023 tanggal 24 Februari 2023	2	541,685,440
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	24 Februari 2023	Telah terbit SK Penghapusan Nomor 004 Tahun 2023 tanggal 24 Februari 2023	2	371,935,500
4	Lemari Kayu	10 Oktober 2023	Telah terbit SK Penghapusan Nomor 017 Tahun 2023 tanggal 10 Oktober 2023	16	98,813,000
5	Televisi	10 Oktober 2023	Telah terbit SK Penghapusan Nomor 017 Tahun 2023 tanggal 10 Oktober 2023	4	77,516,000
6	P.C Unit	10 Oktober 2023	Telah terbit SK Penghapusan Nomor 017 Tahun 2023 tanggal 10 Oktober 2023	15	157,575,000
Total				41	1,286,756,040

3. Barang Milik Negara Pada Pusdiklat APUPPT Per 31 Desember 2023

a. Nilai Barang Milik Negara dan Persediaan Per 31 Desember 2023

Nilai Barang Milik Negara (BMN) dan Persediaan pada Pusdiklat APU PPT per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp179,543,205,567 (seratus tujuh puluh sembilan miliar lima ratus empat puluh tiga juta dua ratus lima ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah) yang merupakan gabungan antara BMN intrakomptabel, BMN ekstrakomptabel, dan Persediaan. Penyajian nilai BMN dan Persediaan dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Neraca	Intrakompatible		Ekstrakompatible		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Aset Lancar						
1	Barang Konsumsi	578.701.304	0,32%	-	0,00%	578.701.304	0,32%
2	Bahan untuk pemeliharaan	39.715.719	0,02%	-	0,00%	39.715.719	0,02%
3	Suku Cadang	25.450.722	0,01%	-	0,00%	25.450.722	0,01%
4	Bahan Baku	1.571.760	0,00%	-	0,00%	1.571.760	0,00%
5	Persediaan lainnya	24.837.362	0,01%	-	0,00%	24.837.362	0,01%
Sub Jumlah		670.276.867	0,37%	-	0,00%	670.276.867	0,37%
II	Aset Tetap						
1	Peralatan dan Mesin	37.509.748.093	20,90%	41.286.800	100,00%	37.551.034.893	99,51%
2	Gedung dan Bangunan	99.251.678.085	55,29%	-	0,00%	99.251.678.085	55,28%
3	Tanah	41.534.373.342	23,14%	-	0,00%	41.534.373.342	23,13%
4	Jalan dan Jembatan	149.962.000	0,08%	-	0,00%	149.962.000	0,08%
5	Jaringan	85.640.000	0,05%	-	0,00%	85.640.000	0,05%
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	99.017.550	0,06%	-	0,00%	99.017.550	0,06%

Sub Jumlah (2)		178.630.419.070	99,51%	41.286.800	100,00%	178.671.705.870	99,51%
III	Aset Lainnya						
1	Aset Tetap Lainnya	79.329.600	0,04%	-	0,00%	79.329.600	0,04%
2	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	27.472.500	0,02%	-	0,00%	27.472.500	0,02%
3	Aset Tak Berwujud	94.420.730	0,05%	-	0,00%	94.420.730	0,05%
Sub Jumlah (3)		201.222.830	0,11%	-	0,00%	201.222.830	0,11%
Total		179.501.918.767	100,00%	41.286.800	100,00%	179.543.205.567	100,00%

b. Nilai Akumulasi Penyusutan Barang Milik Negara Per 31 Desember 2023

Adapun rincian nilai Akumulasi Penyusutan Barang Milik Negara pada Pusdiklat APU PPT per 31 Desember 2023 per perkiraan Neraca adalah sebagai berikut:

No	Uraian Akumulasi Penyusutan	Intrakompatible		Ekstrakompatible		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
II	Aset Tetap						
1	Peralatan dan Mesin	35.124.672.064	70,50%	41.021.175	100,00%	35.196.293.239	70,52%
2	Tanah	-	0,00%	0	0,00%	-	0,00%
3	Gedung dan Bangunan	14.401.827.265	28,91%	0	0,00%	14.401.827.265	28,88%
4	Jalan dan Jembatan	121.844.125	0,24%	0	0,00%	121.844.125	0,24%
5	Jaringan	18.555.329	0,04%	0	0,00%	18.555.329	0,04%
Sub Jumlah		49.697.498.783	99,69%	41.021.175	100,00%	49.738.519.958	99,69%
III	Aset Lainnya						
1	Aset Tetap Lainnya	33.976.250	0,07%	0	0,00%	33.976.250	0,07%
2	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	27.472.500	0,06%	0	0,00%	27.472.500	0,06%
3	Aset Tak Berwujud	94.420.730	0,19%	0	0,00%	94.420.730	0,19%
Sub Jumlah (2)		155.869.480	0,31%	0	0,00%	155.869.480	0,31%
Total		49.853.368.263	100,00%	41.021.175	100,00%	49.894.389.438	100,00%

4. Permasalahan Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Negara

Permasalahan yang perlu disampaikan terkait Penatausahaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara antara lain:

1. Perkembangan pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Negara yang kurang didukung dengan pengembangan kompetensi pegawai;
2. Sulitnya melakukan inventarisir Barang Milik Negara dengan kondisi rusak berat dikarenakan tidak adanya ruangan penyimpanan BMN; dan
3. Tidak terintegrasinya data pada aplikasi Sakti dan SIMAN menyebabkan kurang updatenya data pada aplikasi SIMAN.

6. Langkah-langkah Strategis Sebagai alternatif Penyelesaian Masalah

Dalam rangka penyelesaian masalah terkait pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Negara pada Pusdiklat APU PPT, langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan yaitu antara lain:

1. Melakukan koordinasi yang intensif dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan instansi vertikalnya serta melakukan *sharing knowledge* terkait penggunaan BMN terutama upaya-upaya untuk pemeliharaan BMN;
2. Perlu adanya ruangan sementara untuk menyimpan BMN dalam kondisi rusak berat dan petugas segera melakukan proses penghapusan BMN tersebut melalui mekanisme lelang; dan
3. Petugas pengelola BMN dan Persediaan melakukan update data secara berkala pada aplikasi Sakti dan SIMAN.

Depok, 06 Mei 2024
Kuasa Pengguna Barang

Akhyar Effendi
NIP 196802231993031001

Lampiran E



HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

31 DESEMBER 2023

PUSDIKLAT ANTI PENCUCIAN UANG
DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME
DEPOK, JAWA BARAT



**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 417654
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	29,047,337,000	29,047,337,000	0
2	Belanja	28,963,824,948	28,963,824,948	0
3	Pengembalian Belanja	-13,242,151	-13,242,151	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	446,720,880	446,720,880	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 22-JAN-24



Lampiran

F



KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2023

**PUSDIKLAT ANTI PENCUCIAN UANG
DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME
DEPOK, JAWA BARAT**

KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)
TA 2023 Audited

Kode dan Nama UAKPA : (417654) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
 Kode dan Nama UAPPAW : (078) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
 Kode dan Nama Eselon 1 : (078) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
 Kode dan Nama K/L : (078) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Objek Penelaahan		Kondisi LK	Seharusnya
Beri tanda centang (✓) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A			
Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran			
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN			
	Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok	Ada	Tidak
1	Pernyataan Tanggung Jawab	✓	Ada
2	Face LRA, Neraca, LO dan LPE	✓	Ada
3	Catatan atas Laporan Keuangan	✓	Ada
	Laporan Keuangan Tambahan	Ada	Tidak
1	Neraca Percobaan Akrua! Saldo Awal	✓	Ada
2	Neraca Percobaan Akrua!	✓	Ada
3	Neraca Percobaan Kas	✓	Ada
4	Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	✓	Ada
KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MONSAKTI			
	Kesesuaian Saldo	Sama	Tidak
1.	Semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI	✓	Sama
Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.			
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI			
	Persamaan Dasar Akuntansi	Sama	Tidak
1	Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE	✓	Sama
2	Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	✓	Sama
3	Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas	✓	Sama
PENGECEKAN PADA MONSAKTI			
	To Do List	Ya	Tidak
1	Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan		✓
2	Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat anomali)	✓	
3	Terdapat Persediaan Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		✓
4	Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan		✓
5	Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		✓
6	Terdapat Aset Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		✓
7	Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan		✓
8	Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan		✓
9	Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		✓
10	Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan Penyisihan Piutang		✓
11	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan		✓

12	Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan		√	Tidak
Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah				
	Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?		√	Tidak
2	Adakah "TDK COA" yang BEDA?		√	Tidak
3	Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?		√	Tidak
	a. Pagu/DIPA		√	Tidak
	b. Estimasi PNBPN		√	Tidak
	c. Belanja		√	Tidak
	d. Pengembangan Belanja		√	Tidak
	e. Pendapatan		√	Tidak
	f. Pengembangan Belanja		√	Tidak
	g. Kas BLU		√	Tidak
	h. Kas di Bendahara Pengeluaran		√	Tidak
	i. Kas Hibah		√	Tidak
	j. Pengesahan Hibah Langsung		√	Tidak
	Rekon Internal	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Selisih Rekon Internal		√	Tidak
	Daftar MONSAKTI	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal di catatan telaah)		√	Ada/Tidak
2	Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregister')		√	Ada/Tidak
3	Adakah Neraca Tidak Balance?		√	Tidak
4	Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)		√	Tidak
5	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?		√	Tidak
6	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		√	Tidak
PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL				
	Pengecekan Saldo Neraca Percobaan	Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrual		√	Tidak
2	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		√	Tidak
3	Terdapat Saldo bernilai desimal		√	Tidak
	Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)	√		Ya
2	Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)	√		Ya
3	Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
4	Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
5	Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D)	√		Ya
6	Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)	√		Ya
7	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
	Akun-Akun yang tidak boleh ada	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		√	Ada/Tidak
2	Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya akun BUN)		√	Tidak
3	Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		√	Tidak

4	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		√	Tidak
5	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		√	Tidak
6	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		√	Tidak
7	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		√	Tidak
8	Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)		√	Tidak
9	Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN		√	Tidak
10	Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)		√	Tidak
11	Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban Utang/Subsidi/Hibah/ Lain-Lain/Transfer TAYL)		√	Tidak
12	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)		√	Tidak
13	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang ada di satker yang tidak terkait tusi pengamanan, Pita Cukai, Materai dan Leges yang ada di K/L selain Kementerian Keuangan (DJP dan/atau DJBC)		√	Tidak
	Jika Bukan Satker BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa "BLU"		√	Tidak
2	Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)		√	Tidak
3	Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)		√	Tidak
4	Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)		√	Tidak
	Terkait Satker BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		√	Ada/Tidak
	Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah			
2	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		√	Tidak
	Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam rangka bantuan pemerintah/Bantuan Sosial pada KL yang tidak memiliki Tusi Penyaluran Bantuan Pemerintah/Bantuan Sosial		√	Tidak
2	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI		√	Tidak
	Hibah Langsung	Ada	Tidak	Seharusnya
	Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		√	Ada/Tidak
1	Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul di laporan interim (karena masih dalam proses pengesahan). Akun tersebut tidak boleh muncul pada laporan keuangan tahunan.		√	Ada/Tidak
2	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)		√	Ada/Tidak
3	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133- Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)	NA		Ya
4	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?	NA		Ya
5	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?	NA		Ya
	Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		√	Ada/Tidak
1	Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang	NA		Ya
	Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal			

1	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI	0		
2	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)	0		
3	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		√	Tidak
	Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat Akun 425913 pada Neraca Percobaan Kas?		√	Ya/Tidak
2	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?	NA		Ya/Tidak
3	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada GLP untuk menghapus 425913 di NP Akrua?	NA		Ya
	Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		√	Ya/Tidak
2	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?)		√	Ya/Tidak
	Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam CaLK			
	Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah		√	Ya/Tidak
PENGECEKAN NERACA				
	Pengecekan Pos-pos Neraca	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Saldo Awal 1 Jan 20XX di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya	√		Ya
2	Saldo pada neraca bernilai wajar	√		Ya
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	√		Ya
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening	√		Ya
5	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan perbedaannya sebesar saldo kas dan Bank BLU belum disahkan atau Deposito	NA		Ya
6	Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?		√	Tidak
7	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan?	√		Ya
8	Terdapat saldo bernilai desimal		√	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL				
	Pengecekan Pos-pos LO	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)		√	Tidak
2	Terdapat pendapatan hibah (43xxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxx), beban subsidi (55xxx), beban hibah (56xxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx) .		√	Tidak
3	Terdapat kodifikasi atau uraian akun null		√	Tidak
4	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang	√		Ya
5	Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/penurunan saldo yang signifikan?	√		Ya/Tidak
6	Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar	√		Ya/Tidak
7	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS				
	Pengecekan Pos-pos LPE	Ya	Tidak	Seharusnya
1	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	√		Ya
2	Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya	√		Ya/Tidak
3	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari IP		√	Tidak
4	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak

	Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?	√		Ya
	Contoh : Pengungkapan 391116 senilai Rp151.500.000 disebabkan oleh transaksi saldo awal senilai Rp100.000.000, transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas senilai Rp51.500.000 dengan dokumen sumber BAST			
2	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas dimaksud? (313111, 313121, 313211, 313221, 391131, 391132, 391133, 391141)	√		Ya
PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)				
	Pengecekan Pos-pos LRA/B/P	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat saldo negatif di LRAB	√		Tidak
2	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		√	Tidak
3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		√	Tidak
4	Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"		√	Tidak
5	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
6	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)		√	Ya/Tidak
7	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)	NA		Ya
TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN				
	Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya jika jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "TIDAK"	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun :	√		Ya/Tidak
	- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)	√		Ya/Tidak
	- Beban Penyisihan Piutang (di LO)		√	Ya/Tidak
	- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang	√		Ya/Tidak
2	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun :		√	Ya/Tidak
	- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		√	Ya/Tidak
3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun :			Ya/Tidak
	- Beban Persediaan (di LO)	√		Ya/Tidak
4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun :	√		Ya/Tidak
	- Akumulasi AT/AL (Neraca)	√		Ya/Tidak
	- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	√		Ya/Tidak
5	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrua?	√		Ya/Tidak
	Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?	√		Ya
	Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ?		√	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas		NA	Ya
2	Apakah ada Beban Bansos ?		√	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas		NA	Ya
	Pengecekan Jurnal Manual Akrua pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo Harus Ditatausahakan)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akrua		√	Ya/Tidak
2	Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X)		√	Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akrua	NA		Ya/Tidak
3	Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akrua	√		Ya/Tidak
4	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)	√		Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akrua	√		Ya/Tidak
5	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akrua	√		Ya/Tidak
TELAAH LK BLU				
	LPSAL BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?	NA		Ya

2	Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?	NA	Tidak
3	Apakah formula perhitungan SAL pada LPSAL telah sesuai?	NA	Ya
4	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan AkruaL BLU?	NA	Ya
5	Apakah Nilai SiLPA/SiKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit) pada LRA	NA	Ya
6	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Neraca Percobaan Kas BLU ?	NA	Ya
LAK BLU		Ya	Tidak
1	Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx, 111826, 1133xx, 165111, dan 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan AkruaL BLU?	NA	Ya
2	Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK?	NA	Ya
3	Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca	NA	Ya
4	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca Percobaan BLU	NA	Ya
5	Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca	NA	Ya
6	Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca	NA	Ya
7	Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun 111914 pada Neraca Percobaan BLU	NA	Ya

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN

"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk

Note:

A Terdapat peningkatan saldo yang signifikan, yaitu:

- Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya dikarenakan peningkatan pendapatan layanan pelatihan dan Penggunaan Sarana Prasarana untuk pelatihan
- Beban Pelepasan Aset Non Lancar dikarenakan Penghapusan Bangunan Gedung Kantor Permanen, Tempat Ibadah Permanen, dan Lemari Kayu.

Terdapat penurunan saldo signifikan dikarenakan penurunan Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah

B Terdapat Koreksi yang Mengurangi Ekuitas signifikan dikarenakan Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi.

C Terdapat saldo negatif di LRAB dikarenakan terdapat pengembalian belanja.

D Terdapat Piutang Bukan Pajak pada Neraca sehingga terdapat Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak, tetapi tidak terdapat Beban Penyisihan Piutang (di LO) dikarenakan piutang belum diketahui pasti jadwal pembayarannya.

Mengetahui
Pejabat Penyusun LK UAKPA,

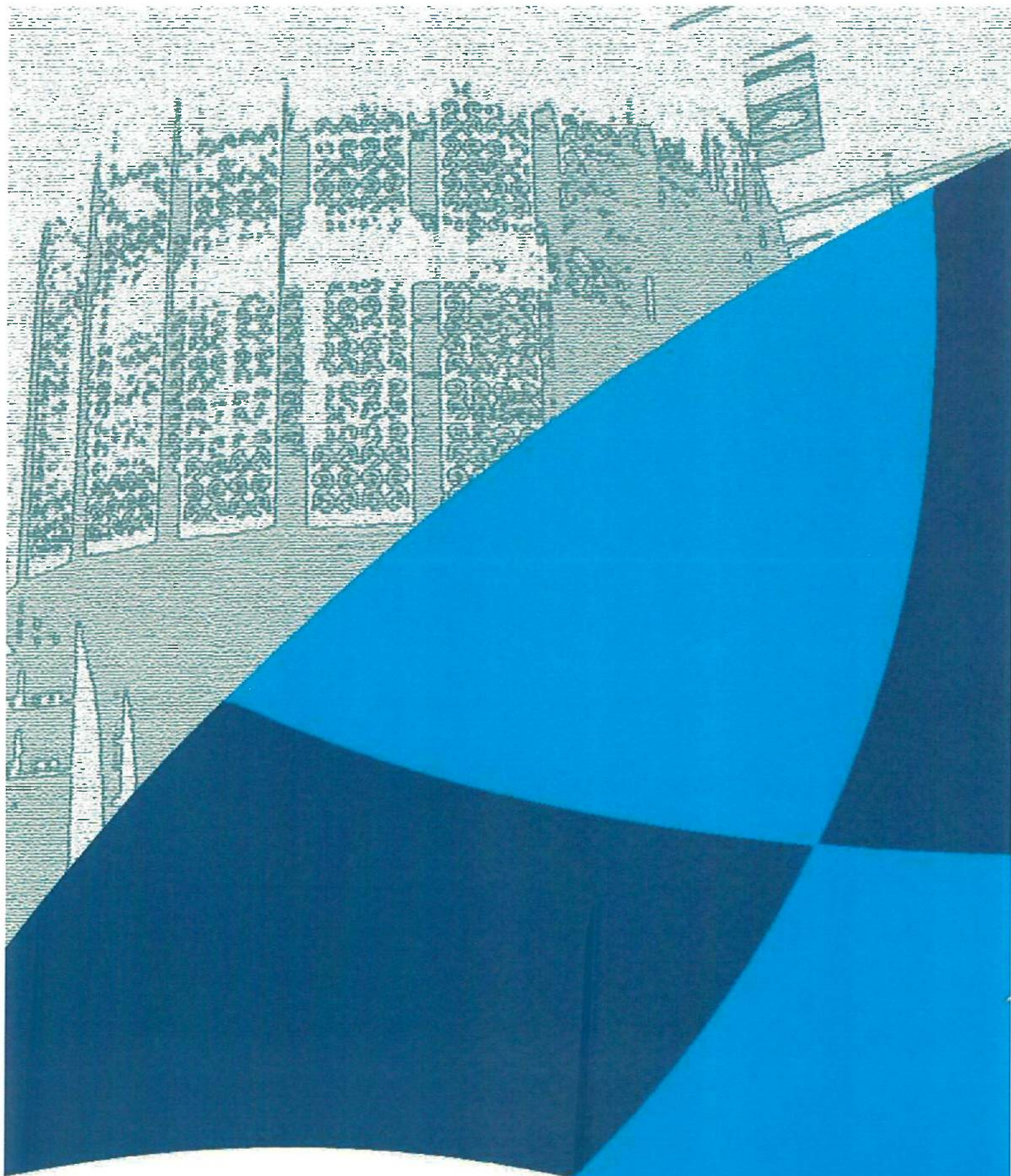


(Yuani Prastiti)
NIP. 198401112009012006

Depok, 6 Mei 2024
Penelaah,



(Anita Listyani)
NIP. 198807142014022002



PUSDIKLAT APU-PPT

Indonesian Financial Intelligence Institute (IFI)

Jl. Tapos Raya No. 82, Tapos, Depok 16459

(021) 8750132, 8750133

pusdiklat-apuppt.ppatk.go.id

pusdiklat-apuppt@ppatk.go.id